

COREMAP & DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT :

KASUS DESA LIMBUNG, KABUPATEN LINGGA



HANING ROMDIATI
SARI SEFTIANI



INDONESIA PINTAR PUBLISHING

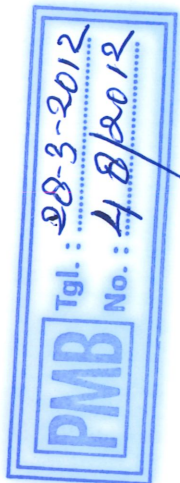


LIPI



COREMAP-LIPI

**COREMAP DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN
MASYARAKAT : KASUS DESA LIMBUNG, KABUPATEN LINGGA**



Penulis :
Haning Romdiati
Sari Seftiani

Layout :
Puji Hartana

Desain Cover :
Puji Hartana

ISBN :
978-602-8942-55-3



INDONESIA PINTAR PUBLISHING (Anggota IKAPI)
Billymoon Jl. Tumpi 1, Blok CE 4, No. 10
Pondok Kelapa Duren Sawit – Jakarta Timur
www.indonesiapintar-net, e-mail: indopintar@yahoo.com

Bekerjasama dengan



LIPI



COREMAP-LIPI

Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI dan COREMAP-LIPI

Jln. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta Utara 14430

Telp. 62-21-64713850, Fax: 62-21-64711948

Website: <http://oseanografi.lipi.go.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program-COREMAP*) fase II di kabupaten Lingga pada tahun 2011 telah memasuki tahun akhir implementasi. Kabupaten Lingga merupakan salah satu lokasi COREMAP II yang didanai oleh *Asian Development Bank* (ADB). Pendekatan COREMAP II ini menekankan pada pengelolaan berbasis masyarakat (PBM) yang mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat untuk mewujudkan ekosistem terumbu karang yang sehat dan ikan berlimpah sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan PBM dalam COREMAP II yang terlihat berdampak nyata pada kondisi masyarakat adalah kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP) dan pengelolaan kelestarian ekosistem terumbu karang (melalui pengembangan DPL).

Penulisan buku ini berdasar pada hasil survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang tahun 2006 dan hasil kajian BME tahun 2008, 2010, dan 2011. Survei dan kajian BME tersebut dilakukan oleh CRITC-LIPI bekerjasama dengan tim peneliti Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI (PPK-LIPI) dan di lingkungan deputian IPSK - LIPI.

Terlaksananya kegiatan penelitian dan penulisan buku ini melibatkan berbagai pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih tim penulis sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI dan Kepala Pusat Penelitian Kependudukan- LIPI. Kepada para informan: masyarakat nelayan, ketua dan pengurus LPSTK dan Pokmas, pemimpin formal dan informal, tokoh masyarakat di lokasi desa Limbung; tim penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pewawancara yang telah membantu pelaksanaan survei. Kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua narasumber dari berbagai unsur pengelola COREMAP di tingkat kabupaten, dan berbagai pihak yang telah membantu memberikan data

dan informasi. Kepada teman-teman staff administrasi di Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI juga kami ucapkan terima kasih untuk bantuan yang telah diberikan.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna meskipun tim peneliti telah berusaha sebaik mungkin dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini.

Jakarta, Desember 2011

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI	v	
DAFTAR TABEL	vii	
DAFTAR GAMBAR	ix	
BAGIAN 1	PENGELOLAAN TERUMBU KARANG	1
1.1	COREMAP di Kabupaten Lingga	1
1.2	Menilai Perkembangan COREMAP II Aspek Sosial Ekonomi	7
1.3	Pelaksanaan COREMAP dan Kajian BME di Desa Limbung	9
1.4	Tentang Buku Ini	14
BAGIAN 2	KEGIATAN EKONOMI DAN PENDAPATAN MASYARAKAT	17
2.1	Kegiatan Ekonomi: Dinamika Mata Pencarian	17
2.2	Pendapatan Rumah Tangga: Pekerjaan Kenelayan sebagai Sumber Utama	26
2.2.1	Pendapatan dari Semua Sumber	27
2.2.2	Pendapatan Dari Kegiatan Kenelayan	35
2.3	Perubahan Pendapatan Dalam Konteks Indikator Keberhasilan COREMAP	44

BAGIAN 3	USAHA EKONOMI PRODUKTIF DAN PENDAPATAN PENERIMA DANA BERGULIR	49
3.1	Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif	51
3.1.1	Kelompok Penerima Dana Bergulir Dan Jenis Pemanfaatan	52
3.1.2	Jenis dan Perkembangan Usaha	57
3.2	Perkembangan Pendapatan Penerima Dana UEP	65
BAGIAN 4	MANFAAT SOSIAL KEGIATAN COREMAP	73
4.1	Pembangunan Infrastruktur	74
4.2	Kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut	83
4.3	Persepsi Masyarakat Tentang Manfaat COREMAP	88
BAGIAN 5	PENUTUP	97
	DAFTAR PUSTAKA	107
	LAMPIRAN	109

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Distribusi Penduduk Sampel Umur 10 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Ekonomi Utama, Desa Limbung, 2006 dan 2011 (Persen)	19
Tabel 2.2.	Distribusi Penduduk Sampel Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin, Desa Limbung, Kabupaten Lingga (Persen)	22
Tabel 2.3.	Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan Rata-Rata Per Bulan, Desa Limbung, Kabupaten Lingga, Tahun 006, 2008, 2010, Dan 2011 (Persen)	32
Tabel 2.4.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Per Bulan Dari Kegiatan Kenelayanan, Desa Limbung, Kabupaten Lingga, Tahun 2006, 2008, 2010, Dan 2011 (Rupiah)	36
Tabel 2.5.	Distribusi Persentase Rumah Tangga Nelayan Menurut Kelompok Pendapatan Per Bulan, Desa Limbung, Kabupaten Lingga, Tahun 2006, 2008, 2010, Dan 2011 (Persen)	39
Tabel 2.6.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, Desa Limbung, Kabupaten Lingga, Tahun 2006, 2008, 2010, dan 2011 ('000 Rp)	43

Tabel 2.7.	Pendapatan Per Kapita, Rata-Rata Rumah Tangga, Rata-Rata Dari Kegiatan Kenelayanan, Desa Limbung, Periode 2006- 2010	47
Tabel 3.1.	Hasil Panen UEP Keramba Jaring Tancap di Desa Limbung, tahun 2010	61
Tabel 3.2.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Per Bulan Menurut Status Keanggotaan Pokmas COREMAP, Desa Limbung, Kabupaten Lingga, Tahun 2010 (Rupiah)	68
Tabel 3.2.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Per Bulan Menurut Status Keanggotaan Pokmas COREMAP, Desa Limbung, Kabupaten Lingga, Tahun 2010 (Rupiah)	71
Tabel 4.1.	Manfaat Pembangunan Sarana Fisik dan Lingkungan di Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga (Persen)	90
Tabel 4.2.	Manfaat Kegiatan Penyadaran Masyarakat (PA) di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga (Persen)	93
Tabel 4.3.	Manfaat Kegiatan Pengawasan Laut di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga (Persen)	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Kegiatan Pengolahan Ketam Di Salah Satu Pabrik Ketam Di Desa Limbung	25
Gambar 2.2.	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Per Bulan, Desa Limbung, Kabupaten Lingga, Tahun 2006, 2008, 2010, Dan 2011 (Rupiah)	28
Gambar 2.3.	Tren Perubahan Pendapatan Per Kapita Dan Rata-Rata Rumah Tangga Responden Periode 2006-2011, Desa Limbung, Kabupaten Lingga (Persen)	31
Gambar 2.4.	Tren Perubahan Pendapatan Rata-Rata Rumah Tangga Nelayan Periode 2006-2011, Desa Limbung, Kabupaten Lingga (Persen)	38
Gambar 3.1.	Keramba Jaring Tancap (KJT) COREMAP II Yang Dikelola Pokmas Di Desa Limbung	59
Gambar 4.1.	Bantuan COREMAP Berupa Dermaga/ Tambatan Perahu Di Desa Limbung	75
Gambar 4.2.	Bantuan Sarana Fisik COREMAP Berupa MCK Di Desa Limbung	77
Gambar 4.3.	Pondok Informasi Di Desa Limbung	78
Gambar 4.4.	Moda Transportasi (Kaisar) Yang Disewakan Oleh LPSTK	81

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

1.1. COREMAP di Kabupaten Lingga

Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program-COREMAP*) di Kabupaten Lingga telah dilakukan sejak fase I dan dilanjutkan pada fase II yang pada tahun 2011 telah memasuki tahun akhir implementasi. Program nasional ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumberdaya ekosistem terumbu karang dan asosiasinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Sejumlah kegiatan telah dilakukan di tingkat pemerintah kabupaten maupun masyarakat di lokasi binaan. Kegiatan COREMAP II dari aspek sosial ekonomi lebih ditekankan pada pendekatan “Berbasis Masyarakat” (PBM) yang bertujuan untuk mengajak masyarakat agar berperan aktif untuk melaksanakan kerjasama pengelolaan terumbu karang dan ekosistem terkait secara berkelanjutan.

Menurut Pedoman Umum Pengelolaan Berbasis Masyarakat COREMAP II, pelaksanaan COREMAP II dimaksudkan agar masyarakat di lokasi program mampu melaksanakan kerjasama pengelolaan terumbu karang dan ekosistem terkait secara berkelanjutan dengan memberikan akses mata pencaharian alternatif, dan perbaikan fungsi pemerintahan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DKP, 2007). Dengan demikian, kegiatan-kegiatan PBM dapat mendorong masyarakat nelayan agar berupaya untuk

menjaga kelestarian sumber daya ikan dan terumbu karang yang dapat menjamin penghasilan dan usaha penangkapan ikan guna mencukupi keperluan mereka secara terus menerus. Sejumlah kegiatan yang dikembangkan adalah memperluas akses terhadap mata pencaharian alternatif (MPA), pengawasan berbasis masyarakat di tingkat desa, pembentukan daerah perlindungan laut (DPL)¹ sebagai tabungan ikan, dan penyadaran masyarakat.

Kabupaten Lingga merupakan salah satu lokasi COREMAP II yang didanai oleh *Asian Development Bank* (ADB). Tujuh titik di tujuh desa dipilih sebagai lokasi binaan COREMAP II, yang juga merupakan lokasi program pada fase I. Lokasi binaan tersebut adalah Benan, Tajur Biru, Mamud, Perjung, Teregeh, Penaah, dan Limbung. Semua lokasi binaan sudah diintervensi dengan beberapa kegiatan pengelolaan terumbu karang dan pemberdayaan ekonomi dengan pendekatan PBM. Secara garis besar, kegiatan yang dilakukan tidak hanya dititik beratkan pada penyelamatan langsung terumbu karang, tetapi juga kegiatan-kegiatan untuk menyokong keberhasilan program yang sifatnya mendorong masyarakat untuk tidak melakukan perusakan terumbu karang, misalnya dengan memfasilitasi pembangunan perekonomian warga dengan membangun infrastruktur (tanjungpinangpos.co.id, Agustus 2011). Menurut salah seorang pengelola COREMAP Kabupaten Lingga, sejumlah kegiatan yang telah dilakukan adalah kegiatan, seperti penguatan kelembagaan, jaringan CRITC (penelitian), pengembangan SDM dan penyuluhan,

¹ Daerah Perlindungan Laut merupakan kawasan laut yang ditetapkan dan diatur sebagai daerah “larang ambil”, secara permanen, tertutup bagi berbagai aktivitas pemanfaatan yang bersifat ekstraktif (Urgensi keberadaan Daerah Perlindungan Laut (DPL) adalah untuk menjaga dan memperbaiki keanekaragaman hayati pesisir dan laut, seperti keanekaragaman terumbu karang, ikan, tumbuhan dan organisme laut lainnya, serta lebih lanjut dapat meningkatkan dan mempertahankan produksi perikanan).

pengelolaan SDM berbasis masyarakat, pengembangan infrastruktur dan fasilitas sosial serta mata pencaharian alternatif.

Berbagai kegiatan tersebut telah menunjukkan indikasi keberhasilan program, antara lain panen budidaya pembesaran ikan kerapu dengan keramba jaring tancap dan apung di Tajur Biru dan Mamud. Menurut hasil pantauan tim ADB di Desa Limbung pada awal tahun 2011 menemukan bahwa pengembangan MPA (mata pencaharian alternatif), berupa budidaya kerapu telah dirasakan mampu menambah pendapatan masyarakat (<http://surajis.multiply.com/journal/item/158>). Selain sudah dapat memberikan tambahan pendapatan pada peserta program (anggota pokmas), pembangunan pondok informasi, tambatan perahu, dan MCK juga sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya mereka yang tinggal di sekitar lokasi prasarana sosial tersebut.

Walau sudah dinilai cukup berhasil, berbagai upaya COREMAP II untuk pengelolaan terumbu karang dan pemberdayaan ekonomi masih menghadapi kendala, utamanya berkaitan dengan kegiatan pertambangan bauksit yang lokasinya berada dalam wilayah COREMAP, seperti di daerah Teregeh di Desa Sekanah. Usaha pertambangan seringkali membawa pengaruh buruk terhadap lingkungan, termasuk pada lingkungan ekosistem terumbu karang yang berdampak pada kegiatan kenelayanan. Hal ini karena kegiatan tersebut menghasilkan limbah berbahaya yang walaupun ditampung dalam tanggul, tetapi tidak menjamin adanya kebocoran atau tanggul yang jebol. Suatu persoalan yang tidak mudah diatasi tanpa upaya serius dari pemerintah setempat dan pemerintah pusat. Hal ini antara lain karena sumber daya wilayah pesisir dan laut, merupakan sumber daya yang bersifat *open access* dan *common property*, sehingga setiap orang/*stakeholder* berhak memanfaatkannya dengan tujuan memperoleh nilai atau keuntungan ekonomi (Rudiyanto, tanpa tahun; Tarigan, 2008; Syafikri, 2009).

Pada tahun 2011, implementasi program COREMAP II di Kabupaten Lingga sudah memasuki tahun terakhir. Semua wilayah yang menjadi binaan telah menjalani berbagai program dan kegiatan dengan capaian yang berbeda-beda. Kegiatan peningkatan pengetahuan, penyadaran, dan kepedulian terhadap kondisi ekosistem terumbu karang telah dilakukan di semua kampung binaan, baik melalui sosialisasi maupun penetapan daerah perlindungan laut (DPL) beserta pengawasannya. Begitu pula dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP) dan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang perkembangan kegiatan ekonomi juga telah diimplementasikan. Khusus untuk kegiatan UEP yang berupa keramba jaring tancap (KJT) mulai menunjukkan kemajuan.

Kegiatan peningkatan dan penyadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian ekosistem terumbu karang dilakukan melalui kampanye dan sosialisasi. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian ekosistem terumbu karang sehingga mempengaruhi perilaku mereka untuk ikut menjaga ekosistem terumbu karang. Kesadaran nelayan untuk menjaga terumbu karang semakin meningkat. Mereka cenderung tidak mudah terpengaruh oleh tindakan nelayan lain di luar desa yang menggunakan alat-alat tangkap yang merusak, seperti *trawl* mini dan parit gamat. Pengetahuan penduduk mengenai manfaat terumbu karang tampaknya sudah semakin meluas, terutama terkait dengan fungsi ekologi. Hal ini antara lain karena pada pelaksanaan COREMAP fase I, kegiatan-kegiatan yang dilakukan lebih banyak menitikberatkan pada peningkatan pemahaman dan kepedulian terhadap pelestarian ekosistem laut yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pelestarian terumbu karang yang baik tersebut cenderung tidak

berlanjut pada saat sekarang. Penelitian BME aspek sosial ekonomi tahun 2010 mengendarai, tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat serta perangkat desa untuk menjaga dan mengawasi kawasan konservasi dan sekitarnya dari perilaku penangkapan ikan yang merusak dan penangkapan ikan yang berlebihan (*over fishing*) semakin menurun (Romdiati & E. Djohan, 2010). Sementara itu, kegiatan pengawasan dari pengelola COREMAP Kabupaten Lingga yang semestinya dilakukan oleh patroli gabungan yang anggotanya terdiri dari perwakilan setiap instansi yang berwenang dalam penegakan hukum perikanan (POLRI, TNI-AL, DKP dan KSDA), pada kenyataannya tidak dilakukan dengan baik. Kegiatan pengawasan kawasan terumbu karang, khususnya daerah perlindungan laut (DPL) hanya bergantung pada pengawasan dari masyarakat setempat yang tidak memiliki jadwal rutin karena pengawasan dilakukan hanya bersamaan pada saat nelayan melakukan kegiatan menangkap ikan. Pengawasan semakin berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Namun demikian, pengawasan yang dilakukan masyarakat secara mandiri setidaknya masih cukup efektif untuk mengurangi kegiatan yang dapat merusak ekosistem laut.

Pendekatan COREMAP II yang menekankan pengelolaan berbasis masyarakat (PBM) mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat untuk mewujudkan ekosistem terumbu karang yang sehat dan ikan berlimpah sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan PBM dalam COREMAP II yang terlihat berdampak nyata pada kondisi masyarakat adalah kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP) dan pengelolaan kelestarian ekosistem terumbu karang (yang dalam hal ini melalui pengembangan DPL). Sampai saat ini keberadaan DPL masih diakui masyarakat dan memberikan dampak positif bagi pelestarian sumber daya laut yang sekaligus memberikan keuntungan bagi para nelayan karena di

kawasan tersebut terdapat lebih banyak ikan dan jenis biota laut lainnya dibandingkan dengan kawasan perairan bukan DPL.

Perkembangan kegiatan UEP pada COREMAP II di beberapa kampung binaan menunjukkan hasil yang beragam. Di tingkat Kabupaten Lingga, bantuan berupa pemberian Keramba Jaring Tancap (KJT) yang diusahakan oleh beberapa kelompok binaan COREMAP. Pemberian bantuan berupa pengembangan budidaya ikan kerapu dalam KJT dikarenakan perairan di desa-desa binaan dianggap cocok untuk usaha tersebut. Pada tahun 2007 dan 2008 masyarakat pernah mengusahakan budidaya ikan kerapu, khususnya kerapu sunu dan macan dengan binaan dari DKP, namun usaha tersebut gagal karena keramba terkena ombak besar, selain karena kurangnya binaan dari pemerintah. Pengalaman pengembangan usaha KJT tersebut kemudian dilakukan kembali oleh masyarakat dengan fasilitas bantuan COREMAP.

Di beberapa wilayah desa binaan, pengembangan UEP berupa keramba jaring tancap (KJT) belum banyak menunjukkan hasil karena kegiatan ini membutuhkan waktu kira-kira delapan bulan masa pembesaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola COREMAP di tingkat kabupaten, tidak semua desa menunjukkan keberhasilan dalam pengembangan UEP. Pada tahun 2009, program KJT dan KJA di kawasan COREMAP Kabupaten Lingga mendapat 42 unit untuk tujuh desa, diantaranya adalah Desa Limbung, Mamut, Benan, Batu Belobang, Sekanah, Temiang, dan Desa Senayang. Masing-masing desa memperoleh bantuan 6 unit keramba atau enam Pokmas dengan jumlah dana Rp. 34.650.880 per unit (Romdiati & E Djohan, 2010). Dalam usaha KJT, bibit dan keramba disediakan oleh COREMAP, namun penyediaan vitamin dan makanan ikan (pakan) diusahakan sendiri oleh kelompok. Khusus untuk Desa Limbung tetap melaksanakan program KJT yang dipasang pada lokasi yang sama dengan dua unit KJT terdahulu. Desa Limbung merupakan salah satu

desa yang dianggap cukup berhasil dalam pengembangan KJT. Semua Pokmas memetik hasil panen walaupun ada satu Pokmas yang hanya mendapatkan hasil panen kurang dari 3 juta. Selain karena keterbatasan keterampilan dan sulitnya mendapatkan benih dan pakan, masih rendahnya motivasi dari masyarakat untuk mengembangkan usaha ini juga menjadi faktor minimnya hasil yang didapat.

Keberhasilan program COREMAP II juga dikarenakan adanya dukungan dari kelembagaan masyarakat yang dibentuk COREMAP di tingkat desa. Kelembagaan masyarakat di wilayah binaan menunjukkan kinerja yang berbeda-beda. Lembaga masyarakat yang sampai saat ini masih terus berjalan sejak dibentuk pada tahun 2006 adalah Lembaga Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) yang bertujuan mensukseskan program COREMAP dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok binaan COREMAP.

1.2. Menilai Perkembangan COREMAP II Aspek Sosial Ekonomi

Pelaksanaan COREMAP II di Kabupaten Lingga di danai oleh *Asian Development Bank*-ADB) atau Bank Pembangunan Asia. Untuk mengetahui perkembangan kegiatan COREMAP II, pihak donor tersebut telah menetapkan *target/performance indicators* dari aspek ekologi (yang diukur dari tutupan karang), maupun aspek sosial ekonomi. Target pokok pelaksanaan COREMAP II dari aspek sosial ekonomi adalah peningkatan pendapatan per kapita masyarakat di lokasi binaan COREMAP sebesar 2 persen per tahun. Selain itu, pada tataran angka kesejahteraan, program ini diharapkan juga dapat meningkatkan pendapatan pada 10.000 kepala keluarga pada akhir program.

Untuk mengetahui pencapaian indikator keberhasilan COREMAP telah ditentukan suatu cara monitoring yang dikenal dengan *Benefit Monitoring Evaluation* (BME). Kegiatan BME sosial-ekonomi dilaksanakan pada pertengahan dan akhir tahun program sehingga dapat dipergunakan untuk mengevaluasi pengelolaan dan pelaksanaan program di tingkat lokasi, kabupaten, maupun nasional. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan harapan agar pelaksanaan program tahun-tahun berikutnya lebih terarah sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Kegiatan survei *Benefit Monitoring Evaluation* (BME) di Kabupaten Lingga telah dilakukan beberapa kali di tujuh desa binaan COREMAP II. Kajian BME ini ditujukan untuk mengumpulkan data tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama pendapatan. Kajian BME bertujuan untuk mengkaji capaian COREMAP dari aspek sosial ekonomi, yang menekankan pada perubahan pendapatan masyarakat.

Tujuan umum dari kajian BME tahun 2011 adalah untuk melakukan evaluasi akhir implementasi kegiatan COREMAP II terhadap perkembangan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Tujuan umum tersebut dijabarkan dalam empat (4) tujuan khusus sebagai berikut:

1. Mengkaji perkembangan pelaksanaan kegiatan COREMAP di lokasi program.
2. Mengevaluasi perkembangan pendapatan masyarakat selama implementasi COREMAP II dan keterkaitannya dengan capaian indikator keberhasilan dari aspek sosial-ekonomi.
3. Mengevaluasi peningkatan (perubahan) pendapatan anggota kelompok masyarakat yang menerima dana bergulir (*project*

beneficiary group member) sesuai dengan indikator keberhasilan sosial-ekonomi.

4. Mengevaluasi persepsi masyarakat tentang manfaat dan dampak kegiatan COREMAP terhadap kesejahteraannya.

Hasil kajian BME tahun terakhir dipakai sebagai bahan masukan untuk implementasi COREMAP fase III agar tepat sasaran dan lebih terarah sesuai dengan tujuan program.

1.3. Pelaksanaan COREMAP dan Kajian BME di Desa Limbung

Desa Limbung merupakan salah satu desa binaan COREMAP II di Kabupaten Lingga. Desa ini terdiri dari tujuh dusun (RW), yaitu dusun Pangkalan Buluh, Air Berani, Centeng, Senempek I dan II, Sambau, dan Air Kelat. Namun, pelaksanaan COREMAP di desa ini cenderung terkonsentrasi di dusun Centeng dan Air Berani, walau ada sedikit penduduk dari dusun Serangas, Pangkalan Buluh, dan Senempek yang terlibat dalam kegiatan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibandingkan pada tahun 2010, khususnya berkaitan dengan kegiatan UEP.

Sementara itu, untuk kegiatan penyadaran masyarakat (PA) terkait pelestarian ekosistem laut terutama terumbu karang yang telah dilakukan juga menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini terlihat dari semakin bertambahnya penggunaan alat tangkap yang merusak, terutama parit gamat dan *trawl* mini oleh orang desa. Penggunaan parit gamat oleh penduduk desa juga ada. Walau dikatakan oleh sejumlah nelayan bahwa berupa parit gamat yang terbuat dari kayu dan hanya ditarik dengan sampan, tetapi jika dibiarkan bisa jadi wilayah tangkap akan semakin meluas ke arah kawasan terumbu karang. Di sisi lain, kesadaran penduduk yang tinggi terhadap penjagaan dan pelestarian terumbu karang, antara lain karena dampak

kegiatan COREMAP I, tampaknya tidak diterapkan dalam tindakan/perilaku keseharian mereka.

Nelayan melakukan pengawasan mandiri, tetapi hanya dilakukan sambil melakukan kegiatan melaut, padahal sebagian nelayan hanya melaut di sekitar permukiman mereka karena hanya menggunakan sampan. Hanya sedikit nelayan yang melaut hingga ke dekat kawasan daerah perlindungan laut (DPL) yang berada di dusun Air Kelat. Penduduk di dusun Air Kelat juga cenderung kurang peduli terhadap pelanggaran penggunaan alat-alat tangkap yang merusak, kemungkinan besar karena mereka tidak dilibatkan dalam pelaksanaan COREMAP sebagaimana pada fase I. Sementara itu, pokmaswas yang bertugas mengawasi daerah perlindungan laut (DPL) sudah mendapat bantuan peralatan, tetapi juga belum menjalankan tugas dan fungsinya. Pokmaswas mendapat bantuan kapal (*boat*) yang terdiri dari kapal dan mesin 40 PK tetapi tidak mendapat bantuan bahan bakar minyak (BBM). Pada saat ini, kapal tersebut lebih sering dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan pengawasan, misalnya digunakan oleh pengurus COREMAP kabupaten maupun desa dan aparat pemerintah desa sebagai sarana transportasi untuk meninjau suatu kawasan yang letaknya cukup jauh dan memakan waktu lama apabila melalui jalur darat karena kondisi jalan belum memadai. Selain itu, kapal (*boat*) ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sistem sewa. Pada saat penelitian berlangsung, Pokmaswas menjalani kegiatan usaha ekonomi produksi (UEP), yaitu pembudidayaan ikan kerapu melalui usaha keramba jaring tancap (KJT), seperti yang dilakukan oleh Pokmas UEP yang melakukan pengembangan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.

Berkaitan dengan implementasi kegiatan oleh LPSTK, kelembagaan COREMAP II di Desa Limbung telah menjalani

kegiatan dalam mengkoordinir dan memfasilitasi teknis pelaksanaan COREMAP yang dilakukan oleh pokmas-pokmas. Kegiatan yang dilakukan antara lain mengkoordinir kegiatan KJT dan pengelolaan persewaan peralatan yang dimiliki Pokmas Jender, kapal boat maupun motor bak pengangkut barang.

Di antara ketiga pokmas yang dibentuk: produksi, jender, dan pokmaswas, pada saat kajian ini berlangsung, Pokmas Jender sudah tidak menjalani kegiatan UEP. Meskipun demikian, Pokmas Jender masih memiliki peralatan seperti penggorengan, panci, baskom, kompor, wajan, *blender*, ember, dan jenis perlengkapan dapur lainnya. Peralatan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat dengan cara menyewa, tetapi hasilnya sepenuhnya dikelola oleh LPSTK meskipun administrasinya dimasukkan dalam kegiatan yang dikelola Pokmas Jender. Sebelumnya, usaha persewaan dikelola oleh Pokmas Jender, namun karena hasilnya tidak jelas pelaporannya, dan bahkan peralatan ada yang hilang, maka oleh LPSTK usaha tersebut diambil alih. Kenyataan ini merupakan tindakan bertentangan dengan tugas LPSTK untuk membantu dan memfasilitasi perkembangan UEP pokmas-pokmas yang dibentuknya, termasuk Pokmas Jender. Upaya pembimbingan dan pendampingan semestinya dilakukan pada Pokmas Jender, bukan mengambil alih kegiatan mereka. Diskusi kelompok dengan beberapa anggota Pokmas Jender diperoleh keterangan bahwa mereka masih berkeinginan untuk mengelola suatu kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan.

Sementara pokmas produksi telah menjalankan kegiatan dan telah mendapatkan manfaat dari usaha yang dilakukan. Dua pokmas produksi telah panen satu kali, enam pokmas satu kali panen, dan dua pokmas lainnya sedang menunggu panen. Usaha yang dilakukan sama jenisnya, yaitu usaha pembesaran ikan kerapu dengan keramba jaring tancap (KJT). Walau ada beberapa kendala terkait dengan modal usaha untuk usaha selanjutnya maupun keterbatasan pengetahuan

teknis pengelolaan KJT, serta masalah kerja kelompok, masyarakat sangat antusias dengan usaha yang mereka jalani.

Secara keseluruhan kegiatan COREMAP II yang telah dilaksanakan di Desa Limbung dapat dikatakan cukup berhasil. Kegiatan COREMAP yang berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian ekosistem laut terutama terumbu karang tampaknya menunjukkan hasil yang positif. Masyarakat secara partisipatif menjaga daerah perlindungan laut (DPL) yang difungsikan sebagai tabungan ikan untuk mewujudkan penangkapan ikan yang lestari tanpa harus menggunakan alat tangkap yang merusak sehingga sumber daya laut terutama terumbu karang di wilayah tersebut terjaga kelestariannya. Namun, keberlanjutan kegiatan pelestarian ekosistem laut ini menjadi terancam dengan rencana eksplorasi perusahaan pertambangan bauksit. Meskipun pada saat kajian berlangsung sedang dilakukan survei potensi bauksit, tetapi masyarakat sudah resah karena dampak pertambangan diperkirakan akan memengaruhi sumber penghidupan mereka yang sangat bergantung pada sumber daya laut. Limbah pertambangan sudah dipastikan akan merusak terumbu karang dan arusnya juga masuk ke wilayah penangkapan mereka sehingga berdampak negatif terhadap populasi biota laut. Kondisi ini jelas mengancam kehidupan nelayan. Pengalaman menunjukkan, kegiatan pertambangan di Desa Sekanah, kecamatan Lingga Utara telah berdampak pada pencemaran laut sehingga sumber penghasilan nelayan terganggu. Menurut informasi dari beberapa nelayan di Desa Limbung, pada saat ini sejumlah nelayan dari Desa Sekanah melaut ke perairan Desa Limbung karena di lingkungan wilayah tangkap mereka sudah sangat sulit diperoleh ikan ataupun ketam. Menurut Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara-Republik Indonesia (LPPN-RI) Lingga, sejak tahun 2006-2008 saja di Kabupaten Lingga sudah ada sekitar 57 perusahaan tambang bauksit (terbanyak), bijih

besi dan pengolahan/pemurnian bijih besi, pasir timah yang beberapa diantara perusahaan (PT) masing-masing memiliki 2 sampai 3 izin usaha pertambangan (IUP) dari Pemkab Lingga. Ini belum termasuk Izin Perkebunan Kelapa Sawit di Linau 10.00 Ha, di Sei. Pinang 12.000 Ha, Izin Perkebunan Karet di Sebangka 6.000 Ha, Izin Peternakan Sapi di Sei.Tenam 3.000 Ha yang di duga belum memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Menteri Kehutanan (Menhut) RI (www.linggapos.com). Banyaknya kegiatan pertambangan bauksit tersebut tentunya membawa dampak negatif terhadap ekosistem terumbu karang dan sumber penghidupan nelayan.

Masyarakat telah mengetahui dan sadar akan dampak negatif dari penambangan bauksit terhadap pencemaran lingkungan. Diskusi kelompok dengan para nelayan di Desa Limbung dapat disimpulkan bahwa pada umumnya masyarakat tidak setuju dengan usaha pertambangan, kecuali mereka di dusun Air Kelat yang menjadi calon lokasi tambang. Masyarakat di dusun tersebut akan mendapatkan ganti rugi lahan, tetapi mereka tampaknya tidak memahami atau tidak peduli dengan dampak negatif dari kegiatan pertambangan. Sebaliknya, sebagian besar masyarakat terutama masyarakat di Desa Limbung keberatan dan menolak kegiatan penambangan bauksit karena dapat merusak laut yang merupakan sumber pendapatan kebanyakan masyarakat di Desa Limbung. Masyarakat Desa Limbung tampaknya memahami dampak dari kegiatan pertambangan terhadap kehidupan mereka. Hal ini karena sebagian penduduk di desa ini telah melihat desa-desa yang sudah terkena dampak dari penambangan bauksit tersebut, seperti Desa Sekanah, yaitu di dusun Teregeh. Nelayan di dusun tersebut pada umumnya sudah tidak dapat lagi menangkap ikan di perairan yang ada di sekitar dusun tersebut.

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari penambangan bauksit ini sangat membantu upaya pelestarian ekosistem laut yang menjadi fokus utama kegiatan

COREMAP. Selain itu, pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang tinggi tentang dampak negatif dari kegiatan penambangan bauksit masih belum cukup jika tidak ada dukungan dan peran aktif pemerintah daerah untuk ikut mencegah pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan pertambangan yang tidak ramah lingkungan.

1.4. Tentang Buku Ini

Buku ini terdiri dari lima bagian. Bagian pertama adalah Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, tujuan penelitian, dan metodologi yang dipakai dalam kajian ini, serta uraian singkat tentang perkembangan pelaksanaan COREMAP II di Kabupaten Lingga dan dinamika penduduk di lokasi COREMAP II. Bagian II berisi bahasan tentang perubahan pendapatan masyarakat yang sebelumnya diawali dengan deskripsi tentang kegiatan ekonomi penduduk sampel. Bahasan mengenai dana bergulir dan dampaknya terhadap pendapatan masyarakat terdapat pada Bagian III. Analisis pada bagian ini dikhususkan pada rumah tangga sampel yang pernah dan sedang mendapat bantuan dana bergulir, baik berdasarkan data survei maupun data kualitatif dengan menampilkan beberapa kasus perkembangan usaha yang dijalani oleh kelompok masyarakat (Pokmas). Perkembangan pendapatan penerima dana bergulir juga dibahas pada Bagian III. Bantuan COREMAP dalam bentuk sarana-prasarana dibahas pada Bagian IV, disamping juga menguraikan tentang persepsi masyarakat tentang manfaat COREMAP II. Buku ini diakhiri dengan Bagian Penutup yang berisi tentang ringkasan dan rekomendasi.

Buku ini ditulis berdasar data dan informasi yang dikumpulkan oleh tim peneliti PPK-LIPI pada tahun 2006 dan 2011. Penelitian tersebut mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode survei, wawancara terbuka, dan diskusi kelompok. Jumlah rumah tangga yang disurvei sebanyak 75 rumah

tangga, lebih sedikit dibanding jumlah rumah tangga sampel pada survei data dasar maupun kajian BME tahun 2006 yang mencapai 100 rumah tangga. Selisih jumlah responden sebanyak 25 rumah tangga diperkirakan tidak akan berpengaruh dalam analisis karena karakteristik sosial ekonomi responden cenderung homogen, terutama bergantung pada sumber penghidupan kenelayanan dan sebagian besar berpendapatan rendah. Sementara itu, pengumpulan data dengan metode wawancara terbuka dilakukan pada sejumlah informan kunci yang mengetahui tentang subyek penelitian, misalnya tokoh masyarakat, rumah tangga responden, dan anggota Pokmas, serta *stakeholders* terkait di tingkat kabupaten. Untuk diskusi kelompok terfokus dilakukan dengan beberapa kelompok, yaitu Pokmas KJT, Jender, dan kelompok nelayan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, kegiatan observasi pada obyek-obyek yang terkait dengan perkembangan kegiatan COREMAP II dan kondisi desa maupun masyarakat secara umum juga dilakukan pada penelitian tahun 2006 maupun 2011.

KEGIATAN EKONOMI DAN PENDAPATAN MASYARAKAT

2.1. Kegiatan Ekonomi: Dinamika Mata Pencaharian

Kegiatan ekonomi penduduk di Desa Limbung sangat bergantung pada sumber daya alam, terutama sumber daya laut. Pekerjaan bidang perikanan tangkap merupakan sumber mata pencaharian utama bagi mayoritas penduduk. Monografi Desa Limbung tahun 2010/2011 menunjukkan, dari 1.748 jiwa penduduk, sebanyak 1.025 (58,64 persen) yang bekerja. Di antara mereka, sebesar 96,1 persen bekerja sebagai nelayan, dan selebihnya bekerja sebagai petani, pedagang, tukang bangunan, guru honorer, buruh pada industri rumah tangga pengolahan ketam, dan lainnya. Pekerjaan nelayan dan petani (sebagian besar berupa kebun karet) pada umumnya dilakukan oleh laki-laki, sedangkan buruh industri rumah tangga dikerjakan oleh perempuan. Pekerjaan perdagangan yang dilakukan oleh warga keturunan Cina pada umumnya lebih besar skala usahanya dibanding warga etnis melayu, dan mereka terkonsentrasi di dusun Centeng. Sebagian warga keturunan Cina mempunyai pekerjaan sebagai petani kebun karet dan mereka tinggal di dusun Pangkalan Buluh. Kondisi pekerjaan penduduk Desa Limbung tersebut nampaknya tidak banyak berubah polanya sejak tahun 2006, waktu dilakukan pengumpulan “Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang” (Romdiati dkk, 2008).

Data pada tingkat mikro, yaitu data survei tahun 2006 dan 2011 pada tabel 2.1 dan 2.2 memperlihatkan adanya sedikit perubahan pada

jenis kegiatan ekonomi dan mata pencaharian responden. Jumlah responden untuk dua titik tahun penelitian tersebut tidak sama, tetapi diharapkan dapat menggambarkan kondisi mata pencaharian penduduk Desa Limbung, karena pekerjaan penduduk relatif homogen. Demikian pula batas usia untuk membedakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja juga berbeda, yaitu batas terendah 7 tahun pada tahun 2006 dan 10 tahun pada tahun 2011. Dengan demikian, perubahan yang terjadi tentunya juga berhubungan dengan penggunaan konsep yang berbeda.

Selama periode tahun 2006-2011 terjadi peningkatan persentase penduduk yang bekerja, yaitu dari 47,5 persen menjadi 53,9 persen. Peningkatan ini menggambarkan semakin meningkatnya jumlah dan proporsi penduduk usia produktif yang masuk dalam pasar kerja. Hal ini juga diindikasikan adanya penurunan proporsi responden yang tidak bekerja/mencari pekerjaan, dari 11,9 persen pada tahun 2006, menjadi 9,1 persen di tahun 2011. Penurunan juga terjadi pada mereka yang masih berstatus sekolah, dimana kondisi ini sejalan dengan penurunan proporsi responden usia 10-24 tahun (lihat lampiran tabel 1). Pada lampiran tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2006, persentase responden pada kelompok usia tersebut sebesar 28,5 persen, lebih besar dibanding angka pada tahun 2011 (17,4 persen).

Peningkatan pada ART responden yang bekerja dan sebaliknya ada penurunan pada mereka yang masih sekolah (terutama pada kelompok usia < 15 tahun) tersebut berdampak pada penurunan angka beban ketergantungan. Data survei memperlihatkan, pada tahun 2006, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 311 jiwa, sedangkan penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) adalah 135 jiwa, sehingga angka ketergantungan sebesar 43,4 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif di Desa Limbung menanggung beban 43 penduduk usia tidak produktif. Sementara itu, data kajian BME tahun 2011 menunjukkan angka beban

ketergantungan yang turun menjadi 42,3². Meskipun penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan, penurunan penduduk usia tersebut setidaknya memberikan kontribusi pada semakin rendahnya angka ketergantungan. Apabila angka ketergantungan yang menurun dapat terus berlanjut, maka akan semakin mendukung upaya pengembangan usaha ekonomi produktif di wilayah ini, sehingga semakin banyak penduduk yang berstatus bekerja, atau menurunkan angka pengangguran.

Tabel 2.1
Distribusi Penduduk Sampel Umur 10 Tahun ke Atas Menurut
Kegiatan Ekonomi Utama, Desa Limbung, 2006 dan 2011
(Persen)

<i>Kegiatan Utama</i>	<i>2006</i>	<i>2011</i>
Bekerja	47,5	53,9
Tidak bekerja	11,9	9,1
Sekolah	25,7	22,4
Mengurus rumah tangga	11,9	14,6
Jumlah	100,0	100,0
N	404*	219

Catatan: batas usia kerja pada survei tahun 2006 adalah 7 tahun ke atas, sedang survei BME tahun 2011 menggunakan batas usia 10 tahun ke atas.

² Penurunan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) tersebut juga terutama karena adanya penurunan proporsi ART responden pada kelompok usia 10-14 tahun, yakni dari 10,5 persen (tahun 2006) ke 8,1 persen (tahun 2011). Walau pada kelompok usia 5-9 tahun dan 60 tahun ke atas terjadi peningkatan angka persentase, tetapi jumlah penduduk usia bukan produktif (0-14 tahun) dan 60 tahun ke atas pada tahun 2011 lebih sedikit dibanding pada tahun 2006.

Di antara ART responden yang bekerja, Tabel 2.2 memperlihatkan bahwa subsektor perikanan laut merupakan lapangan pekerjaan yang memiliki peran penting sebagai sumber mata pencaharian utama penduduk Desa Limbung, baik pada tahun 2006 maupun 2011, walau terjadi sedikit penurunan. Pada tahun 2011, lebih dari separuh ART responden melakukan pekerjaan utama di subsektor perikanan laut, kira-kira seperlimanya bekerja di industri pengolahan, dan selebihnya di sektor-sektor perdagangan, jasa, perkebunan karet rakyat dan lainnya.

Perkembangan mata pencaharian penduduk tidak menonjol. Data pada tabel 2.2. menunjukkan, perubahan mata pencaharian penduduk terjadi pada subsektor perikanan tangkap yang turun dari 58,1 persen pada tahun 2006 menjadi 51,7 persen di tahun 2008. Penurunan tersebut kemungkinan berkaitan dengan bergesernya pekerjaan utama ke pekerjaan sampingan, antara lain beberapa responden yang pada tahun 2006 mempunyai lapangan pekerjaan di bidang perikanan tangkap, tetapi kemudian bergeser menjadi pekerjaan sampingan, kemungkinan ke lapangan pekerjaan perdagangan. Lapangan pekerjaan subsektor perikanan tangkap didominasi oleh laki-laki, suatu kondisi yang sangat umum ditemukan di daerah-daerah nelayan lainnya. Sangat mudah dipahami karena sifat pekerjaan di bidang perikanan tangkap membutuhkan kekuatan fisik untuk menjalankan sampan/perahu motor dan menggunakan alat-alat tangkap. Namun, cukup menarik dari hasil survei, yaitu ada kecenderungan peningkatan proporsi perempuan yang bekerja pada sub-sektor perikanan, meskipun angkanya kecil. Berdasar keterangan dari dua orang perempuan nelayan diketahui bahwa pekerjaan tersebut mereka lakukan untuk menambah penghasilan rumah tangga (bagi perempuan bersuami) atau bahkan juga sebagai sumber penghasilan utama (untuk mereka yang belum menikah atau janda). Dalam melakukan pekerjaan, perempuan nelayan tersebut biasanya

mendayung sampan sendiri dan kemudian memasang bubu ketam dan/atau jaring ketam. Seorang nelayan perempuan bahkan memiliki keramba jaring tancap (KJT) untuk pembesaran ikan kerapu, walau masih dalam skala sangat kecil. Kenyataan naiknya proporsi perempuan yang bekerja pada subsektor perikanan tangkap merupakan faktor yang kondusif untuk meningkatkan peran perempuan dalam kegiatan ekonomi di bidang kenelayanan, tidak lagi hanya terkonsentrasi di bidang-bidang pekerjaan yang selama ini dianggap sebagai pekerjaan perempuan seperti perdagangan dan industri rumah tangga. Keinginan perempuan untuk mengembangkan usaha karamba secara berkelompok seperti yang dijalankan oleh laki-laki yang tergabung dalam pokmas produksi juga diungkapkan dalam diskusi kelompok dengan beberapa perempuan di dusun Air Berani, Desa Limbung, yaitu sebagai berikut:

“.....Pernah, pas pertemuan di kantor lama pernah kami mengajukan (untuk buat KJT Pokmas Jender), cuma mungkin COREMAP itu mungkin kurang percaya, kurang yakin. Kami sudah bilang dengan Pak K (LPSTK), mungkin Pak K tahu ibu-ibu di sini yang bisa melaut. Sebenarnya gini bu, kami rencananya seperti ini bu, kalau memang ibu-ibunya ada yang sebagian tidak bisa ke laut tetapi kan suaminya bisa bantu bu. Kemarin saya sudah ngomong sama Pak K, kalau tidak bisa ibu-ibu semua, ya kami mau diselipkan pada kelompok bapak-bapak kalau pas ada yang keluar, tapi nyatanya tidak juga buk” (FGD dengan anggota Pokmas Jender).

Tabel 2.2
Distribusi Penduduk Sampel yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Desa Limbung, Kabupaten Lingga (Persen)

<i>Lapangan Pekerjaan</i>	2006			2011		
	<i>Laki-laki</i>	<i>Perempuan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Laki-laki</i>	<i>Perempuan</i>	<i>Jumlah</i>
Perikanan tangkap	74,7	4,4	58,1	73,8	5,3	51,7
Perikanan budidaya	1,4	0,0	1,0	1,3	0	0,8
Perkebunan rakyat	4,1	13,3	6,3	2,5	10,5	5,1
Perdagangan	2,7	15,6	5,8	8,8	10,5	9,3
Jasa kemasayarakatan	4,1	11,1	5,8	3,8	7,9	5,1
Industri pengolahan	6,8	51,1	17,3	3,8	60,5	22,0
Lainnya	6,2	4,4	5,8	6,3	5,3	5,9
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	146	45	191	80	38	118

Sumber: Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang, PPK-LIPI 2006. Survei BME Aspek Sosial-Ekonomi, PPK-LIPI, 2011.

Lapangan pekerjaan perdagangan di Desa Limbung memang masih lebih banyak dilakukan oleh laki-laki daripada perempuan. Jenis perdagangan yang diusahakan pada umumnya berupa warung yang menjual kebutuhan harian. Toko kelontong hanya dimiliki oleh penduduk Desa Limbung keturunan Cina. Sebagian kecil menjual BBM, baik untuk keperluan melaut maupun transportasi darat karena pemilikan kendaraan bermotor roda dua semakin bertambah. Perkembangan sektor perdagangan tersebut tampaknya juga menarik laki-laki untuk bekerja di sektor ini, diindikasikan dengan meningkatnya proporsi ART responden laki-laki yang meningkat dari 2,7 persen (tahun 2006) menjadi 8,8 persen pada tahun 2011. Sebaliknya, proporsi ART perempuan yang bekerja di sektor ini cenderung menurun. Walau proporsinya menurun berdasar hasil survei, namun dari wawancara mendalam dan diskusi kelompok

dengan beberapa perempuan diperoleh keterangan bahwa jumlah pemilik warung yang dikelola perempuan memang cenderung tetap, tetapi barang dagangan yang dijual semakin banyak. Hal ini karena mereka mendapat tambahan modal dari pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Bantuan program ini berupa dana bergulir dengan sistem tanggung renteng yang diperuntukkan bagi perempuan, dinamai Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Besar pinjaman berkisar antara Rp 500 ribu hingga Rp 5 juta rupiah per orang per sekali pinjaman dan bisa dikembalikan dengan cara kredit selama 10 bulan.

Lapangan pekerjaan lain yang memperlihatkan perkembangan cukup baik adalah sektor industri pengolahan. Data pada tabel 2.2 memperlihatkan bahwa ada peningkatan anggota rumah tangga responden yang bekerja di sektor industri pengolahan. Pada tahun 2006, penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan sebesar 17,3 persen, dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 4,7 persen menjadi sebesar 22 persen. Di sektor ini, ART responden terkonsentrasi pada industri rumah tangga yang bergerak pada bidang usaha pengolahan ketam. Kegiatan industri pengolahan ketam (orang setempat menyebutnya PT Ketam) telah lama ada di Desa Limbung dan mengalami pasang-surut kegiatan. Jika pada tahun 2006, hanya ada sebanyak satu industri rumah tangga, pada tahun 2008 berkembang menjadi tiga industri rumah tangga, dan turun hanya satu industri pada tahun 2010. Pada tahun 2011, jumlah industri rumah tangga dengan usaha pengolahan kepiting/ketam ini bertambah lagi menjadi dua industri rumah tangga. Kedua industri tersebut ada di dusun Centeng, bahkan letaknya bersebelahan satu sama lain, serta keduanya juga memiliki “cabang” di dusun Senempek. Cabang ini menyeter ketam yang sudah direbus dan dibersihkan ke PT Ketam di dusun Centeng untuk diproses menjadi daging ketam. Keberadaan PT Ketam dan cabangnya tersebut dapat menyerap sejumlah tenaga kerja,

khususnya perempuan. Misalnya di salah satu PT Ketam yang baru memulai usaha pada tahun 2010 mempekerjakan antara 13-15 orang, dan 7 orang di cabangnya. Jumlah pekerja yang kurang lebih sama juga terserap di PT Ketam yang satunya sehingga jumlah keseluruhan pekerja di sektor ini kurang lebih 35 orang, lebih banyak dari jumlah pekerja tahun 2006 (20 orang), tetapi lebih sedikit jumlah pekerja pada tahun 2008 (40 orang), turun lagi hanya sekitar 15 orang pada tahun 2010 (Romdiati dkk, 2008; Romdiati dan E. Djohan 2008a; Romdiati dan E. Djohan 2010). Kegiatan di industri pengolahan ketam tidak pernah berhenti, walau pada musim angin kuat. Hal ini karena industri rumah tangga tersebut selalu mendapat pasokan ketam, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Desa Limbung. Apabila pasokan ketam dari Desa Limbung mulai berkurang, ada pasokan dari desa tetangga. Ketika datang musim ketam di Desa Limbung yang terjadi antara bulan Maret-Agustus, pasokan ketam yang masuk ke tempat pengolahan bisa mencapai ratusan kilogram. Pada musim ini, pekerja industri sudah harus mulai melakukan aktifitasnya pada pukul 08.30 WIB dan berhenti pada pukul 17.00 WIB bahkan tak jarang mereka bekerja lembur. Sebaliknya, pada musim ombak kuat di Desa Limbung, pekerjaan pengolahan ketam hanya dilakukan dalam beberapa jam per harinya, karena pasokan ketam dari nelayan di desa lain tidak sebanyak dari Desa Limbung.

Data pada Tabel 2.2 menunjukkan, lapangan pekerjaan industri pengolahan didominasi oleh tenaga kerja perempuan, yaitu sebesar 60,5 persen pada tahun 2011. Angka ini mencapai kurang lebih dua puluh kali lipat lebih besar daripada proporsi laki-laki yang hanya 3,5 persen. Meskipun demikian, peningkatan persentase perempuan yang bekerja di sektor ini pada periode 2006-2010 tergolong kecil, mungkin karena jumlah industri rumah tangga pengolahan ketam juga hanya berbeda satu industri (satu industri pada tahun 2006 dan dua industri pada tahun 2011). Berkaitan dengan dominasi tenaga kerja perempuan

pada lapangan pekerjaan ini mungkin karena pekerjaan di bidang ini merupakan pekerjaan domestik dan membutuhkan ketelatenan yang umumnya dimiliki oleh perempuan, seperti membuang cangkang ketam kemudian mencungkil daging dan memilah-milah daging sesuai dengan ketentuan dari tempat kerja.

Gambar 2.1
Kegiatan Pengolahan Ketam Di Salah Satu Pabrik Ketam
Di Desa Limbung.



Tren lapangan pekerjaan jasa, perikanan budidaya, dan lainnya cenderung tidak menunjukkan perubahan. Bahkan, untuk lapangan pekerjaan budidaya yang hanya dilakukan oleh sangat sedikit ART responden jumlah dan proporsinya semakin menurun. Padahal di wilayah pantai ada beberapa keramba, antara lain KJT bantuan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (COREMAP) II. Namun, nampaknya usaha/pekerjaan budidaya ikan dengan KJT dari COREMAP tersebut diposisikan sebagai pekerjaan tambahan. Dalam diskusi kelompok dengan para ketua pokmas KJT juga

dikemukakan bahwa pekerjaan utama mereka adalah mencari ketam dan ikan di laut, sedangkan KJT merupakan pekerjaan sampingan. Dengan demikian, ART responden yang mempunyai pekerjaan utama pada lapangan pekerjaan budidaya kemungkinan besar adalah nelayan yang memiliki keramba sendiri dan dijadikan sebagai sumber mata pencaharian utama, sedangkan pekerjaan melaut sebagai pekerjaan sampingan. Meskipun demikian, dua sektor pekerjaan ini pada dasarnya dilakukan secara bersamaan dan keduanya merupakan bidang pekerjaan kenelayanan. Diperkirakan, dalam memposisikan pekerjaan utama dan sampingan lebih mempertimbangkan besar pendapatan yang diterima daripada alokasi waktu untuk melakukan pekerjaan tersebut.

2.2. Pendapatan Rumah Tangga: Pekerjaan Kenelayanan Sebagai Sumber Utama

Pendapatan rumah tangga yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah semua pendapatan yang diperoleh rumah tangga yang berasal dari beberapa sumber: (1) penghasilan yang diperoleh anggota rumah tangga yang bekerja (seperti gaji/upah, keuntungan usaha), (2) penghasilan dari kiriman/pemberian, dan (3) uang pensiun. Sedangkan pendapatan dari kegiatan kenelayanan adalah semua pendapatan yang diperoleh oleh kepala dan anggota rumah tangga yang bekerja pada lapangan pekerjaan perikanan tangkap.

Bahasan pendapatan rumah tangga meliputi semua statistik pendapatan (pendapatan rata-rata rumah tangga per bulan, pendapatan per kapita, median, maksimum dan minimum, serta distribusi rumah tangga menurut besar pendapatan per bulan). Selain itu, informasi kualitatif juga dipergunakan untuk menjelaskan data statistik pendapatan, terutama berkaitan dengan perubahan pendapatan dalam kurun waktu tertentu, dalam penelitian ini selama lima tahun terakhir (2006-2011). Pembahasan perubahan pendapatan juga melihat

berbagai aspek-aspek yang berkaitan dengan implementasi program nasional "Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang", khususnya dari aspek sosial ekonomi yang telah dijalankan di Desa Limbung selama lebih dari lima tahun yang tentunya telah memberi dampak positif terhadap pendapatan rumah tangga peserta program.

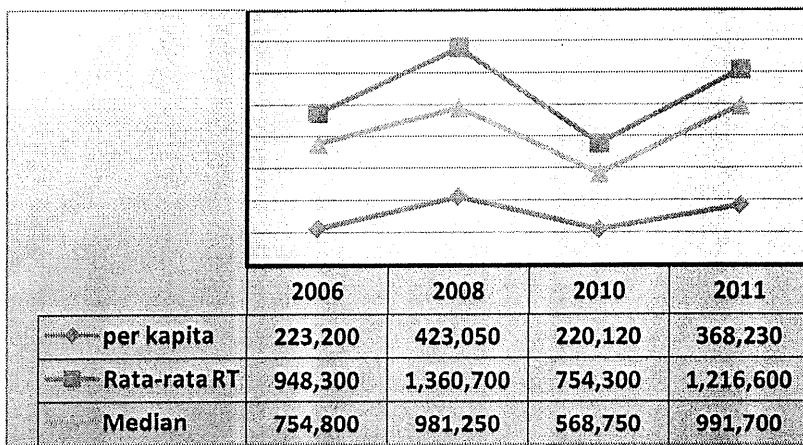
Pada tahun 2011, program nasional "Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang" (COREMAP) fase II di Desa Limbung sudah memasuki tahun akhir program. Upaya-upaya pemberdayaan ekonomi melalui sejumlah pokmas sudah dilakukan dan diharapkan telah dapat menambah pendapatan peserta program. Walau demikian, penting dicermati pula bahwa perubahan pendapatan yang terjadi juga karena pengaruh faktor-faktor lain, baik dari program pemerintah lain maupun faktor internal rumah tangga serta masyarakat. Pada bagian ini dibahas perubahan pendapatan masyarakat yang dilihat dari pendapatan rata-rata rumah tangga responden dan perkapita, mencakup pendapatan yang berasal dari semua sumber dan pendapatan yang berasal dari kegiatan kenelayanan.

2.2.1. Pendapatan Dari Semua Sumber

Selama lima tahun implementasi COREMAP II (2006-2011), tren pendapatan rumah tangga terlihat fluktuatif, tetapi secara umum perkembangan pendapatan rumah tangga responden semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan pendapatan rumah tangga selama kurun waktu tersebut sebesar 28,3 persen, yaitu dari 948,3 ribu rupiah pada tahun 2006 menjadi Rp 1216,6 ribu rupiah per bulan. Kenaikan pendapatan rata-rata rumah tangga tersebut menggambarkan adanya perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Limbung. Terlebih kenaikan pendapatan per kapita juga mencapai 65 persen, jauh melebihi angka kenaikan pendapatan rata-rata. Perubahan pendapatan per kapita yang sangat tajam selama periode 2006-2011 tersebut bisa dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan

atau menurunnya jumlah rata-rata anggota rumah tangga, karena pindah ke daerah lain untuk bekerja. Walau sebelumnya mereka sudah meninggalkan rumah, tetapi masih terdaftar sebagai anggota rumah tangga karena masih menjadi tanggungan orang tua/kepala rumah tangga. Selain pendapatan rata-rata dan perkapita yang meningkat, angka median juga naik, walau masih berada di bawah pendapatan rata-rata. Hal ini mengindikasikan masih terdapat lebih banyak rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah pendapatan rata-rata. Besar pendapatan minimum dan maksimum juga meningkat, seperti dapat dilihat pada lampiran Tabel 2.2.

Gambar 2.2
Statistik pendapatan rumah tangga per bulan, Desa Limbung,
Kabupaten Lingga, tahun 2006, 2008, 2010, dan 2011 (rupiah)



Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang, PPK-LIPI 2006
 - Survei BME Aspek Sosial-Ekonomi, PPK-LIPI 2008, 2010, dan 2011

Data tren pendapatan pada Gambar 2.1 memperlihatkan terjadi kenaikan pendapatan rumah tangga responden selama lima tahun pelaksanaan COREMAP II di Desa Limbung. Kenaikan pendapatan rata-rata sebesar 28,29 persen, hanya kurang dari separuhnya kenaikan pendapatan per kapita yang mencapai 64,98 persen. Dilihat menurut tahapan survei BME yang sebanyak 3 kali (tahun 2008, 2010, dan 2011) pada gambar 2.1 memperlihatkan ada penurunan pendapatan rumah tangga responden selama kurun waktu 2008-2010. Penurunan tersebut mencapai (-) 44,6 persen dan (-) 47,97 persen, berturut-turut untuk pendapatan rata-rata dan per kapita. Padahal sebelumnya telah terjadi peningkatan yang cukup besar, yakni mencapai 89,54 persen (pendapatan per kapita) dan 43,49 (pendapatan rata-rata). Penurunan pendapatan per kapita maupun rata-rata pada kurun waktu 2008-2010 disebabkan oleh berkurangnya hasil tangkapan, berkurangnya ART pada rumah tangga responden yang bekerja di sektor industri pengolahan ketam, dan capaian program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang belum terlihat nyata (antara lain COREMAP II) (Romdiati dan E. Djohan, 2010). Hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan yang cukup besar, padahal sebagian besar rumah tangga responden (83 dari 100 rumah tangga responden) menggantungkan sumber kehidupannya dari kegiatan kenelayanan. Penurunan hasil tangkapan terutama disebabkan oleh berkurangnya pemilikan/penguasaan alat-alat tangkap, pencemaran perairan di wilayah tangkap karena penggunaan parit gamat, dan menurunnya harga ketam karena adanya monopoli harga ketam. Monopoli harga ketam terjadi karena hanya ada satu pembeli, yaitu pengusaha industri rumah tangga di bidang pengolahan ketam, padahal pada tahun 2008 ada tiga usaha industri ketam. Berkurangnya usaha industri pengolahan ketam tersebut berdampak lanjutan pada menurunnya pendapatan rumah tangga responden, khususnya pada rumah tangga yang mempunyai ART yang bekerja di bidang usaha tersebut. Sementara itu, usaha ekonomi produktif COREMAP II melalui usaha budidaya ikan kerapu

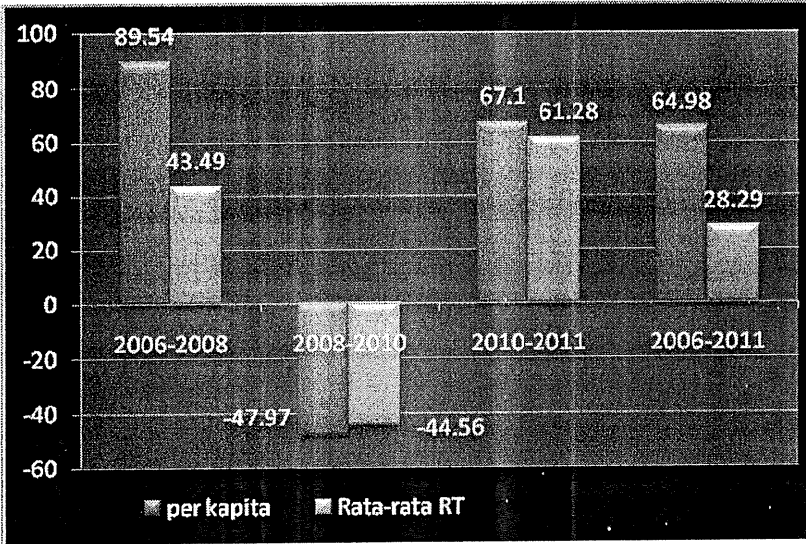
dengan keramba jaring tancap yang diusahakan oleh tujuh pokmas, lima diantaranya belum menghasilkan sehingga belum berkontribusi nyata terhadap pendapatan rumah tangga peserta program.

Hasil kegiatan UEP COREMAP II kemungkinan besar telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga responden pada tahun 2011. Hal ini digambarkan oleh hasil panen yang dialami oleh semua pokmas KJT pada akhir tahun 2010, walau ada satu pokmas yang mendapat hasil sangat sedikit. Berdasar catatan LPSTK Desa Limbung tahun 2011, hasil panen terendah dari usaha KJT adalah Rp 7.971.000 , padahal bantuan modal sebesar Rp 34 juta. Lima pokmas lainnya memperoleh hasil panen antara 10,7 juta rupiah s/d 26,5 juta rupiah, sedangkan pokmas yang menjalani usaha sejak akhir tahun 2009 telah berhasil panen sebanyak dua kali dengan kecenderungan hasil menurun. Namun, hasil panen tersebut telah dapat menambah penghasilan rumah tangga sehingga berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan rata-rata maupun per kapita. Selain dari kegiatan budidaya KJT, kenaikan pendapatan dalam satu tahun terakhir juga dipengaruhi oleh berkembangnya usaha industri kecil di bidang pengolahan ketam yang dapat menyerap tenaga kerja perempuan. Demikian pula usaha perdagangan yang berkembang, meskipun lambat, diperkirakan juga memengaruhi tren kenaikan pendapatan per kapita maupun rumah tangga.

Selama satu tahun terakhir (2010-2011) perkembangan pendapatan rumah tangga sangat signifikan dengan peningkatannya mencapai 61,28 persen dan 67,3 persen, masing-masing untuk pendapatan rata-rata dan per kapita. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi kesejahteraan ekonomi rumah tangga responden sudah kembali membaik, walau nilai rupiahnya masih lebih rendah dari angka pendapatan pada tahun 2008.

Gambar 2.3.

Tren Perubahan Pendapatan Per Kapita dan Rata-Rata Rumah Tangga Responden Periode 2006-2011, Desa Limbung, Kabupaten Lingga (Persen)



- Sumber:
- Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang, PPK-LIPI 2006
 - Survei BME Aspek Sosial-Ekonomi, PPK-LIPI 2008, 2010, dan 2011

Kenaikan pendapatan rumah tangga terutama dialami oleh mereka yang termasuk pada dua kelompok pendapatan terendah (<500 ribu dan 500 ribu-1 juta rupiah per bulan). Hal ini karena pada tahun 2010 sebagian besar rumah tangga responden termasuk pada dua kelompok pendapatan tersebut (80 persen). Angka ini turun menjadi 50,7 persen pada tahun 2011, sedikit lebih rendah daripada angka pada tahun 2010 (51,5 persen). Sebaliknya, proporsi rumah tangga yang memiliki pendapatan di atas satu juta rupiah per bulan mengalami

peningkatan, kecuali pada kelompok pendapatan antara 2-2,4 juta rupiah per bulan yang turun sedikit (dari 3,0 persen pada tahun 2010 menjadi 2,7 persen pada tahun 2011). Data ini menggambarkan adanya perbaikan kondisi ekonomi pada kelompok rumah tangga miskin, terutama dalam satu tahun terakhir ini.

Tabel 2.3.

Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan Rata-Rata Per Bulan, Desa Limbung, Kabupaten Lingga, Tahun 2006, 2008, 2010, Dan 2011 (Persen)

<i>Pendapatan (‘000 rp)</i>	<i>2006</i>	<i>2008</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
< 500	37,0	13,1	39,0	16,0
500 – 999	33,0	38,4	41,0	34,7
1.000 – 1.499	13,0	24,2	10,0	29,3
1.500 – 1.999	8,0	8,1	4,0	8,0
2.000 – 2.499	1,0	6,1	3,0	2,7
2.500 – 2.999	5,0	3,0	1,0	1,3
3.000 – 3.499	1,0	1,0	0,0	2,7
3.500 +	2,0	6,1	2,0	5,3
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0
(N)	100	99	100	75

Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang, PPK-LIPI 2006
 - Survei BME Aspek Sosial-Ekonomi, PPK-LIPI 2008, 2010, dan 2011

Perbaikan kondisi kesejahteraan ekonomi rumah tangga responden mungkin dipengaruhi oleh meningkatnya hasil tangkapan nelayan akibat membaiknya kapasitas alat tangkap yang dimiliki/dikuasai, upah industri, dan tambahan hasil panen keramba jaring tangkap anggota pokmas yang terambil sebagai sampel pada kajian BME ini. Selain itu, kemudahan pemasaran dan kondisi musim yang cukup kondusif terhadap kegiatan nelayan selama satu tahun

terakhir diperkirakan juga mempengaruhi kenaikan pendapatan rumah tangga responden. Pengaruh kegiatan kenelayanan dan faktor-faktor terkait lain (pemilikan/penguasaan alat tangkap, pemasaran, dan perubahan musim) akan dibahas di bagian tulisan tentang “perubahan pendapatan dari kegiatan kenelayanan”.

Meningkatnya hasil tangkapan nelayan berdampak lanjutan pada berkembangnya usaha industri pengolahan daging ketam. Jumlah usaha industri pengolahan di dusun Centeng pada tahun 2010 hanya satu, bertambah menjadi dua usaha pada tahun 2011, serta satu cabang di dusun Senempek. Dua usaha industri di dusun Centeng dapat menampung sekitar 30 orang yang bekerja dengan sistem borongan dan dilakukan setiap hari, kecuali pada musim angin kencang. Semetara itu, usaha industri daging ketam di dusun Senempek mempekerjakan 7 orang. Seorang pekerja dapat membawa upah antara 150-190 ribu per 10 hari, bergantung pada volume ketam yang dapat dikupas (*dikopek*). Walau upah tersebut tidak tergolong besar, tetapi diperkirakan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan rata-rata rumah tangga responden. Hal ini karena ada sekitar 22 persen dari 118 orang anggota rumah tangga responden yang bekerja di sektor ini. Dalam diskusi kelompok dengan enam orang perempuan, dua di antaranya pekerja di industri rumah tangga tersebut menggambarkan cukup pentingnya upah dari pekerjaan *kopek* ketam dalam menambah penghasilan rumah tangga, yaitu sebagai berikut.

“.....kerja di PT Ketam ya dapat menambah pendapatan. Otomatis bisa untuk jajan anak lah. Lumayanlah untuk penambahan, cuma kalau musim utara istilahnya disini kurang kepingnya. Ada pula pasokan dari desa tetangga, tetapi sedikit. Ya tak putuslah bu kerja di PT Ketam, hanya kalau musim

utara hasilnya sedikit". (Wawancara terbuka dengan seorang pekerja industri milik Jl).

Faktor lain yang memengaruhi peningkatan pendapatan rata-rata rumah tangga responden kemungkinan juga berasal dari sektor perdagangan, walaupun kontribusinya hanya sedikit karena skala perdagangan pada umumnya masih tergolong kecil, yaitu berupa kedai/warung yang menjual kebutuhan harian. Usaha toko dengan skala cukup besar hanya dilakukan oleh beberapa rumah tangga yang tidak termasuk dalam sampel penelitian ini. Usaha kedai nampaknya cukup berkembang antara lain karena pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri sejak tahun 2008. Selain untuk usaha dagang, pemanfaatan pinjaman dari program tersebut juga untuk menambah alat-alat tangkap, terutama bubu dan jaring, yang tentunya dapat berkontribusi terhadap tambahan penghasilan rumah tangga, terutama rumah tangga nelayan. Berikut petikan wawancara dengan seorang perempuan dusun Air Berani yang meminjam dari SPP-PNPM Mandiri untuk menambah modal usaha kedai/warung dan membeli alat-alat tangkap.

".....saya sudah dua kali pinjam dari PNPM Mandiri. Pertama lima juta untuk tambah modal jualan dan dipinjamkan lagi ke tetangga. Setelah lunas saya pinjam lagi 5 juta untuk modal jualan, beli jaring dan bubu. Saya juga coba buat keramba kecil-kecilan. Keramba ini untuk sambilan saja. Saya tengok COREMAP itu kasih karamba ke kelompok, kelihatannya gampang kerjanya nggak seberapa. Bisa dilakukan setelah angkat bubu dan jaring. Jadi untuk modalnya saya pinjam dari PNPM"

Dari informasi kualitatif tersebut tampaknya dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian masyarakat dapat mengambil

pembelajaran dari berkembangnya usaha KJT yang dilakukan oleh COREMAP dan sekaligus memanfaatkan bantuan dari program lain untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya. Kenyataan ini menggambarkan bahwa program-program pemerintah yang memiliki tujuan serupa (dalam konteks ini adalah upaya pemberdayaan ekonomi) dapat saling bersinergi sehingga memberi manfaat yang optimal kepada masyarakat.

2.2.2. Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan

Pendapatan dari kenelayanan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pendapatan yang diperoleh dari penjualan hasil tangkapan dan pekerjaan lain yang berkaitan dengan kegiatan perikanan tangkap (misalnya penampung ikan/ketam), tetapi tidak termasuk mereka yang menampung ketam yang kemudian diolah menjadi daging ketam. Jenis kegiatan yang disebutkan terakhir termasuk dalam kelompok pendapatan dari sektor industri pengolahan.

Berdasarkan data survei "Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang" tahun 2006 dan "BME Aspek Sosial Ekonomi" tahun 2008, 2010, dan 2011, di antara 75 rumah tangga responden terdapat 57 (76 persen) rumah tangga yang memiliki pendapatan dari kegiatan kenelayanan. Rumah tangga tersebut paling sedikit mempunyai satu orang ART yang bekerja sebagai nelayan, sehingga bisa disebut dengan rumah tangga nelayan. Proporsi rumah tangga nelayan pada tahun 2011 sama dengan tahun 2008, tetapi lebih rendah dibanding angka pada tahun 2010 (83 persen) dan 2006 (79 persen). Perbedaan ini disebabkan adanya pengurangan jumlah sampel dan pergantian beberapa sampel rumah tangga karena alasan sedang tidak ada di rumah ketika survei berlangsung.

Pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan cenderung lebih rendah dibanding dengan pendapatan rumah tangga pada umumnya

(lihat gambar 2.2 dan 2.3). Hal ini menggambarkan bahwa rumah tangga nelayan lebih miskin daripada rumah tangga bukan nelayan. Kondisi kemiskinan rumah tangga nelayan antara lain juga dapat digambarkan dari data pendapatan rata-rata rumah tangga menurut lapangan pekerjaan kepala rumah tangga (KRT) pada lampiran tabel 3. Berdasar hasil kajian BME, pada tahun 2011, pendapatan rata-rata rumah tangga dengan KRT bekerja di subsektor perikanan tangkap (nelayan) lebih rendah (Rp 1.227.900 per bulan) daripada mereka yang bekerja di sektor perdagangan (Rp 1.500.000 per bulan) dan perkebunan/kebun karet rakyat (Rp 1.446.400 per bulan). Walau penghasilan dari kegiatan kenelayanan termasuk rendah, tetapi menjadi sumber pendapatan andalan bagi sebagian besar rumah tangga di Desa Limbung.

Tabel 2.4
Statistik Pendapatan Rumah Tangga Per Bulan dari Kegiatan
Kenelayanan, Desa Limbung, Kabupaten Lingga, Tahun 2006, 2008,
2010, Dan 2011 (Rupiah)

<i>Pendapatan</i>	<i>Jumlah (Rp.)</i>			
	<i>2006</i>	<i>2008</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Rata-rata rumah tangga	743.000	967.200	596.650	823.400
Median	466.700	848.700	528.750	687.500
Minimum	33.300	75.000	125.000	137.500
Maksimum	5.800.000	3.553.700	3.520.850	4.250.000

Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang, PPK-LIPI 2006
 - Survei BME Aspek Sosial-Ekonomi, PPK-LIPI 2008, 2010, dan 2011

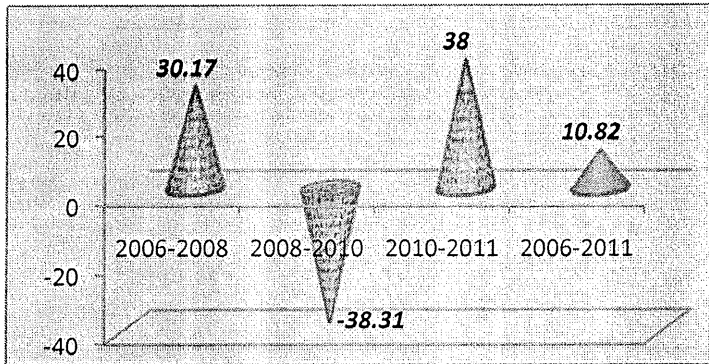
Data pada Tabel 2.4 menunjukkan, pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan pada tahun 2011 adalah Rp 823.400 per bulan, lebih tinggi dari angka tahun 2010 (Rp 596.650 per bulan). Demikian pula angka median, minimum, maksimum meningkat dalam satu tahun

terakhir. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi ekonomi rumah tangga nelayan kembali membaik, setelah mereka mengalami penurunan pendapatan pada kurun waktu 2008-2010. Kenaikan pendapatan masyarakat dalam satu tahun terakhir juga digambarkan dari kenaikan angka median, maksimum dan minimum. Meskipun demikian, kesenjangan antara rumah tangga berpendapatan tinggi dengan yang berpendapatan rendah cenderung semakin melebar. Hal ini ditunjukkan oleh perbedaan antara angka median dan pendapatan rata-rata yang lebih besar pada tahun 2011 dibanding tahun 2010.

Dilihat persentase perubahannya, selama lima tahun implementasi COREMAP II di Desa Limbung (2006-2011) terjadi peningkatan pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan sebesar 10,82 persen (Gambar 2.4). Angka ini kurang dari separuhnya kenaikan pendapatan rata-rata rumah tangga pada umumnya (semua rumah tangga sampel) yang mencapai 28,29 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan pendapatan masyarakat Desa Limbung lebih disebabkan oleh sumber lain di luar kegiatan kenelayanan, misalnya penghasilan/honor sebagai guru, honor perangkat desa, usaha dagang, dan ojek. Berdasar informasi dari seorang narasumber yang juga tokoh masyarakat diketahui bahwa sejumlah rumah tangga nelayan tidak semata-mata hanya bergantung pada sumber penghasilan dari kegiatan melaut, tetapi mereka juga memiliki sumber penghasilan dari kedai, atau ojek yang pada tahun ini semakin berkembang. Sebagian lainnya juga mendapat sumber penghasilan dari isteri nelayan yang bekerja sebagai buruh di industri rumah tangga di bidang pengolahan daging ketam. Pendapatan yang berasal dari luar kegiatan kenelayanan tersebut bisa jadi lebih besar dibanding dengan hasil dari melaut, terlebih jika rumah tangga tersebut hanya menggunakan sampan dengan alat-alat tangkap yang sangat terbatas.

Gambar 2.4

Tren Perubahan Pendapatan Rata-Rata Rumah Tangga Nelayan Periode 2006-2011, Desa Limbung, Kabupaten Lingga (Persen)



Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang, PPK-LIPI 2006
- Survei BME Aspek Sosial-Ekonomi, PPK-LIPI 2008, 2010, dan 2011

Keterbatasan kapasitas penangkapan nelayan di Desa Limbung yang dapat berakibat pada rendahnya pendapatan mereka juga terlihat dari data distribusi rumah tangga berdasar kelompok pendapatan yang masih terkonsentrasi pada dua kelompok terendah. Pada tahun 2011, ada sebanyak 88,0 persen rumah tangga yang mempunyai pendapatan dari kegiatan kenelayanan hanya kurang dari 1 juta rupiah per bulan. Walau angkanya sedikit lebih rendah dibanding tahun 2010 (92,8 persen), tetapi secara umum menggambarkan bahwa pendapatan dari kegiatan kenelayanan sangat kecil. Bahkan dalam lima tahun terakhir (2006-2011) terjadi kecenderungan menurun. Hal ini digambarkan oleh data survei data dasar maupun kajian BME pada tabel 2.5 yang memperlihatkan bahwa persentase rumah tangga pada kelompok pendapatan kurang dari satu juta rupiah per bulan semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang semakin kurang mendukung untuk kegiatan melaut yang telah dialami sejak tahun 2010. Penggunaan parit gamat dan

trawl mini yang menyebabkan kekeruhan pada air laut berakibat pada menurunnya hasil tangkapan ketam maupun ikan bilis karena dua jenis sumber daya laut tersebut biasanya menghindari dari air yang keruh sehingga hasil tangkapan nelayan menjadi berkurang (Romdiati dan E Djohan, 2010).

Tabel 2.5
Distribusi Persentase Rumah Tangga Nelayan Menurut Kelompok Pendapatan Per Bulan, Desa Limbung, Kabupaten Lingga, Tahun 2006, 2008, 2010, dan 2011 (Persen)

<i>Pendapatan(000)</i>	2006	2008	2010	2011
Kurang dari 500	54,4	23,7	45,8	40,0
500 – 999	22,8	36,8	47,0	48,0
1.000 – 1.499	12,7	25,0	3,6	6,7
1.500 – 1.999	5,1	7,9	0,0	1,3
2.000 – 2.499	1,3	1,3	1,2	1,3
2.500 – 2.999	0,0	2,6	1,2	0,0
3.000 – 3.499	1,3	1,3	0,0	0,0
3.500 ke atas	2,5	1,3	1,2	2,7
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100
(N)	79	76	83	57

Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang, PPK-LIPI 2006.
 - Survei BME Aspek Sosial-Ekonomi, PPK-LIPI 2008 dan 2010.

Hasil tangkapan nelayan pada tahun 2011 cenderung masih tetap, tetapi pendapatan mereka mengalami sedikit peningkatan. Hal ini disebabkan harga ketam mengalami kenaikan dalam satu tahun terakhir. Selisih harga ketam berkisar antara 1.000 – 3.000 rupiah per kg, bergantung pada ukurannya³. Disamping harga yang meningkat, akses pemasaran ketam juga semakin luas, diindikasikan oleh bertambahnya satu 'PT' (usaha industri rumah tangga) ketam di Desa Limbung sehingga nelayan mempunyai pilihan tempat pemasaran yang lebih menguntungkan, bukan hanya terkait dengan perbedaan harga, tetapi juga ukuran ketam. Kerugian pada nelayan kadang terjadi

³ Pada tahun 2010 harga ketam ukuran A, B, dan C masing-masing adalah 20 ribu, 15 ribu, dan 7 ribu rupiah per kg. Harga tersebut meningkat menjadi 22 ribu, 17 ribu, dan 12 ribu rupiah per kg, berturut-turut untuk tipe A, B, dan C.

dalam penentuan ukuran ketam. Misalnya, ketam berukuran A dihitung sebagai ukuran B oleh penampung yang juga pengelola industri ketam. Untuk persoalan ini, nelayan tidak memiliki posisi tawar jika tidak ada pilihan tempat pemasaran lain. Oleh karena itu, akses pemasaran ketam yang semakin luas tersebut berkontribusi terhadap harga ketam yang lebih kompetitif sehingga berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan rata-rata dari kegiatan kenelayanan dalam satu tahun terakhir.

Faktor lain yang berpengaruh pada kenaikan pendapatan dari kegiatan kenelayanan adalah bertambahnya alat-alat tangkap, terutama bubu dan jaring ketam. Jika hasil penelitian BME tahun 2010 menemukan bahwa pemilikan alat-alat tangkap cenderung sama dengan dua tahun sebelumnya (Romdiati dan E. Djohan, 2010), dalam satu tahun terakhir nelayan dapat menambah bubu dan jaring ketam, karena ada bantuan pinjaman uang dari program pemerintah maupun penampung/pengusaha 'PT' ketam. Sebagian nelayan mendapat bantuan pinjaman dari penampung/pengusaha 'PT' ketam untuk membeli alat tangkap yang dapat dibayarkan dengan cara kredit. Pembayaran biasanya dilakukan pada saat mereka menjual ketam, tetapi tidak ditentukan besarnya. Sementara itu, sebagian lainnya dapat membeli alat-alat tangkap karena pelaksanaan PNPM Mandiri yang antara lain memberikan pinjaman kepada perempuan melalui kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP). Sebagian pinjaman tersebut dimanfaatkan untuk membeli alat-alat tangkap, sebagaimana dikemukakan oleh seorang informan berikut ini.

".....kalau saya ikut kelompok bu Suri. Saya pinjam dua juta (rupiah) untuk beli bubu. Sekarang sudah lunas dan sekarang sedang menunggu pinjaman yang ke dua. Rencananya untuk beli pompong kalau dapat lima juta (Jrh, isteri seorang nelayan di dusun Centeng)

Tambahan pemilikan alat-alat tangkap tersebut kemungkinan memengaruhi peningkatan pendapatan dari kegiatan kenelayanan di lokasi binaan COREMAP Desa Limbung. Semakin banyak bubu yang dipasang, semakin banyak pula hasil tangkapan yang kemungkinan dapat diperoleh. Demikian pula semakin panjang jaring ketam, hasil ketam juga semakin banyak.

Pendapatan nelayan berbeda-beda menurut musim. Pendapatan dari kegiatan kenelayanan yang terbesar diperoleh pada musim ombak lemah dan ini terjadi di setiap waktu survei. Kondisi cuaca pada musim ini sangat mendukung untuk melaut dengan menggunakan semua peralatan yang dimiliki sehingga hasil tangkapan juga maksimal. Dari wawancara terbuka maupun diskusi kelompok dengan sejumlah nelayan diperoleh informasi bahwa dalam kondisi laut tenang, kegiatan kenelayanan dapat dilakukan pada pagi dan sore hari dan bagi yang mempunyai pompong bisa melakukannya hingga ke wilayah tangkap yang cukup jauh. Hasil tangkapan banyak memberikan arti pendapatan juga tergolong besar, terlebih harga ketam, yang merupakan hasil tangkapan utama nelayan di Desa Limbung, cenderung tidak berbeda berdasar musim. Hal ini karena ketam merupakan bahan baku pembuatan industri pengolahan daging ketam sehingga merupakan hasil tangkapan yang kompetitif.

Maksimalisasi kegiatan melaut tidak lagi dapat dilakukan pada musim pancaroba, terlebih musim ombak kuat. Kondisi angin dan cuaca yang kurang, atau bahkan tidak bersahabat untuk melaut menyebabkan penghasilan nelayan pada dua musim ini lebih rendah dibanding musim ombak lemah. Dengan kapasitas penangkapan yang masih rendah, yaitu kebanyakan hanya menggunakan sampan dan alat tangkap sederhana (bubu dan jaring), nelayan hanya dapat memperoleh hasil tangkapan sedikit, bahkan tidak mendapat apa-apa ketika mengangkat bubu dan/atau jaring. Pada musim ombak kuat,

hasil tangkapan jauh lebih rendah daripada musim angin lemah dan pancaroba, bahkan sebagian nelayan tidak bisa melaut.

Dilihat perubahannya, Tabel 2.6 menunjukkan bahwa tren pendapatan rata-rata berfluktuatif selama kurun waktu 2006-2011. Pendapatan rata-rata rumah tangga pada musim ombak lemah maupun pancaroba cenderung meningkat dengan distorsi pada tahun 2010 yang turun cukup tajam. Sementara itu, pada musim ombak kuat, perubahan pendapatan yang menurun bukan hanya terjadi pada tahun 2010, tetapi juga pada tahun 2011. Hal ini antara lain disebabkan terjadinya sedikit pergeseran musim dalam setahun terakhir, yaitu lama musim utara yang sedikit lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan pendapatan dari kegiatan kenelayan semakin berkurang, karena kebanyakan nelayan tidak bisa melaut. Bagi mereka yang bisa melaut, hasil tangkapan hanya sedikit sehingga musim ombak kuat merupakan musim paceklik bagi nelayan. Oleh karena itu, kesenjangan pendapatan di antara rumah tangga yang mendapat penghasilan dari kegiatan kenelayan juga lebih kecil dibanding dengan kesenjangan pada musim pancaroba dan ombak lemah. Hal ini digambarkan dari perbedaan besar pendapatan rata-rata dengan median pada musim ombak kuat yang menunjukkan angka paling kecil dibanding musim pancaroba dan ombak lemah, terutama pada tahun 2011.

Tabel 2.6.
Statistik Pendapatan Rumah Tangga Dari Kegiatan Kelayakan Menurut Musim, Desa Limbung, Kabupaten Lingga,
Tahun 2006, 2008, 2010, Dan 2011 ('000 Rp)

Pendapatan	<i>Adasim</i>											
	<i>Pencaroka</i>					<i>Ombak Kiat</i>						
	2006	2008	2010	2011	2006	2008	2010	2011	2006	2008	2010	2011
Rata-rata	1.235	1.802	1.019	1.211	839	879	501	618	561	648	417	352
Median	750	1.500	805	900	500	650	375	500	310	500	300	300
Min	50	300	300	120	45	150	50	0	25	100	45	60
Maks	7.200	6.750	6.000	7.000	9.900	3.900	3.000	3.000	5.100	3.000	3.000	800
N	79	75	81	57	68	69	77	55	38	42	50	41

Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang, PPK-LIPI 2006

- Survei BME Aspek Sosial-Ekonomi, PPK-LIPI 2008, 2010, dan 2011

2.3. Perubahan Pendapatan Dalam Konteks Indikator Keberhasilan COREMAP

Selama lima tahun implementasi COREMAP II di Desa Limbung, pendapatan masyarakat menunjukkan tren meningkat, walaupun pernah turun tajam pada periode waktu 2008-2010. Perubahan pendapatan yang meningkat tersebut dapat mencapai target capaian program dari aspek ekonomi yang ditetapkan oleh ADB sebagai penyandang dana COREMAP II di wilayah Indonesia bagian barat. Berdasarkan *Project Appraisal Document ADB* (2005), ada dua indikator pokok untuk melihat keberhasilan program COREMAP dari aspek sosial ekonomi yaitu:

1. Pendapatan per kapita masyarakat di lokasi COREMAP meningkat sebesar 2 persen per tahun
2. Pada akhir program terdapat peningkatan taraf hidup sekitar 10.000 rumah tangga di lokasi COREMAP.

Dua indikator tersebut menggambarkan capaian keberhasilan ekonomi COREMAP secara kuantitatif, sedangkan capaian sosial tidak/belum ditentukan untuk melihat keberhasilan program. Padahal capaian sosial juga penting karena capaian ekonomi tersebut sangat berkaitan erat dengan adanya capaian sosial yang antara lain dapat diukur dari pengetahuan dan kesadaran/kepedulian masyarakat akan pentingnya pengelolaan dan pelestarian terumbu karang yang berkelanjutan. Hal ini karena peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian terumbu karang secara otomatis dapat meningkatkan pendapatan nelayan.

Walau ada penurunan pendapatan pada periode waktu 2008-2010, tetapi kenaikan pendapatan rumah tangga yang mencapai 61,28 persen selama satu tahun terakhir berkontribusi besar dalam keberhasilan COREMAP II dari aspek ekonomi di Desa Limbung.

Berdasar hasil survei “Data Dasar” tahun 2006 dan hasil kajian BME tahun 2011 dapat dihitung pertumbuhan pendapatan rata-rata dan perkapita, yaitu dihitung dengan menggunakan rumus eksponensial yang menggunakan asumsi angka pertumbuhan konstan setiap tahun. Rumus perhitungan adalah sebagai berikut

$$P_n = (P_o)(e^{r^n}).$$

- P_n : pendapatan tahun akhir
- P_o : pendapatan tahun awal
- e : konstanta
- r : pertumbuhan pendapatan
- n : periode waktu

Selama kurun waktu 2006-2011 pendapatan per kapita tumbuh sebesar 4,35 persen per tahun. Angka ini mencapai dua kali lipat dari pertumbuhan pendapatan rata-rata rumah tangga responden (2,16 persen). Data ini menggambarkan bahwa capaian ekonomi COREMAP mencapai kira-kira dua kali lipat lebih besar dari angka yang ditetapkan oleh lembaga donor (ADB) yang sebesar 2 persen. Namun, tingginya angka pertumbuhan tersebut tidak bisa mengabaikan faktor di luar COREMAP II. Ada program pemerintah lain yang memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diimplementasikan sejak tahun 2008 telah memperluas peluang usaha bagi perempuan melalui program simpan pinjam perempuan (SPP), dan juga memberikan akses kepada nelayan untuk meningkatkan kapasitas penangkapan. Pinjaman dari program SPP bukan hanya dipakai untuk pengembangan usaha bagi perempuan, tetapi juga untuk membeli alat-alat tangkap sehingga hasil tangkapan bisa bertambah sehingga pendapatan rumah tangga juga meningkat.

Walau pertumbuhan pendapatan per kapita dan rata-rata rumah tangga responden tersebut bukan sepenuhnya karena kontribusi kegiatan-kegiatan COREMAP II, tetapi kegiatan MPA COREMAP II juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya anggota pokmas yang sudah memetik hasil usaha. Pada bulan Nopember 2011, enam Pokmas yang mengembangkan MPA dalam bentuk KJT pembesaran ikan kerapu sudah berhasil panen. Kebanyakan anggota pokmas mendapat hasil kurang lebih satu juta rupiah per sekali panen dengan masa pembesaran sekitar 8 bulan. Sebagian lainnya hanya memperoleh kurang dari 500 ribu rupiah per sekali panen. Sebagian besar anggota pokmas dengan jenis usaha KJT adalah nelayan, sehingga hasil kegiatan COREMAP ini diperkirakan sebagai penyumbang angka pertumbuhan pendapatan rumah tangga nelayan yang hanya 2,07 persen, sedikit di atas batas nilai keberhasilan yang ditetapkan oleh lembaga donor COREMAP II. Walau demikian, pengaruh dari hasil panen pokmas KJT dalam meningkatkan pendapatan selama satu tahun terakhir cukup besar. Hasil penelitian BME di Desa Limbung pada tahun 2010 memperlihatkan angka pertumbuhan negatif, yaitu (-) 0,15 persen, (-) 2,49 persen, dan (-) 2,38 persen per tahun selama periode 2006-2010, masing-masing untuk pendapatan per kapita, rata-rata rumah tangga, dan rata-rata rumah tangga nelayan. Pada tahun 2010, baru ada dua pokmas dengan jenis usaha KJT yang sudah memperoleh hasil panen sehingga kontribusi COREMAP terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga responden belum terlihat.

Selain UEP- KJT pembesaran ikan kerapu, jenis UEP lain dilakukan oleh Pokmas Jender sejak tahun 2008. Namun, kegiatan MPA Pokmas Jender hanya berjalan beberapa bulan karena bantuan modal usaha sangat kecil (Rp 500 ribu per kelompok) dan hingga kini tidak ada tambahan bantuan untuk kelompok lain. Bahkan, karena

tidak ada kegiatan lagi di antara anggota Pokmas, peralatan⁴ Pokmas Jender yang masih tersisa (sebagian di antaranya rusak/hilang) diambil alih oleh LPSTK dan pada saat ini disewakan kepada masyarakat untuk keperluan hajatan atau selamatan. Uang sewa dicatat sebagai kas LPSTK sehingga hasil usaha persewaan tidak menambah penghasilan pada anggota pokmas, yang berarti tidak berkontribusi pada angka pertumbuhan pendapatan (capaian ekonomi COREMAP).

Tabel 2.7
Pendapatan Per Kapita, Rata-Rata Rumah Tangga, Rata-Rata
Dari Kegiatan Kenelayanan, Desa Limbung,
Periode 2006-2010

<i>Statistik Pendapatan</i>	<i>Besar Pendapatan (Rp)</i>		<i>Pertumbuhan Pertahun (%)</i>
	<i>2006</i>	<i>2011</i>	
Perkapita	223.200	368.230	4,35
Rata-rata rumah tangga	948.300	1.216.600	2,16
Rata-Rata Kenelayanan	743.300	823.400	8,90

Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang, PPK-LIPI 2006.

- Survei BME Aspek Sosial-Ekonomi, PPK-LIPI 2011.

Satu temuan penting lainnya adalah angka pertumbuhan pendapatan rata-rata rumah tangga dari kegiatan kenelayanan yang mencapai 8,9 persen, kira-kira empat kali lipat lebih besar dari angka pertumbuhan pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan (2,16 persen). Temuan ini mengindikasikan bahwa capaian ekonomi COREMAP tergolong tinggi mengingat kebanyakan rumah tangga

⁴ Sejumlah peralatan sebagai sarana untuk mengembangkan usaha industri rumah tangga diberikan oleh pengelola COREMAP kabupaten Lingga kepada Pokmas Jender di setiap lokasi binaan COREMAP.

sampel adalah rumah tangga pokmas (56 persen dari 75 jumlah rumah tangga responden).

Indikasi lain dari capaian ekonomi COREMAP, tetapi bukan termasuk dalam indikator keberhasilan COREMAP adalah adanya keinginan pokmas untuk melanjutkan usaha KJT dan juga beberapa nelayan yang mengembangkan KJT atas prakarsa sendiri. Ada pula salah satu anggota pokmas yang keluar dari kelompok dan berusaha mengembangkan KJT sendiri. Kenyataan ini menggambarkan adanya alih pengetahuan pengelolaan UEP-KJT yang pada gilirannya dapat berkontribusi terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat, tentunya apabila usaha ini juga diikuti dengan anggota masyarakat yang lebih banyak jumlahnya.

3

USAHA EKONOMI PRODUKTIF DAN PENDAPATAN PENERIMA DANA BERGULIR

COREMAP II di Desa Limbung, Kabupaten Lingga telah melaksanakan berbagai program kegiatan dengan penekanan pada pengelolaan kegiatan berbasis masyarakat melalui pemberdayaan kelembagaan ekonomi lokal. Melalui komponen *Community Base Management* (CBM), kegiatan COREMAP antara lain ditujukan untuk meningkatkan peran serta (keterlibatan), inisiatif dan kerjasama masyarakat, khususnya nelayan dalam melindungi dan melestarikan terumbu karang yang selanjutnya berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan ini, COREMAP II telah membentuk kelembagaan di tingkat desa, yaitu LPSTK dan Pokmas yang ditujukan untuk pengelolaan usaha ekonomi produktif (UEP). Pokmas melaksanakan kegiatan UEP, sedangkan LPSTK memfasilitasi pelaksanaannya. Pengembangan UEP ini diharapkan dapat berdampak pada berkurangnya tekanan terhadap terumbu karang. Kegiatan ini dilakukan melalui bantuan dana bergulir untuk pengembangan usaha ekonomi produktif sebagai kompensasi untuk tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak ekosistem terumbu karang. Kegiatan UEP ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga perbaikan kondisi kesejahteraan dapat terwujud.

Kegiatan UEP melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, yaitu dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas) untuk mengelola dana bergulir tersebut. Pemanfaatan dana bergulir

disesuaikan dengan potensi daerah setempat yang juga harus memperhatikan upaya pelestarian terumbu karang. Kegiatan UEP bisa merupakan suatu kegiatan usaha baru atau lama yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan sumber daya setempat, seperti budidaya, industri pengolahan, dagang, dan ekonomi lainnya yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Kegiatan UEP bukan menggantikan usaha/pekerjaan yang sudah dilakukan, tetapi merupakan usaha sampingan dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Di Desa Limbung, sesuai dengan potensi ekonomi dan arahan dari pengelola COREMAP II Kabupaten Lingga, dana bergulir pengembangan UEP dimanfaatkan untuk usaha budidaya pembesaran ikan kerapu dengan keramba jaring tancap (KJT). Kegiatan UEP ini diharapkan dapat menambah pendapatan yang bukan hanya berdampak terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi tekanan terhadap terumbu karang karena pengembangan UEP yang ramah lingkungan tersebut dapat mengalihkan sebagian nelayan untuk mengurangi kegiatan melaut yang mungkin dilakukan di kawasan terumbu karang. Jenis UEP lain dilakukan oleh Pokmas Jender, tetapi pada tahun 2011 kegiatan pokmas tersebut sudah tidak berjalan karena alasan modal usaha yang terlalu kecil, sementara anggota cukup banyak.

Pada bagian ini dibahas perkembangan mata pencaharian alternatif dan dampaknya terhadap pendapatan masyarakat. Bahasan tentang pelaksanaan UEP meliputi kelompok penerima dan jenis pemanfaatannya, serta jenis dan perkembangan usaha. Sementara itu, analisis tentang kontribusi hasil kegiatan UEP terhadap pendapatan masyarakat ditekankan pada rumah tangga penerima dana bergulir

yang dilihat perkembangannya selama periode satu tahun terakhir (2009-2011).

3.1. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif

Pelaksanaan kegiatan UEP di Desa Limbung dilakukan oleh pokmas-pokmas. Keanggotaan pokmas pada umumnya dipilih sendiri oleh masyarakat yang pada umumnya berdasar pada kedekatan tempat tinggal dan/atau keluarga. Tidak semua pokmas yang terbentuk mendapat bantuan dana bergulir, karena bantuan dana dari PIU melalui komponen CBM Kabupaten Lingga diberikan secara bertahap. Misalnya, bantuan dana dan peralatan untuk pengembangan UEP bagi Pokmas Jender yang diberikan pada tahun 2007 hanya dapat dipakai oleh satu kelompok dan setelah dua tahun kemudian (2009), ada pengaliran dana dari Pokmas Jender di dusun Air Berani ke Pokmas Jender di dusun Seranggas. Hingga saat ini (tahun 2011) Pokmas Jender tidak lagi menerima tambahan bantuan uang untuk modal usaha UEP. Bahkan, pada saat kajian ini berlangsung, Pokmas Jender sudah tidak menjalankan kegiatan UEP. Peralatan yang pernah diterima dikelola oleh LPSTK, yaitu dengan menyewakan pada anggota masyarakat yang membutuhkan.

Seperti halnya dengan Pokmas Jender, pada awal pelaksanaan UEP yang berupa KJT untuk pembesaran ikan kerapu pada tahun 2009 juga hanya diterimakan pada dua pokmas. Jumlah Pokmas KJT yang menerima dana bertambah enam pokmas pada tahun 2010, dan pada awal tahun 2011 bertambah dua usaha KJT, meliputi satu KJT di dusun Centeng dan satu lagi di dusun Senempek. Menurut informasi dari LPSTK Desa Limbung, pada tahun 2011 akan ada tambahan bantuan KJT dari PIU kabupaten paling tidak satu buah. Jika tambahan KJT tersebut terlaksana, LPSTK akan menyalurkannya ke

pokmas yang sudah mengajukan usulan kegiatan usaha (proposal) tetapi belum menerima bantuan modal untuk pengembangan UEP.

3.1.1. Kelompok penerima dana bergulir dan jenis pemanfaatan

Hingga pertengahan tahun 2011, di Desa Limbung ada 10 pokmas yang mendapat dana bergulir, meliputi dua Pokmas Jender, satu pokmaswas, dan tujuh Pokmas Produksi. Dari 10 pokmas tersebut, satu di antaranya berada di dusun Senempek. Kelompok-kelompok penerima ini dipilih oleh LPSTK berdasar pada proposal yang diajukan ke PIU kabupaten melalui LPSTK. Secara keseluruhan, proposal yang diajukan oleh pokmas-pokmas mencakup tiga jenis kegiatan, yaitu budidaya ikan kerapu, kepiting bakau, dan rumput laut. Namun, hanya pokmas yang mengajukan usulan pengembangan UEP dengan jenis budidaya ikan kerapu yang mendapat persetujuan dari PIU Kabupaten Lingga, karena jenis usaha ini yang dinilai paling cocok dengan kondisi lingkungan dan latar belakang pekerjaan masyarakat di desa-desa binaan COREMAP II di Kabupaten Lingga, termasuk Desa Limbung.

Walau pada awal pengembangan KJT dengan jenis ikan kerapu macan, hanya dua pokmas di Desa Limbung yang memperoleh dana bergulir, satu tahun kemudian bertambah menjadi enam pokmas yang pemilihannya dilakukan oleh LPSTK. Pemilihan penerima dana bergulir pada tahun 2010 didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu (1) kesiapan anggota pokmas untuk menjalani usaha secara berkelompok, (2) keterlibatan pokmas dalam menjaga lingkungan laut agar tidak tercemar, dan (3) keberadaan pokmas di luar dusun satu (Centeng) yang selama ini menjadi fokus utama kegiatan COREMAP II di Desa Limbung, terutama pokmas yang sudah mengajukan proposal. Upaya melibatkan pokmas di dusun lain adalah untuk menghindari kecemburuan sosial akibat terkonsentrasinya kegiatan COREMAP II

di satu dusun. Pada tahun 2011, ada satu pokmas di luar dusun Centeng yang mendapat dana bergulir. Menurut rencana, apabila ada tambahan bantuan dari PIU COREMAP Kabupaten Lingga, LPSTK akan menyalurkan dana bergulir kepada pokmas di dusun Senempek yang juga melibatkan anggota dari dusun Sungai Nona dan Air Kelat. Rencana lainnya adalah juga akan melibatkan beberapa perempuan dalam pengembangan UEP-KJT untuk menggantikan pokmas yang gagal menjalani usaha pada tahun 2010. Hal ini berdasar pertimbangan adanya kesiapan yang cukup baik dari beberapa perempuan untuk menjalani usaha KJT, terutama mereka yang sudah sering bekerja melaut, baik sendiri maupun membantu suami. Upaya melibatkan perempuan dalam pengembangan UEP-KJT bukan merupakan kelompok tersendiri, tetapi perempuan sebagai anggota pokmas, bukan pengurus pokmas.

Selama ini perempuan yang terlibat dalam kegiatan UEP adalah Pokmas Jender, itupun hanya dua pokmas yang pernah menerima dana bergulir. Pemilihan penerima dana bergulir berdasar pada keikutsertaan dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh komponen CBM kabupaten. Namun karena peserta pelatihan hanya tiga orang, maka mereka memilih sendiri beberapa orang lainnya untuk menjadi anggota Pokmas. Mereka ini yang pertama kali mendapatkan dana bergulir pada tahun 2007. Pemanfaatan dana bergulir adalah untuk industri rumah tangga (membuat makanan ringan) dengan modal yang sangat kecil dan dilakukan secara individu. Tidak pernah ada kerja kelompok dalam Pokmas Jender. Usaha ini kira-kira berjalan dalam waktu dua tahun dan sudah bisa menggulirkan dana ke satu kelompok lainnya di dusun Seranggan. Namun, pada tahun 2011 kegiatan UEP Pokmas Jender sudah berhenti, walau pada tahun 2010 Pokmas Jender di dusun Air Berani dapat mengumpulkan uang kas sebesar 650 ribu rupiah yang berasal dari bunga pinjaman dan iuran anggota pokmas sukarela (Romdiati dan E. Djohan, 2010). Beberapa faktor

menyebabkan tidak berjalannya lagi kegiatan UEP Pokmas Jender COREMAP, antara lain modal usaha sangat kecil, peluang kerja dengan penghasilan yang lebih besar daripada hasil dari usaha membuat makanan kecil yang modalnya diperoleh dari COREMAP II, dan karena implementasi program pemberdayaan ekonomi lain yang memberikan bantuan pinjaman lebih besar dari jumlah yang dipinjamkan oleh Pokmas Jender COREMAP. Berdasar keterangan dari pengurus kegiatan PNMP Mandiri di Desa Limbung, bantuan pinjaman SPP sejak tahun 2008 telah melibatkan lebih dari 50 orang perempuan dengan pinjaman yang bervariasi antara 500 ribu rupiah hingga 5 juta rupiah per orang⁵. Informasi yang diperoleh dari diskusi kelompok dengan ibu-ibu di dusun Air Berani antara lain menggambarkan pengaruh program non-COREMAP yang menyebabkan berhentinya kegiatan UEP Pokmas Jender, yaitu sebagai berikut.

“.....kalau yang pinjaman 25 ribu (rupiah) per orang dari Suri (ketua Pokmas Jender) itu tidak jalan lagi bu, habisnya di tangan ibu masing-masing, mereka pinjam dan dijadikan modal gitu kan. Tadinya modal itu dikembalikan sebulan sekali gitu kan dengan cicilan tetapi lama-lama tidak dikembalikan karena habis begitu saja, karena hanya 25 ribu. Terus sekarang ini kegiatan ibu-ibu lebih kepada di PT Ketam itu. Sekarang ada di PT Pak Jali bukan hanya PT Susan. Istilahnya kalau kita rutin masuk ya Alhamdulillah kita dapat banyak duitnya, 10 hari kan sekali gajian,

⁵ Pinjaman diberikan kepada kelompok sejumlah maksimum 1 juta per orang, tetapi kemudian dapat dibagi-bagi ke anggota kelompok, sehingga besarnya pinjaman perorangan bergantung pada kebutuhan. Untuk kelompok dengan 10 orang anggota dapat meminjam maksimum sebesar 10 juta rupiah.

kadang 10 hari 150 ribu. Di desa ini juga ada PNPM. Ibu-ibu dapat bantuan SPP. SPP bisa pinjam semampu kita tergantung kita. Ada yang pinjam 2 juta, ada yang lima juta, ada juga yang 500 ribu. Sebagian pinjaman untuk beli bubu, ada juga yang buat warung, tapi ya ada juga untuk kebutuhan harian”.

Dana bergulir Pokmas Jender pada tahun 2006 habis dibagi kepada anggota kelompok, tetapi sarana pendukung usaha masih ada. Peralatan tersebut diambil alih dan dikelola oleh LPSTK dengan cara disewakan kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Hasil sewa tidak lagi menjadi pemasukan Pokmas Jender, tetapi dimasukkan ke kas LPSTK yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan COREMAP II di Desa Limbung.

Tidak seperti Pokmas Jender yang sudah tidak aktif, Pokmas produksi dan pokmaswas masih menjalankan kegiatan UEP dengan jenis usaha keramba jaring tancap (KJT). Bantuan modal untuk usaha tersebut mencapai 25 juta rupiah per pokmas untuk tahun 2009, 34 juta rupiah/pokmas pada tahun 2010, dan 37 juta rupiah per pokmas pada tahun 2011.

Secara keseluruhan kegiatan UEP menunjukkan perkembangan yang baik, antara lain terlihat dari cukup besarnya uang yang dikembalikan oleh pokmas-pokmas ke LPSTK. Pada tahun 2010, dari enam pokmas yang sudah berhasil panen KJT telah terkumpul sebanyak 22,25 juta rupiah. Satu tahun sebelumnya, dua pokmas juga telah mengembalikan kira-kira 7 juta rupiah. Keseluruhan uang dikelola oleh LPSTK untuk biaya berbagai kegiatan COREMAP dan direncanakan untuk membentuk kelompok baru jika jumlah uang sudah mencukupi untuk modal usaha satu buah KJT. Jika rencana ini terlaksana, maka akan semakin banyak rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan UEP.

Berdasar data kajian BME tahun 2011, dari 75 rumah tangga responden, terdapat sebanyak 45 rumah tangga (60 persen) yang menerima dana bergulir pada saat ini. Pemanfaatan dana bergulir didominasi oleh usaha pembesaran ikan kerapu dengan keramba jaring tancap (KJT), sisanya (2,2 persen, atau satu rumah tangga) yang memanfaatkan dana bergulir untuk usaha dagang. Tidak ditemukan rumah tangga responden yang memanfaatkan dana bergulir untuk industri rumah tangga. Sangat rendahnya proporsi rumah tangga pokmas yang memanfaatkan dana bergulir untuk usaha dagang mungkin karena pada saat kajian BME ini berlangsung, kegiatan anggota Pokmas Jender yang semula menjalani usaha membuat makanan kecil sudah tidak berjalan lagi, seperti dikemukakan dalam wawancara terbuka berikut ini.

“.....jadi ibu-ibu sekarang sudah tak ada kegiatan lagi. Kalau ada pertemuan pun kan tak ada. Tidak ada bahan untuk dipertemuan, apa yang ingin kita cakap tidak ada. Tapi sudah lama ini jender tidak ada kegiatan. Kami punya peralatan yang semula disewakan juga sudah ada pada LPSTK. Jadi kami sudah tidak ada pemasukan lagi” (diskusi kelompok dengan lima anggota Pokmas Jender Desa Limbung)

Sebaliknya, usaha KJT baru memasuki tahun pertama pelaksanaan kegiatan, walau dua dari enam KJT sudah memasuki tahun ke dua. Tingginya persentase rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan UEP dalam bentuk KJT tersebut sejalan dengan fokus pengembangan UEP COREMAP II di Kabupaten Lingga yang diarahkan pada usaha KJT, tidak hanya di Desa Limbung tetapi juga di enam desa binaan COREMAP lainnya yang meliputi Penaah, Teregeh di Sekanah, Mamud, Tajur Biru, Perjung, dan Benan. Sementara itu, sekitar 4,4 persen responden yang memiliki jenis usaha

keramba jaring apung (KJA) adalah mereka yang kenyataannya juga melakukan usaha KJT. Menurut LPSTK, tidak ada UEP yang berupa KJA.

3.1.2. Jenis dan Perkembangan Usaha

Telah dikemukakan bahwa jenis UEP di Desa Limbung, seperti halnya di desa-desa binaan COREMAP II lainnya di Kabupaten Lingga didominasi oleh keramba jaring tancap (KJT). Usaha ini telah dilakukan sejak tahun 2009 dengan dua kelompok usaha KJT, bertambah menjadi 10 pada pertengahan tahun 2011. UEP-KJT diterimakan ke masyarakat, khususnya anggota pokmas dengan sistem *community contract*. Dalam sistem ini pokmas mendapat kandang dan bibit, tetapi masyarakat juga dilibatkan dalam pengadaan bahan-bahan kandang. Pengelolaan KJT dibawah tanggung jawab LPSTK, yang berarti LPSTK harus memfasilitasi kegiatan KJT tersebut, yang tampaknya sudah dilakukan dengan baik di Desa Limbung, seperti diungkapkan seorang ketua kelompok dalam wawancara terbuka berikut ini.

“.....Sesuai dengan peraturan modelnya community contract. Kami terima peralatan. Walau demikian kayu kami yang potong, kemudian kami dibayar. Untuk yang kami tidak bisa tangani, LPSTK yang menangani, seperti bibit, waring (jaring). (Alat-alat itu) dipercayakan pada LPSTK yang beli. Pokoknya apapun yang tidak kami jangkau, kami serahkan LPSTK untuk membelinya. Bulan satu tahun 2009, kami sudah buat bagan dengan gotong royong. Tenaganya kemudian dibayar. Waktu itu (membuat) belum ada bantuan sama sekali. Untuk konsumsi kami bekal air putih masing-

masing. Ke hutan juga bekal sendiri-sendiri. Setelah keluar dana baru kita perhitungkan”.

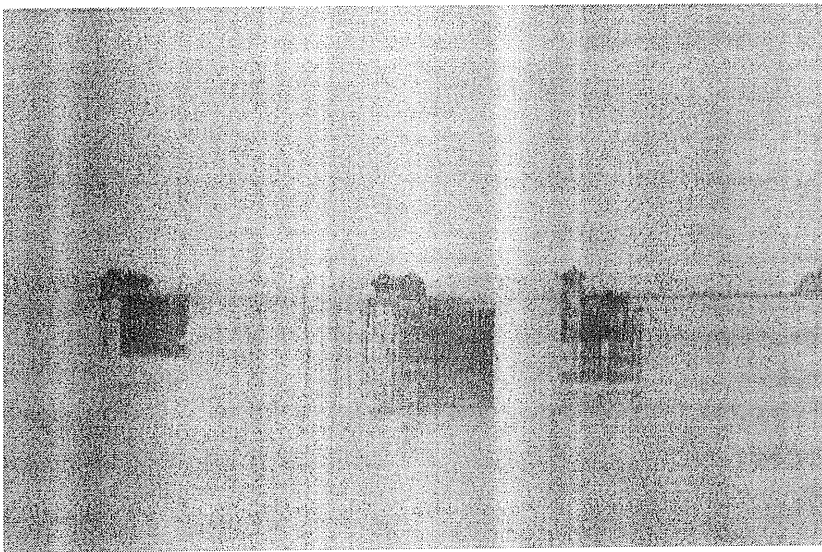
Semua kegiatan UEP yang berupa usaha keramba jaring tancap telah memetik hasil panen (kecuali satu pokmas di dusun Senempek) dengan capaian yang bervariasi. Hasil panen dua Pokmas dengan jenis UEP-KJT ikan kerapu macan pada tahun 2009 telah panen dua kali, tetapi hasilnya turun tajam, dan pada saat ini sedang menunggu panen yang ke tiga. Sementara itu, enam pokmas yang memulai usaha pada tahun 2010 baru panen satu kali dengan hasil panen berkisar antara 7,97 juta rupiah - 26,51 juta rupiah (lihat tabel 3.1). Dari enam pokmas, tiga pokmas mendapat hasil ≥ 50 persen dari modal awal yang sebesar 32 juta rupiah per KJT, dan tiga pokmas lainnya mendapat hasil kurang dari separuhnya modal awal. Untuk pokmas yang hanya memperoleh hasil panen kurang dari 8 juta rupiah kotor (belum memperhitungkan biaya perawatan, penyediaan bibit untuk usaha berikutnya, dan angsuran ke LPSTK) tersebut dapat dikatakan mengalami kegagalan panen, terutama karena persoalan kerja kelompok yang tidak berjalan dengan baik.

Berdasar diskusi kelompok dengan ketua-ketua dan beberapa anggota pokmas dapat ditengarai dua faktor penting yang memengaruhi tingkat keberhasilan kegiatan UEP-KJT, yaitu: (1) SDM, yang kurang bertanggung jawab dalam pengelolaan usaha maupun latar belakang pekerjaan anggota pokmas yang tidak mendukung untuk pengelolaan usaha, dan (2) teknis pengelolaan KJT.

Terkait dengan faktor SDM, dalam diskusi kelompok dikemukakan bahwa pokmas yang kurang berhasil dalam pengelolaan usaha KJT adalah pokmas yang menghadapi persoalan dalam kerja kelompok, misalnya ada anggota yang tidak disiplin untuk mengerjakan apa yang telah disepakati bersama dalam pengelolaan KJT (seperti memberi makan ikan dan membersihkan kandang).

Persoalan ini bukan hanya memengaruhi tumbuh kembang ikan yang kurang baik, tetapi juga menambah beban kerja pada ketua dan anggota lain. Kesulitan untuk bekerja kelompok di antara anggota pokmas kemungkinan besar karena masyarakat belum memiliki pemahaman yang baik tentang kerja kelompok yang merupakan syarat utama dalam pengelolaan KJT. Padahal pendampingan kepada mereka hanya dilakukan oleh LPSTK yang notabene juga anggota masyarakat setempat dengan kapasitas terbatas sebagai tenaga pendamping.

Gambar 3.1
Keramba Jaring Tancap (KJT) COREMAP II yang Dikelola
Pokmas di Desa Limbung



Persoalan kerja kelompok yang kurang baik juga ditemukan pada pokmas yang sebagian anggotanya bukan nelayan. Mereka yang bukan nelayan pada umumnya lebih mementingkan pekerjaan sendiri dan mengesampingkan kewajiban mereka sebagai anggota pokmas

yang mengelola usaha KJT. Dalam diskusi kelompok terungkap persoalan tersebut, yaitu sebagai berikut.

“.....anggota saya banyak mementingkan kerja lain. Jadi pertama-tama anggota saya ada tujuh orang, dua orang mundur tinggal lima, tapi yang aktif kasih makan hanya tiga orang, yang dua ini tak mau lah. Mereka bukan nelayan, satunya buruh, ada juga yang aparat desa. Kerja darat lah. Macam mana kalau begini, saya dan anggota tidak bisa kerja lagi. Hasilnya sedikit, paling sedikit dari kelompok lain. Pada putaran kedua ini dari kelompok kami sudah tidak aktif lagi. Saya telah beritahukan ke pak LPSTK, saya kasih balik ke LPSTK saja” (Rsy, ketua kelompok BtL)”

“.....maksudnya begini bu, yang tak aktif di tiap kelompok ini (karena) mereka mementingkan pekerjaan pribadi daripada kegiatan kelompok. Nah inilah yang menjadi kendala di setiap kelompok (Zfd, ketua kelompok Pkws).

Permasalahan bekerja berkelompok tidak menjadi persoalan bagi pokmas yang telah memiliki kesepakatan bersama di antara anggota kelompok dan dijalani dengan konsekuen. Misalnya, kesepakatan untuk saling menggantikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya jika berhalangan, bersedia dipotong hasil panen karena tidak ada yang menggantikan ketika berhalangan menjalankan kewajiban. Kesepakatan ini dijalankan oleh salah satu pokmas yang mendapat bantuan KJT pada tahun 2010 yang juga memperoleh hasil panen tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi SDM yang memahami dan menjalankan kerja kelompok dengan baik dapat memperoleh hasil KJT yang tinggi pula.

Tabel 3.1
 Hasil panen UEP keramba jaring tancap di Desa Limbung, tahun 2010

Keterangan	Nama Pokmas					
	Baku Serumpun (7 org)	Elang Laut (8 org)	Pokmaswas (7 org)	Jasa Mandiri (5 org)	Bintang Laut (7 org)	Bangua Putih (6 org)
Jumlah ikan terakhir yang berhasil dipanen (ekor)	602	640	420	475	438	292
Jml berat dan ukuran ikan (kg):						
- A	12,3	148,8	46,3	3	2,7	5,6
- B	173,7	134,9	117,6	132,3	101,7	78,1
Total berat	186,4	279	169,9	135,3	103,3	83,7
Total pendapatan (Rp):	17.708,00	26.505.000	15.570.500	12.853.500	10.070.000	7.971.000
Harga ikan Rp 95.000/kg	0					
Pengembalian ke LPSTK (Rp)	4.250.000	6.500.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000	1.700.000
(± 25% dari hsl panen)						
Persediaan modal bibit berikutnya (Rp)	4.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000
Pembelian pakan tambahan (Rp)	258.000	40.000	-	1.000.000	-	450.000
Jasa pemataman (Rp)	-	100.000	100.000	-	-	-
Jasa ketua (Rp)	-	400.000	-	-	-	-
Konsumsi buatr/rehab kelong (Rp)	-	300.000	-	-	-	400.000
Transportasi ke Pancur (Rp)	-	90.000	70.000	-	-	-
Doa selamat (Rp)	-	160.000	-	-	-	-
Biaya pencucian ikan (Rp)	-	425.000	252.500	-	-	-
Upah jaga malam (Rp)	-	-	150.000	-	-	-
Jasa anggota (sisa hasil usaha yang dibagikan ke anggota) (Rp)	9.200.000	12.990.000	8.148.000	5.853.500	5.370.000	2.421.500
Uang kas kelompok (Rp)	-	500.000	350.000	-	-	-

Sumber: Catatan LPSTK Desa Limbung, Kec. Liangga Utara, Laporan MPA KJT, 2010

Selain faktor SDM, faktor teknis juga memengaruhi keberhasilan usaha KJT, seperti pemilihan jenis ikan dan keterampilan dalam perawatan. Bibit ikan jenis kerapu macan dipilih oleh PIU COREMAP II Kabupaten Lingga, karena kerapu macan lebih jarang diserang penyakit dibanding kerapu sunu dan hitam. Pengelola COREMAP II Kabupaten Lingga tidak menganjurkan untuk KJT ikan kerapu sunu, walau harga lebih mahal, karena jenis ikan ini mudah terkena wabah penyakit. Disamping itu, karena dapat diperoleh di alam, maka pencarian bibit kerapu sunu yang biasanya ditangkap dengan bubu dapat merusak terumbu karang.

Hasil panen tidak semuanya dibagikan pada anggota pokmas, tetapi disisihkan untuk beberapa keperluan, yaitu: (1) angsuran/cicilan pengembalian bantuan pinjaman ke LPSTK sebesar 25 persen dari jumlah yang diterima pokmas, (2) pembelian bibit untuk usaha budidaya berikutnya, dan (3) pembelian pakan, dan (4) biaya-biaya lain bergantung pada keperluan masing-masing pokmas. Dapat dilihat pada tabel 3.1, sebagian pokmas memperhitungkan biaya pencucian ikan (pemeliharaan ikan), jasa ketua pokmas, jasa pemasaran, dan transportasi. Sisa hasil usaha yang diperoleh pokmas ada yang mencapai 12,99 juta, tetapi satu pokmas hanya mendapat sekitar 2,4 juta rupiah. Dengan anggota yang berkisar antara 5-8 orang, maka setiap orang memperoleh tambahan pendapatan antara 400 ribu rupiah – 1,6 juta rupiah per sekali panen (antara 8-9 bulan). Walau hasil panen masih dihitung kecil jika dibanding dengan modal awal, tetapi jika dapat dikelola secara berkelanjutan diharapkan dapat mendorong terbentuknya kelompok baru.

Selama lebih dari dua tahun diimplementasikannya kegiatan UEP-KJT, perkembangan usaha belum cukup baik, tetapi menunjukkan indikasi yang positif. Hal ini antara lain dapat dilihat dari kesinambungan kegiatan. Misalnya, dua pokmas yang melakukan

usaha sejak tahun 2009 sudah panen lebih dari satu kali, walau hasil panen menurun tajam, terutama karena faktor keterbatasan modal untuk penyediaan bibit. Walau pokmas sudah menyisihkan uang hasil panen untuk membeli bibit, pada kenyataannya jumlah bibit yang mampu dibeli masih jauh lebih rendah dari jumlah bibit seperti yang diberikan oleh COREMAP. Sebagai contoh salah satu pokmas yang menjalani usaha sejak akhir tahun 2009, hanya dapat membeli bibit ikan senilai 3 juta atau sebanyak 132 ekor bibit ikan kerapu sunu dan kerapu hitam. Jumlah bibit tersebut jauh lebih rendah dibanding jumlah bibit pada awal usaha yang mencapai 1000 ekor kerapu macan. Kenyataan ini tentunya memengaruhi sangat rendahnya hasil panen ke dua dibanding dengan hasil panen pertama, seperti digambarkan berikut ini.

Hasil panen pertama mencapai 18,87 juta rupiah, sedangkan pada panen yang ke dua hanya mendapat 3,532 juta rupiah (hasil wawancara dengan ketua pokmas). Penurunan pendapatan dari usaha KJT yang sangat tajam tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan jumlah bibit yang ditebar dan jenis ikan. Pada awal usaha, jumlah bibit mencapai 1.000 ekor ikan kerapu macan, jauh lebih banyak dibanding bibit pada tebar bibit yang kedua (115 ekor ikan kerapu sunu dan 17 ekor ikan kerapu hitam). Perbedaan jumlah bibit jelas berpengaruh pada hasil panen. Demikian pula perbedaan jenis ikan nampaknya juga memengaruhi hasil produksi, karena angka kematian juga lebih tinggi pada panen kedua dibanding yang pertama. Angka kematian ikan pada usaha pertama hanya kira-kira 14 persen, sedangkan pada usaha kedua mencapai 46,1 persen dan 70,5 persen, masing-masing untuk kerapu sunu dan kerapu hitam.

Keterbatasan uang untuk pembelian bibit tampaknya juga dihadapi oleh semua pokmas, termasuk pokmas yang baru panen satu kali. Hasil diskusi terfokus dengan ketua-ketua pokmas menggambarkan hal tersebut, seperti berikut ini.

“.....kami memang masih kesulitan untuk pengadaan bibit. Hasil panen memang ada yang disisihkan untuk bibit, tetapi tidak cukup bu. Kami kan juga perlu untuk bagi ke anggota, juga memperbaiki jaring yang rusak. Bu....bibit memang bisa dicari di alam, tapi itu lama karena tidak setiap hari bisa dapat. Jadi kalau tidak ada bantuan bibit lagi untuk kelompok, kami mau bagaimana lagi....usaha pasti berhenti”.

Selain kesulitan pengadaan bibit, perkembangan usaha KJT yang kurang baik juga dipengaruhi oleh pengadaan pakan yang memenuhi ketentuan untuk tumbuh kembang ikan yang baik. Makanan ikan yang berupa ikan rucah pada umumnya dicari sendiri oleh anggota pokmas di wilayah penangkapan mereka. Persoalannya tidak semua anggota kelompok dapat memperoleh ikan sesuai yang dibutuhkan. Untuk satu KJT bantuan COREMAP dibutuhkan paling tidak 20 kg ikan rucah, sementara satu nelayan dengan menggunakan jaring paling biasanya hanya mendapat 5 kg. Jika dalam satu hari hanya ada dua anggota pokmas yang bertanggung jawab untuk memberi makan ikan, maka kebutuhan makan ikan hanya tercukupi separuhnya. Untuk membeli pakan ikan sulit dipenuhi bagi sebagian besar anggota pokmas karena harganya cukup mahal (kira-kira 50 ribu rupiah per hari), padahal penjualan hasil tangkapan pada umumnya hanya cukup dipakai untuk memenuhi kebutuhan dasar. Akibatnya, ikan tidak berkembang dengan baik dan tidak “cukup ukur” ketika waktu panen sehingga harga ikan lebih rendah dari harga standar (harga menurut ukuran besar ikan).

Menyikapi persoalan penyediaan pakan ikan, ada pokmas yang membuat “tangkal” di samping keramba. “Tangkal” ini berfungsi sebagai alat tangkap anak ikan yang dapat dipakai sebagai pakan ikan kerapu di KJT. Keberadaan “tangkal” tersebut cukup menolong, tetapi pemenuhan kebutuhan pakan ikan masih tetap menjadi kendala bagi

sebagian besar pokmas KJT. Berdasar diskusi kelompok dengan ketua-ketua Pokmas yang menjalani usaha KJT diketahui bahwa perkembangan usaha cukup bagus sepanjang penyediaan bibit dan pakan ikan terpenuhi.

Walau hasil panen belum memuaskan akibat sejumlah persoalan yang dihadapi, anggota Pokmas masih berkeinginan untuk melanjutkan jenis usaha yang sama. Di antara mereka yang sedang menjalani UEP, hanya 2,2 persen yang ingin berganti usaha. Sebanyak 97,8 persen tidak berganti usaha, yaitu pembesaran ikan kerapu dengan KJT. Hal ini menggambarkan bahwa jenis UEP ini diminati oleh nelayan desa ini, mungkin karena pekerjaan ini bukan merupakan jenis pekerjaan yang baru dikenal oleh masyarakat Desa Limbung. Sebagian nelayan di desa ini, terutama mereka di dusun Senempek telah biasa mengelola KJT atas usaha sendiri maupun bantuan dari dinas perikanan. KJT memang tidak berkembang dengan baik. Selain permasalahan teknis (perawatan ikan yang sesuai standar), faktor pencurian di keramba menjadi penyebab kurang berkembangnya usaha tersebut. Disamping itu, biaya modal awal yang cukup besar merupakan kendala lain dalam pengembangan KJT ikan. Oleh karena itu, bantuan modal awal COREMAP yang mencapai puluhan juta mendorong kembali anggota pokmas untuk meneruskan usaha KJT mereka. Bahkan, masyarakat nelayan di luar anggota pokmas juga ada yang berusaha di bidang KJT ikan kerapu dengan modal sendiri sesuai dengan kemampuan mereka.

3.2. Perkembangan Pendapatan Penerima Dana UEP

Pelaksanaan kegiatan UEP COREMAP tahap II diharapkan menjadi salah satu cara efektif untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan indikator keberhasilan program dari aspek sosial ekonomi. Kegiatan UEP dilaksanakan oleh anggota kelompok masyarakat (pokmas). Ada dua Pokmas Jender,

Sembilan (9) Pokmas Produksi, dan satu Pokmaswas yang melakukan kegiatan UEP. Anggota pokmas tersebut diberikan bantuan modal yang berupa dana bergulir dan sarana-prasarana pendukung yang berupa fisik maupun non fisik (seperti pembentukan kelembagaan masyarakat dan pemberian pelatihan kepada beberapa anggota pokmas). Pada saat penelitian ini berlangsung (bulan Juni 2011), jumlah rumah tangga penerima dana bergulir yang masih aktif menjalani UEP sebanyak 66 rumah tangga. Kesemuanya mempunyai bidang usaha KJT ikan kerapu. Kegiatan UEP anggota Pokmas Jender sudah tidak berjalan lagi, utamanya karena modal usaha yang terlalu kecil sehingga usaha tidak dapat berkembang dengan baik⁶. Meskipun demikian, anggota-anggota Pokmas Jender tersebut pernah merasakan tambahan pendapatan dari usaha UEP dalam jumlah yang tidak besar sehingga diperkirakan kurang berpengaruh terhadap perubahan pendapatan rumah tangga pokmas pada periode tahun 2010-2011.

Tabel 3.2. menggambarkan tren pendapatan rumah tangga pokmas (yang sedang dan pernah mendapat dana bergulir) dan bukan pokmas selama periode 2010-2011. Tabel ini menunjukkan, jumlah rumah tangga pokmas di Desa Limbung melebihi jumlah rumah tangga bukan pokmas. Jumlah rumah tangga pokmas yg menjadi

6 Dana bergulir pengembangan UEP untuk pokmas Jender yang tersedia per desa adalah 1,2 juta rupiah, namun uang tersebut dipotong untuk pembelian alat dan biaya transport peserta sehingga jumlah uang yang dibawa pulang hanya kurang dari Rp 500.000. Uang tersebut dipinjamkan kepada anggota kelompok secara perseorangan karena mereka menginginkan kerja sendiri-sendiri sehingga masing-masing anggota hanya memperoleh pinjaman 50 ribu yang kemudian dimanfaatkan untuk membuat kue dan dititipkan ke warung. Usaha tersebut sempat berjalan beberapa lama dan bahkan berkembang pada kelompok lain di dusun lain sehingga jumlah anggota seluruhnya ada 20 orang. Tetapi pada tahun ini usaha berhenti, antara lain karena ada pinjaman modal usaha yang lebih besar dari program pemerintah lainnya (Romdiati dan E. Djohan, 2010).

responden pada tahun 2011 juga lebih banyak daripada jumlah tahun 2010. Demikian pula proporsinya, yaitu 56 persen dari 75 rumah tangga responden pada tahun 2011 dan hanya 30 persen dari 100 rumah tangga responden pada tahun 2010. Peningkatan jumlah dan proporsi rumah tangga pokmas tersebut karena adanya tambahan dua pokmas yang mendapat dana bergulir pada tahun 2011 yang sebagian besar anggotanya termasuk dalam sampel penelitian ini. Disamping itu, tambahan tersebut juga berasal dari rumah tangga yang pada tahun sebelumnya belum menjadi anggota pokmas, tetapi pada tahun 2011 menggantikan rumah tangga lain yang mengundurkan diri dari keanggotaan pokmas.

Secara keseluruhan terlihat pada tabel 3.2, pendapatan rumah tangga pokmas lebih rendah dibanding dengan rumah tangga bukan pokmas. Baik pada tahun 2010 maupun 2011, pendapatan rata-rata, perkapita, median, dan pendapatan maksimum pada rumah tangga pokmas sedikit lebih rendah daripada bukan pokmas. Pada tahun 2011, nilai pendapatan rata-rata rumah tangga pokmas hanya sekitar 1,1 juta rupiah per bulan, sedangkan bukan anggota pokmas mencapai kira-kira 1,4 juta rupiah per bulan. Demikian pula jika dilihat nilai kenaikan pendapatan rumah tangga pokmas (69,5 persen) juga lebih rendah daripada bukan pokmas (73,4 persen). Pola sama juga terjadi untuk pendapatan per kapita. Sebaliknya, nilai median yang menunjukkan perubahan lebih besar pada rumah tangga pokmas (90,7 persen) dibanding nilai median rumah tangga bukan pokmas (67,8 persen), menggambarkan bahwa besar pendapatan rumah tangga pokmas cenderung semakin lebih merata dibanding rumah tangga bukan pokmas.

Tabel 3.2
Statistik Pendapatan Rumah Tangga Per Bulan Menurut Status Keanggotaan Pokmas COREMAP, Desa Limbung, Kabupaten Lingga, Tahun 2010 (Rupiah)

Statistik Pendapatan	Jumlah (Rp.)					
	Pokmas			Bukan Pokmas		
	2010	2011	Perubahan (%)	2010	2011	Perubahan (%)
Per kapita	190.950	328.450	72,0	232.650	418.850	80,0
Rata-rata rumah tangga	633.800	1.074.530	69,5	805.950	1.397.400	73,4
Median	517.700	987.500	90,7	595.850	1.000.000	67,8
Minimum	200.000	220.800	10,4	7.500	216.670	278,9
Maksimum	2.141.700	4.837.500	125,9	3.729.200	6.116.700	64,0
<i>N</i>	30	42		70	33	

Sumber: Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang, PPK-LIPI 2006 dan Survei BME Aspek Sosial-Ekonomi, PPK-LIPI 2010 dan 2011.

Beberapa faktor penting yang diperkirakan memengaruhi perbedaan pendapatan penerima dana bergulir (yaitu rumah tangga pokmas) dan bukan pokmas adalah perbedaan jenis pekerjaan, status dan lama waktu kegiatan UEP. Ada sedikit perbedaan jenis pekerjaan rumah tangga pokmas dan bukan pokmas. Rumah tangga pokmas didominasi oleh rumah tangga nelayan, sedangkan jenis pekerjaan rumah tangga bukan pokmas terdiri dari nelayan, pedagang, dan sebagian kecil petani. Rumah tangga pedagang yang umumnya terdiri dari WNI keturunan Cina pada umumnya memiliki pendapatan lebih besar dibanding dengan pendapatan nelayan. Berdasar data survei BME tahun 2011 diketahui bahwa pendapatan rata-rata rumah tangga yang kepala rumah tangga (KRT) bekerja di sektor perdagangan adalah 1,5 juta rupiah per bulan, lebih tinggi daripada rumah tangga yang KRT-nya bekerja sebagai nelayan (1,2 juta rupiah per bulan). Kondisi ini kemungkinan besar menjadi faktor penting dalam memengaruhi pendapatan rumah tangga pokmas (yang mayoritas memiliki jenis pekerjaan nelayan) yang lebih rendah daripada pendapatan rumah tangga bukan pokmas.

Pendapatan rumah tangga pokmas yang lebih rendah daripada rumah tangga bukan pokmas juga disebabkan oleh belum berkembangnya UEP-KJT. Dari delapan pokmas yang sudah panen, enam pokmas di antaranya baru panen satu kali dengan hasil panen yang belum memuaskan. Sebagian besar anggota mendapat sisa hasil usaha lebih dari satu juta rupiah per orang dan sebagian kecil lainnya kurang dari 500 ribu rupiah per orang. Dengan lama waktu pembesaran ikan kira-kira delapan bulan, maka tambahan pendapatan anggota pokmas hanya berkisar antara 63 ribu-200 ribu per bulan. Walaupun masih tergolong rendah, hasil survei mengkonfirmasi bahwa sebanyak 86,7 persen dari 75 orang responden yang menerima dana bergulir yang mayoritas untuk usaha KJT telah dapat meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, sebesar 13,3 persen mengatakan bahwa dana bergulir yang diterima belum bisa menambah penghasilan. Kemungkinan besar mereka adalah anggota pokmas yang hanya memperoleh panen sedikit atau jauh lebih rendah dari biaya yang telah dikeluarkan untuk pembesaran ikan, mereka yang belum pernah panen (terutama responden di dusun Senempek), dan mereka yang usahanya merugi (misalnya anggota Pokmas Jender yang gagal dalam menjalani UEP).

Tambahan pendapatan dari hasil kegiatan UEP juga tercermin dari persebaran persentase rumah tangga pokmas dan bukan pokmas menurut kelompok pendapatan. Tabel 3.3 menggambarkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan rumah tangga pokmas. Hal ini diindikasikan oleh penurunan yang sangat besar pada persentase rumah tangga pokmas yang memiliki pendapatan lebih kecil dari 500 ribu rupiah per bulan selama satu tahun terakhir, yaitu dari 46,7 persen (tahun 2010) menjadi 9,5 persen (tahun 2011). Sebaliknya terjadi peningkatan tajam pada rumah tangga dengan pendapatan antara 1,0-1,4 juta rupiah per bulan selama satu tahun terakhir. Perbaikan kondisi ekonomi ini mungkin disebabkan oleh meningkatnya hasil tangkapan

dan adanya tambahan dari hasil panen KJT. Telah dikemukakan di atas, hasil panen KJT belum memuaskan, tetapi telah dapat menambah pendapatan anggota yang umumnya bisa mencapai sekitar 1 juta rupiah per orang per sekali panen. Sementara itu, pada rumah tangga bukan pokmas nampak jelas pada kelompok pendapatan ke dua dan ketiga dari bawah. Penurunan tajam terjadi pada proporsi rumah tangga dengan pendapatan antara 500 ribu - 999 ribu rupiah per bulan dan sebaliknya terjadi kenaikan proporsi rumah tangga dengan kelompok pendapatan 1,0 -1,4 juta rupiah. Namun, proporsi rumah tangga pada kelompok pendapatan terendah (< 500 ribu rupiah per bulan) masih tergolong tinggi pada tahun 2011, mencapai kira-kira dua setengah kali lebih besar daripada kelompok rumah tangga pokmas. Temuan ini mengindikasikan bahwa tambahan pendapatan dari UEP-KJT cenderung dialami oleh rumah tangga berpenghasilan rendah. Melalui wawancara terbuka dan diskusi kelompok diperoleh keterangan bahwa anggota pokmas pelaksana UEP-KJT pada umumnya adalah nelayan yang tergolong kurang mampu, kecuali para ketua Pokmas dan sebagian kecil anggota yang memiliki pekerjaan utama bukan nelayan.

Pada tahun 2011, persebaran rumah tangga pokmas masih terkonsentrasi pada kelompok pendapatan kurang dari 1,5 juta rupiah per bulan. Data ini mengindikasikan bahwa tambahan pendapatan dari hasil UEP-KJT belum bisa menempatkan rumah tangga pokmas pada status ekonomi yang lebih baik daripada rumah tangga bukan pokmas. Seberapa besar kontribusi UEP terhadap pendapatan rumah tangga dapat dilihat dari tabel 3.3 di atas. Di luar enam pokmas pada tabel 3.1, ada dua pokmas yang telah menjalani usaha sejak akhir tahun 2009 dan telah panen dua kali. Juga ada dua pokmas di dusun Senempek yang baru melakukan kegiatan UEP beberapa bulan. Diharapkan dalam empat hingga lima bulan ke depan dua pokmas tersebut sudah dapat memanen keramba sehingga akan ada semakin

banyak rumah tangga yang mendapat tambahan penghasilan dari pelaksanaan UEP COREMAP.

Tabel 3.3
Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan Rumah Tangga Pokmas Dan Bukan Pokmas, Desa Limbung, Kabupaten Lingga, Tahun 2010 (Persen)

<i>Kelompok Pendapatan</i>	<i>RT Pokmas</i>		<i>RT Bukan Pokmas</i>	
	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
< 500	46,7	9,5	35,7	24,2
500 – 999	40,0	42,9	41,4	24,2
1.000 – 1.499	6,7	38,1	11,4	28,2
1.500 – 1.999	3,3	4,8	4,3	12,1
2.000 – 2.499	3,3	0,0	2,9	6,1
2.500 – 2.999	0,0	0,0	1,4	3,0
3.000 – 3.499	0,0	2,4	0,0	3,0
3.500 ke atas	0,0	2,4	2,9	9,1
Jumlah	100,0	100	100,0	100,0
(N)	30	42	70	33

Sumber: Survei BME Aspek Sosial-Ekonomi, PPK-LIPI 2010 dan 2011

Hasil kajian BME Aspek Sosial Ekonomi tahun 2010 telah mengemukakan kasus keberhasilan pokmas dalam mengembangkan usaha KJT. Keberhasilan pengembangan UEP-KJT juga dialami oleh pokmas lain yang baru memulai usaha pada akhir tahun 2010 dan panen pada awal tahun 2011, yaitu pokmas yang dapat memperoleh hasil panen sekitar 26,5 juta rupiah. Seperti halnya pokmas sebelumnya, aturan yang jelas tentang pembagian kerja dan konsekuensi jika tidak mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab anggota kelompok merupakan kunci keberhasilan usaha tersebut. Disamping itu, peran ketua kelompok dalam memfasilitasi anggota untuk saling membantu dalam kerja kelompok juga berperan penting dalam mencapai hasil panen yang tertinggi dibanding kelompok

lainnya (lihat tabel 3.1). Sebaliknya, ketua kelompok yang kurang komunikatif di satu sisi, sedangkan anggota juga tidak disiplin dalam melakukan kewajibannya menyebabkan kegagalan usaha, seperti terjadi pada pokmas Bangau Putih. Dalam diskusi kelompok dengan para ketua pokmas diperoleh keterangan bahwa kegagalan tersebut dikarenakan rendahnya disiplin anggota pokmas dalam melaksanakan kewajibannya, baik dalam memberi makan maupun merawat ikan. Dari 9 anggota pada awal pembentukannya, pada saat panen hanya ada dua orang yang aktif. Hasil panen kelompok ini sangat rendah (7,9 juta), 1,7 juta rupiah di antaranya disetorkan ke LPSTK sebagai uang cicilan pengembalian modal awal. Setelah dipotong biaya pakan ikan dan konsumsi untuk rehabilitasi keramba, serta pembelian bibit sebesar 3 juta rupiah, maka sisa hasil usaha yang dibagikan ke anggota hanya sebesar 2,4 juta rupiah, atau seperlima belas kalinya modal awal yang sebesar 34 juta. Kenyataan menggambarkan bahwa bekerja kelompok tidak mudah dilakukan pada masyarakat nelayan Desa Limbung yang selama ini bekerja sendiri. Jarang ditemukan nelayan yang bekerja bersama orang lain. Pengalaman keberhasilan pokmas yang dapat memperoleh hasil panen cukup baik adalah pokmas yang anggotanya masih ada hubungan kerabat/saudara.



4

MANFAAT SOSIAL KEGIATAN COREMAP

Implementasi COREMAP fase II di Desa Limbung yang menjadi lokasi penelitian ini telah dilakukan sejak tahun 2006. Selama lebih dari lima tahun pelaksanaan COREMAP II tersebut, masyarakat telah merasakan berbagai manfaat. Misalnya, kegiatan penyadaran masyarakat (PA), pengembangan DPL, dan pengawasan dari MCS telah dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait dengan perubahan perilaku dari yang semula merusak ke perilaku yang menjaga/mengelola ekosistem terumbu karang. Meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang kembali melakukan kegiatan melaut dengan alat tangkap yang kurang ramah lingkungan atau kurang peduli terhadap pelestarian terumbu karang di wilayah DPL, secara umum masyarakat telah memiliki pengetahuan yang cukup baik akan pentingnya pelestarian terumbu karang. Sementara itu, komponen CBM yang berfokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik ditujukan pada penduduk perempuan maupun laki-laki juga telah bermanfaat secara ekonomi pada anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini. Selain upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan UEP, komponen CBM juga membangun sarana prasarana untuk mendukung kegiatan masyarakat Desa Limbung. Bahkan, kegiatan CBM juga memberikan manfaat bagi anggota masyarakat yang bukan/belum menjadi peserta program, di antaranya dapat memanfaatkan infrastruktur yang dibangun dari dana COREMAP II, seperti tambatan perahu dan sarana mandi-cuci-kakus (MCK). Kegiatan lainnya yaitu pengembangan DPL ditujukan dalam rangka mengelola ekosistem terumbu karang yang berdampak pada peningkatan pendapatan nelayan, yang mana

kegiatan ini di bawah tanggung jawab CRITC. Pengembangan dan pengelolaan DPL melibatkan masyarakat mulai dari penentuan lokasi, pengukuran batas, dan pemasangan tanda batas. DPL merupakan daerah terlarang untuk penangkapan dan merupakan daerah perlindungan. Untuk komponen MCS di Kabupaten Lingga mempunyai kegiatan pengawasan dan *monitoring* yang berhubungan dengan pelestarian laut, terutama terumbu karang. Pada bagian ini dibahas manfaat sosial kegiatan COREMAP II dilihat dari kegiatan yang dilakukan dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur, pengawasan, dan pengelolaan daerah perlindungan laut (DPL). Disamping itu, dibahas pula persepsi masyarakat tentang manfaat COREMAP.

4.1. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program bantuan COREMAP kepada desa binaan, termasuk Desa Limbung, yaitu dalam bentuk sarana dan prasarana yang diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan pembangunan fisik/infrastruktur di bawah koordinasi komponen CBM, tetapi dikerjakan oleh pihak ketiga, yaitu kontraktor, dengan sistem lelang. Sistem pembangunan infrastruktur seperti ini menyebabkan masyarakat hanya terlibat sebagai pekerja, itupun dalam jumlah sedikit. Meskipun demikian, jenis bangunan yang diberikan sesuai dengan proposal yang diajukan, tetapi tidak semua jenis bangunan yang diajukan masyarakat diterima. Dari catatan di LPSTK, jenis bangunan infrastruktur yang diajukan kelompok masyarakat COREMAP meliputi sarana air bersih, tambatan perahu, perluasan jalan desa, penginapan untuk wisatawan, dan MCK. Namun, hingga akhir tahun implementasi program (tahun 2011), bangunan fisik bantuan COREMAP II yang terealisasi adalah tambatan perahu, MCK dan perbaikan bangunan sumur, serta pondok informasi. Meskipun belum direalisasikan oleh COREMAP, tetapi

kesesuaian antara bangunan infrastruktur yang diajukan dan yang diterima tersebut menggambarkan bahwa pendekatan kegiatan COREMAP yang berbasis masyarakat telah dilakukan cukup baik. Dalam pendekatan ini, masyarakat diberi kesempatan dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimiliki berdasar kebutuhan, tujuan, dan aspirasi yang diputuskan untuk kesejahteraan mereka (Latama dkk. 2002).

Gambar 4.1
Bantuan COREMAP Berupa Dermaga/Tambatan
Perahu Di Desa Limbung



Tiga jenis bangunan fisik di Desa Limbung tersebut lokasinya berdekatan satu sama lain, tetapi tahun pembangunannya berbeda-beda, karena pelaksanaan kegiatan bertahap. Bangunan dermaga/tambatan perahu sepanjang 200 meter yang terbuat dari kayu dibangun pada tahun 2007. Tambatan perahu ini dibangun di dusun Air Berani. Pemilihan lokasi dilakukan dengan musyawarah antara pengurus COREMAP Desa Limbung dan anggota Pokmas maupun perwakilan aparat desa dan dusun. Namun, pertimbangan yang lebih ditekankan

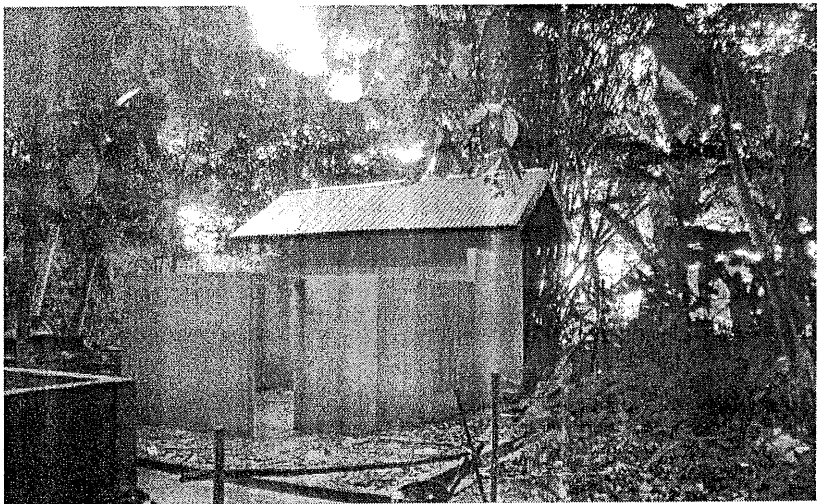
dalam memilih lokasi tersebut adalah karena kedalaman air di pantai dusun Air Berani tersebut paling dalam dibanding dengan dusun-dusun sekitarnya, kecuali dusun Centeng yang sudah tersedia dua tambatan perahu.

Hingga tahun ke tiga usia bangunan tambatan perahu, kondisi bangunan nampak masih baik kualitasnya. Pelaksanaan dan penyediaan material dibawa dari luar desa oleh pihak kontraktor, tetapi sebagian penduduk Desa Limbung dilibatkan sebagai pekerja. Kondisi ini menguntungkan karena masyarakat dapat meminta pengganti kepada kontraktor ketika mereka mendapati kayu/papan yang akan dipasang untuk tambatan perahu berkualitas buruk. Hal ini mungkin merupakan salah satu faktor yang membuat kondisi bangunan tambatan perahu masih cukup baik pada umur bangunan menginjak tahun ke tiga.

Jenis pembangunan fisik MCK beserta rehabilitasi sumur gali dilakukan bersamaan tahunnya dengan tambatan perahu, yaitu pada tahun 2007. Lokasi bangunan juga berada di lokasi yang berdekatan dengan lokasi dermaga dan pondok informasi di dusun Air Berani. Pemilihan lokasi semata-mata karena di dusun tersebut sudah ada sumur gali yang tidak pernah kering sehingga pada musim kemarau menjadi sumber air bersih bukan hanya bagi penduduk sekitarnya tetapi juga dari dusun lain, terutama Centeng dan Pangkalan Buluh. Oleh karena itu, proses musyawarah untuk penentuan lokasi berjalan dengan cepat. Bangunan MCK berupa bangunan empat persegi panjang berdinding bata dengan ukuran panjang kira-kira 5 meter dan lebar sekitar 3 meter. Sementara dinding sumur disemen, demikian pula di sekitar sumur disediakan lantai semen yang sebagian dibuat tanggul setinggi kira-kira 20 sentimeter sehingga penduduk dapat memanfaatkannya sebagai tempat mencuci pakaian. Dari observasi selama penelitian ini berlangsung, tempat MCK ini selalu ada yang memanfaatkannya, bahkan juga untuk mencuci motor. Namun

tampaknya kondisi bangunan MCK ini sudah mengalami kerusakan, bahkan di beberapa bagian tidak berfungsi dengan baik, seperti pompa, pintu-pintu, tembok yang sudah mulai retak, dan genteng yang pecah. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas bangunan kurang baik, mungkin karena tidak ada kontrol dari pengelola COREMAP pada saat proses pembangunan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pihak ke tiga dengan sistem lelang. Sistem seperti ini sering diwarnai oleh motif bisnis dengan mengutamakan keuntungan, padahal biasanya waktu pengerjaan sudah berdekatan dengan waktu pertanggung-jawaban.

Gambar 4.2
Bantuan Sarana Fisik COREMAP Berupa MCK
Di Desa Limbung



Pada tahun 2010, Desa Limbung mendapat tambahan bantuan pembangunan fisik, yaitu pondok informasi. Bangunan untuk pondok informasi berhasil diperoleh karena pondok informasi peninggalan

COREMAP I tidak bisa lagi dipakai karena pemilik tanah tidak memberikan ijin lagi untuk dimanfaatkan sebagai pondok informasi. Lokasi pondok informasi juga berada di dusun Air Berani melekat pada ujung tambatan perahu di bagian daratan, dan berdekatan pula dengan bangunan MCK. Bangunan pondok informasi berdiri di atas tanah milik desa yang dibangun oleh kontraktor pemenang lelang di tingkat kabupaten. Dengan dana sekitar 85 juta rupiah, bangunan pondok informasi ini terdiri dari tiga ruangan, yaitu ruang utama untuk pertemuan, ruang untuk menyimpan asset COREMAP Desa Limbung, dapur dan kamar mandi. Pada saat diserahkan kepada LPSTK, pondok informasi belum ada lampu sehingga LPSTK harus mengusahakan sendiri. Pada tahun 2011, pondok informasi telah tersedia meja, kursi, papan informasi, dan alat promosi kegiatan COREMAP.

Gambar 4.3
Pondok Informasi di Desa Limbung



Keberadaan pondok informasi dimaksudkan untuk menyediakan tempat pertemuan bagi warga masyarakat, baik untuk membicarakan kegiatan COREMAP II maupun kegiatan lainnya. Selain itu, pondok

informasi juga diharapkan dapat menjadi tempat promosi dan pembelajaran mengenai upaya pelestarian ekosistem terumbu karang. Hal ini diindikasikan oleh adanya papan dengan beberapa poster, *banner*, dan foto-foto yang menggambarkan kegiatan-kegiatan COREMAP II yang dilakukan oleh peserta program, baik di dalam maupun luar desa, bahkan yang mereka lakukan di tingkat kabupaten.

Di luar tiga sarana dan prasarana fisik, pada tahun 2010, COREMAP Kabupaten Lingga juga memberikan bantuan sarana kebersihan lingkungan, yaitu tempat dan gerobak sampah untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir. Penyediaan sarana kebersihan ini dimaksudkan agar masyarakat sedikit demi sedikit dapat merubah perilaku untuk tidak lagi membuang sampah ke laut. Kenyataan banyaknya sampah di bawah rumah panggung hampir di semua kawasan permukiman penduduk yang berdiri di atas pantai menggambarkan perilaku penduduk yang tidak sehat kaitannya dengan sanitasi lingkungan. Namun, merubah perilaku bukan pekerjaan mudah dan memerlukan proses yang sangat lama, hal ini terlihat dari rendahnya tingkat penggunaan bak penampungan sampah. Sudah hampir satu tahun bak penampungan sampah disediakan, tetapi kondisinya terlihat masih baik, mencerminkan bak tersebut jarang dipakai.

Selain pembangunan sarana fisik, COREMAP II juga memberikan bantuan kendaraan bermotor roda dua yang dilengkapi dengan bak di bagian belakang untuk mengangkut barang (masyarakat lebih sering menyebut dengan istilah *kaisar*). Bantuan sarana pengangkut barang ini diberikan pada akhir tahun 2010. Kaisar dikelola oleh LPSTK, yakni dengan menyewakannya kepada masyarakat, yang pada umumnya untuk mengangkut barang belanjaan ataupun papan kayu. Biaya sewa berkisar antara Rp 20 ribu hingga Rp 50 ribu bergantung pada jarak yang ditempuh. seperti dikemukakan oleh ketua LPSTK berikut ini:

“.....kalau kaisar, kita dari LPSTK tidak menentukan, kalau muat itu jarak agak jauh makan 2 botol minyak dia akan muat papan 20 keping itu kami minta 40 ribu untuk kas. Ada 20 ribu ada 40 ribu ada 50 ribu. Sebulan paling-paling kadang kami dapat lebih, sebulan itu paling tinggi 200 ribu paling rendah 50 ribu”.

Hasil usaha persewaan sepenuhnya dikelola LPSTK, seperti halnya dengan hasil persewaan peralatan milik Pokmas Jender. Meskipun masuk ke kas LPSTK, tetapi administrasi keuangan cukup baik sehingga dapat ditelusuri setiap pemasukan dan sumbernya. Pada saat penelitian berlangsung kondisi *kaisar* (fisik maupun mesin) masih terlihat sangat baik, mungkin karena belum lama diterima dan dimanfaatkan. Perawatan sangat diperlukan sehingga dapat digunakan secara berkesinambungan.

Pemilihan lokasi penempatan bantuan fisik tersebut mempertimbangkan ketersediaan lahan, kondisi laut, dan sarana yang sudah ada. Misalnya, bangunan tambatan perahu membutuhkan kedalaman air tertentu dan pada kenyataannya terdapat di lokasi yang sekarang ada tambatan perahu. Demikian pula pembangunan MCK dipilih di lokasi sekarang karena COREMAP tinggal memberikan biaya untuk rehabilitasi, karena sebelumnya sudah ada sumur dan kamar mandi yang kondisinya bangunannya buruk. Sementara itu, untuk bangunan pondok informasi yang berada di tepi pantai dan berdekatan dengan tambatan perahu adalah juga merupakan kesepakatan bersama oleh pengurus COREMAP II dan disetujui oleh aparat Desa Limbung.

Gambar 4.4
Moda Transportasi (Kaisar) yang Disewakan Oleh LPSTK



Meskipun demikian, kesemua bantuan sarana-prasarana fisik maupun transportasi barang tersebut berada/disediakan oleh masyarakat di dusun Air Berani (dalam konteks luas termasuk dalam dusun I-Centeng). Terkonsentrasinya bantuan di satu tempat tersebut menimbulkan sedikit kecemburuan dari masyarakat yang tidak mendapat bantuan COREMAP II, seperti di dusun Air Kelat dan Sungai Nona. Kecemburuan sosial tersebut dapat dirasakan oleh aparat desa maupun penduduk penerima bantuan COREMAP II, seperti terungkap dalam diskusi kelompok dengan para ketua dan anggota pokmas dan perangkat Desa Limbung berikut ini:

“...Seharusnya program itu ya untuk satu desa, desa Limbung kan. Tapi kalau yang saya lihat COREMAP Desa Limbung hanya ada di Centeng saja (termasuk dusun Air Berani), harusnya di semua dusun di Desa

Limbung. Terlebih (dusun) Air Kelut yang ada DPL nya. COREMAP itu berjalan di satu dusun bukan satu desa. Kalau tidak semua kampung merata, apalagi di Air Kelut, terlebih DPL nya di tempat dia akan susah. Dia tidak mau bantu jaga DPL. Memang dia tidak perlu tambatan perahu, tapi kan mestinya juga dapat bantuan sarana sosial lainnya, misalnya MCK. Kalau tambatan perahu, yang butuh itu di dusun Air Nona. Ini semua ada di Centeng (perangkat Desa Limbung).

“.....Kalau sekarang saya juga, secara kita orang desa merasa tak adil juga bu, untuk kami di dusun satu ini Alhamdulillah lah kantor (pondok informasi) di sini, tambatan perahu juga di sini, MCK di sini, MPA di sini. Bayangkan pikiran masyarakat di sana (dusun-dusun lain). Sebab milik COREMAP ini yang paling berperan yang penting itu di sana, karena wilayah terumbu karang kita ada disana. Semestinya masyarakat disana juga dapat ya bu”. (diskusi kelompok dengan Ketua dan Anggota Pokmas Desa Limbung).

Permasalahan ini diharapkan mendapat tanggapan dari pengurus COREMAP II di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten untuk menghindari munculnya ketidakpedulian masyarakat di dusun lain terhadap pelestarian ekosistem terumbu karang, terlebih DPL berada jauh dari dusun Centeng dan Air Berani yang merupakan pusat kegiatan COREMAP II. Sebaliknya, masyarakat di dekat lokasi DPL, yaitu di dusun Air Kelat tidak dilibatkan sama sekali dalam kegiatan COREMAP II.

4.2. Kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut

Menurut DKP-COREMAP II (2008), aspek pengawasan berbasis masyarakat (Siswasmas), disebut juga dengan *Monitoring, Control, dan Surveillance* (MCS)⁷ sangat penting dan paling cocok diterapkan dalam pengelolaan terumbu karang yang bertanggung jawab untuk pemanfaatan yang lestari. Pengawasan terumbu karang dengan partisipasi aktif masyarakat tersebut merupakan faktor yang kondusif untuk menjaga dan melestarikan terumbu karang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Pengawasan mandiri oleh masyarakat sangat membantu komponen MCS, dan pengelola COREMAP II di tingkat kabupaten pada umumnya, karena melalui pengawasan mandiri tersebut, segala bentuk pelanggaran terhadap wilayah terumbu karang, atau yang dikenal dengan daerah perlindungan laut (DPL) dapat diketahui dengan cepat sehingga bisa diambil tindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, atau paling tidak sanksi sosial di tempat pelanggaran. Tindakan hukum dan sanksi sosial terhadap pelaku pelanggaran diharapkan memberikan efek jera yang selanjutnya berdampak pada keberhasilan upaya rehabilitasi dan pelestarian terumbu karang. Ini juga memberikan arti bahwa ada jaminan terhadap keberlangsungan mata pencaharian dan pendapatan masyarakat.

⁷ DKP-COREMAP II (2008) mengartikan pengawasan/*monitoring* merupakan kegiatan pengumpulan dan analisis data untuk menilai tingkat pemanfaatan dan kelimpahan sumber daya terumbu karang, termasuk tingkat pelanggaran dan pemanfaatan terumbu karang. *Control* adalah mekanisme pengaturan/pengendalian antara lain mencakup penyusunan/pemberlakuan peraturan perundang-undangan, perijinan, pembatasan alat tangkap, maupun zonasi penangkapan. *Surveillance* adalah kegiatan operasional dalam rangka menjamin ditaatinya peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam pengelolaan terumbu karang.

Di kampung binaan Desa Limbung Kabupaten Lingga, pengawasan berbasis masyarakat dilakukan secara kelembagaan maupun mandiri oleh masyarakat. Secara kelembagaan, COREMAP II membentuk Pokmas Pengawasan (Pokmaswas). Pokmas ini menjalankan kegiatan pengawasan, pemantauan, dan penjagaan kawasan terumbu karang, khususnya DPL. Kewenangan dari anggota Pokmaswas adalah melakukan pengawasan secara terus menerus, melakukan tindakan langsung di lapangan (menginformasikan dugaan terjadinya aktivitas perikanan yang *illegal* atau destruktif melalui radio komunikasi kepada petugas lapangan, melaporkan kejadian yang dilihat/diketahui kepada pos pengawasan terdekat, dan menangkap kegiatan *illegal*). Suatu kewenangan yang cukup luas, tetapi pada kenyataannya mereka memiliki fasilitas yang minim. Pokmaswas di semua lokasi penelitian tidak/belum dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan pengawasan, seperti radio komunikasi, GPS untuk mengetahui posisi astronomi, bahkan biaya operasional untuk kegiatan pengawasan.

Pada tahun 2007, Pokmaswas telah menerima bantuan pompong dengan dua mesin dari COREMAP kabupaten yang diharapkan dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan DPL. Namun, pompong tersebut lebih banyak dimanfaatkan bukan untuk pengawasan karena tidak mendapat bantuan biaya bahan bakar minyak. Menurut informasi dari masyarakat, pompong sering dipakai untuk sarana transportasi ke luar desa, baik oleh pengurus COREMAP maupun warga masyarakat. Biaya bahan bakar ditanggung oleh pemakai, tetapi tidak diketahui dengan pasti apakah pengurus mendapat biaya sewa. Kemudian pada tahun 2010, Pokmaswas juga mendapat bantuan *speed boat* dengan mesin berkapasitas 40 PK, tetapi seperti halnya dengan pompong, *boat* ini juga banyak mengganggu, lagi-lagi karena alasan biaya operasional. Bantuan pompong maupun *speed boat* tersebut di bawah pengelolaan LPSTK, bukan oleh Pokmaswas. Berdasar

informasi dari masyarakat, boat juga dipakai untuk memfasilitasi kegiatan COREMAP, baik di dalam desa maupun di luar desa (seperti mengantar pengurus COREMAP kabupaten ke desa Sekanah), misalnya diungkapkan oleh seorang anggota masyarakat berikut.

*“.....Jadi sama sekali tak pernah dapat troli, padahal ada boat sampai ada dua biji, pompong satu, speed satu tak pernah dipakai, dipakai untuk pergi saja, ke Pancur, ke Penaah yang ada kegiatan macam ini lah”
(Lrh, nelayan Desa Limbung).*

Keterbatasan pengawasan oleh pokmaswas tersebut mendapat kritikan dari anggota masyarakat, bukan hanya karena anggota Pokmaswas yang malas karena tidak ada biaya operasional, tetapi juga karena tidak ada kerjasama yang baik antara masyarakat (khususnya Pokmaswas) dengan pengurus COREMAP Kabupaten Lingga. Kondisi ini sangat berbeda dengan kegiatan pengawasan pada fase I. Menurut salah seorang mantan anggota *reefwacher* COREMAP I, pengawasan DPL dilakukan secara rutin, baik yang dilakukan masyarakat sendiri maupun Pokmaswas. Masyarakat bekerjasama dengan aparat setempat untuk menjaga kelestarian laut, khususnya terumbu karang. Lebih lanjut dikemukakan bahwa sebelum ada implementasi COREMAP banyak terjadi pelanggaran yang menurut masyarakat Desa Limbung, sebagian besar pelanggar berasal dari luar desa. Pelanggaran yang berupa penggunaan alat tangkap yang merusak, seperti *trawl* mini, parit gamat, sampai dengan perusakan wilayah bakau sering terjadi, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga Desa Limbung dalam wawancara terbuka berikut ini :

“.....Kalau saya nengok-nengok Bu, program ini beda dengan yang dulu, fase I dengan fase II ini. Kalau fase I untuk lingkungan ini terjaga, karena kami menangkap orang yang merusak itu karang, habitat laut itu Bu

bukannya sekali dua nangkap langsung masukkan ke sini, sekali kami nangkap bu sampai enam boat, yang banyak dari luar desa. Banyaklah kalau yang dulu, yang sekarang ini kalau saya nengok-nengok ini macam agak lamban ini program lingkungannya. Sekarang ini yang mengawasi hanya nelayan yang melaut sampai di dekat DPL sana. Ini jumlahnya tidak banyak karena nelayan sini hanya pasang bubu dan jaring di pantai-pantai sini saja” (LR, mantan anggota kelompok “Reefwatcher” COREMAP I Desa Limbung).

Kekosongan kegiatan pengawasan oleh Pokmaswas diisi oleh pengawasan mandiri. Kegiatan pengawasan mandiri tersebut dilakukan oleh nelayan bersamaan dengan kegiatan melaut yang umumnya dilakukan pada siang hari, seperti dikemukakan dalam wawancara terbuka berikut ini:

“.....Sekarang yang aktif pengawasan masyarakat. Pengawasan masyarakat modelnya seperti ini, misalnya ada yang ke laut kalau ada yang mereka lihat seperti penebangan bakau, pengeboman, tetapi disini tak ada pengeboman jadi mereka menyampaikan setiap ada orang yang tidak sama peralatan kita di sini, jadi dia sampaikan ke kami, ke masyarakat jadi sampai menyampailah” (KMZ, nelayan dusun Air Berani).

Keterlibatan aktif masyarakat tersebut menggambarkan bahwa mereka cukup peduli terhadap pengelolaan terumbu karang. Hal ini antara lain karena penetapan DPL di desa Limbung sudah memiliki dasar hukum, yaitu peraturan desa sehingga masyarakat tidak ragu-ragu untuk turut serta melakukan pengawasan dan melakukan larangan-larangan terhadap aktivitas pemanfaatan sumber daya laut dengan dasar yang jelas. Namun, pada kenyataannya pengawasan

mandiri oleh masyarakat tersebut tampaknya belum efektif untuk mengurangi tindakan pengambilan sumber daya laut dengan peralatan yang merusak.

Pelanggaran masih sering terjadi, terutama pada saat nelayan sedang tidak melaut, biasanya pada malam hari. Persoalan tersebut sebenarnya bisa dihindari apabila COREMAP II melibatkan masyarakat sekitar DPL untuk pengawasan. Walau tidak sedang melaut, masyarakat di sekitar DPL dapat mengetahui kejadian pelanggaran yang terjadi karena DPL terletak cukup dekat dengan permukiman mereka. Namun, mereka kurang peduli atau bahkan tidak peduli, kemungkinan besar karena masyarakat di dusun yang berdekatan dengan DPL tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan COREMAP II. Terlebih tanda-tanda batas DPL yang dipasang pada tahun 2010 bertuliskan CENTENG, bukan LIMBUNG. Kenyataan ini membuat masyarakat di dusun sekitar DPL semakin tidak mempedulikan pelanggaran nelayan dari luar, bahkan juga dalam desa yang melaut hingga masuk di DPL, bahkan terkadang juga menggunakan alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Padahal pada saat ini semua anggota Pokmaswas berasal dari dusun Centeng, bahkan kapal patroli juga berada di dusun ini yang terletak cukup jauh dari DPL sehingga kejadian pelanggaran sulit diketahui. Demikian pula pengawasan mandiri oleh masyarakat peserta program yang pada umumnya juga dilakukan di dusun Centeng tidak bisa berbuat apa-apa jika ada pelanggaran penggunaan alat-alat tangkap yang merusak di kawasan DPL. Bahkan pada siang hari, sering nelayan tidak bisa menangkap pelanggar karena pelanggar pada umumnya menggunakan kapal bermesin besar, sedangkan nelayan hanya menggunakan sampan atau perahu mesin tempel ukuran kecil (10 dan 15 PK). Terlepas dari permasalahan dan kendala tersebut, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti perlindungan sumber daya laut yang sangat berarti bagi

kehidupan masyarakat pada masa sekarang dan generasi yang akan datang.

4.3. Persepsi Masyarakat Tentang Manfaat COREMAP

Telah dikemukakan di atas, bantuan fisik dan non fisik telah diberikan COREMAP II ke masyarakat di Desa Limbung, walau masih dalam lingkup yang terbatas karena bantuan tersebut terkonsentrasi di satu tempat. Bantuan-bantuan ini diharapkan sebagai dorongan bagi masyarakat untuk berswadaya terhadap kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman di lingkungannya, tetapi tentunya jika sarana dan prasarana fisik serta bantuan non fisik tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Berdasarkan hasil survei BME Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang pada tahun 2011 diketahui bahwa bantuan sarana dan prasarana fisik serta pelestarian lingkungan telah memberikan manfaat bagi mereka. Data pada Tabel 4.1 memperlihatkan, hanya sedikit responden yang menyatakan bahwa bantuan-bantuan tersebut tidak bermanfaat, dan itupun hanya untuk jenis bantuan MCK, yaitu ada sekitar 14,7 responden yang menyatakan tidak bermanfaat.

Dilihat menurut jenis bantuan, data pada tabel 4.1 menunjukkan, kira-kira sepertiga dari total responden mengatakan bahwa bantuan tambahan perahu sangat bermanfaat dan dalam proporsi hampir sama yang menyatakan bermanfaat (lihat Tabel 4.1). Hanya empat persen yang menyatakan tidak bermanfaat. Temuan ini mengindikasikan bahwa tambahan perahu merupakan bantuan fisik yang sangat dibutuhkan oleh mereka, baik nelayan maupun bukan nelayan, karena mereka yang bukan nelayan juga memerlukan jenis sarana fisik ini untuk bisa naik ke pompong yang akan membawa mereka ke Pancur atau dusun dan desa lain.

Bagi nelayan, tambatan perahu bantuan COREMAP memberikan manfaat untuk menambatkan perahu maupun memudahkan nelayan mencapai wilayah tangkap, terutama pada saat air surut. Dengan jembatan sepanjang 200 meter, nelayan tidak harus mengarungi lumpur pada saat air laut surut sehingga sangat meringankan nelayan, terutama pada saat pulang dengan membawa hasil tangkapan. Informasi yang diperoleh dari wawancara terbuka dengan seorang nelayan berikut menggambarkan manfaat dari tambatan perahu/dermaga.

“.....Manfaat jembatan. Sangat-sangat membantu lah bu, soalnya contohnya waktu air surut kalau dulu kan sebelum ada jembatan ini kan ngarung lumpur mau yampe ke perahu kan. Nah waktu dengan adanya jembatan dengan panjangnya segitu kan jauhnya Alhamdulillah kita gak ngarung.....” (Jrh, Warga di dusun Air Berani).

Keberadaan tambatan perahu tersebut bahkan juga bermanfaat bagi penduduk luar desa yang datang atau melewati Desa Limbung, karena dapat dimanfaatkan untuk menambatkan pompong mereka. Walau sebelumnya sudah ada tambatan perahu di dusun Centeng, namun bertambahnya tambatan perahu bantuan COREMAP II semakin memudahkan masyarakat untuk memilih menyimpan pompongnya.

Bantuan tambatan perahu berdasar persepsi masyarakat memang memberikan manfaat paling besar dibanding dengan jenis bantuan lain, seperti *boat* untuk pengawasan maupun sarana kebersihan (tempat MCK). Hal ini digambarkan dari data pada tabel 4.1, sebanyak 73,4 persen menyatakan bahwa tambatan perahu sangat bermanfaat dan bermanfaat. Nilai proporsi ini paling tinggi dibanding responden yang menyatakan MCK dan kapal patroli sangat

bermanfaat dan bermanfaat, masing-masing sekitar 45,3 persen dan 54,3 persen.

Tabel 4.1
Manfaat Pembangunan Sarana Fisik dan Lingkungan di Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga (Persen)

<i>Manfaat Kegiatan COREMAP</i>	<i>Sangat bermanfaat</i>	<i>Bermanfaat</i>	<i>Cukup bermanfaat</i>	<i>Kurang bermanfaat</i>	<i>Tidak bermanfaat</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Total</i>
Pembangunan/Perbaikan Sarana Fisik dan Lingkungan							
Sarana ekonomi (tambatan perahu)	34,7	38,7	12	10,7	4	0	100,0
Pelestarian							
Lingkungan (kapal patroli beserta perlengkapannya)	9,3	45,3	28	17,3	0	0	100,0
Pembangunan/perbaikan sanitasi lingkungan (MCK)							
Pembangunan/perbaikan sarana sosial	5,3	10,7	1,3	0	8,0	74,7	100,0

Sumber: Survei BME Aspek Sosial-Ekonomi, PPK-LIPI, 2011

Manfaat MCK yang dinyatakan lebih sedikit responden dibanding manfaat tambatan perahu mungkin karena sarana kebersihan ini hanya dimanfaatkan oleh penduduk di sekitar bangunan. Penduduk dari lokasi yang sedikit jauh dari lokasi MCK pada umumnya hanya memanfaatkan sumur sebagai sumber air bersih ketika musim kemarau, karena pada musim ini debit air hidran menjadi berkurang, bahkan kering. Penduduk yang mengambil air sumur di lokasi yang sama dengan bangunan MCK tersebut juga hanya dilakukan oleh penduduk dari dusun Air Berani dan Centeng, seperti diungkapkan berikut ini.

“.....Yang memanfaatkan dari daerah-daerah sekitar Air berani, atau Centeng saja. Kalau musim kering ada orang jauh yang datang ke sini, daerah Pangkalan buluh, kalau Seranggas tidak pernah. Sumur di sini

tidak pernah kering bu, jadi dusun lain yang tidak ada air datang ke sumur ini. Mereka ambil air dan kadang juga mencuci” (Ibu Yt, Warga dusun Air Berani).

Informasi kualitatif tersebut nampaknya sejalan dengan hasil survei yang menunjukkan sebanyak 22,7 persen responden mengatakan bantuan MCK kurang bermanfaat dan tidak bermanfaat sebesar 14,7 persen. Diperkirakan, responden yang mengemukakan jawaban tersebut adalah mereka yang tidak pernah memanfaatkan sarana MCK maupun sumur bantuan COREMAP tersebut. Sebaliknya, bagi responden yang mengatakan manfaat dari MCK pada umumnya di sekitar lokasi MCK dan sumur sehingga bisa memanfaatkan setiap hari, antara lain diungkapkan oleh salah satu informan berikut ini.

“.....Dengan adanya MCK sangatlah membantu, kalau dulu kan hanya pakai papan. Kami sangat bersyukurlah dibantu.....” (Ibu Yt, Warga dusun Air Berani).

Informasi kualitatif tersebut menggambarkan bahwa kedekatan geografis terhadap lokasi sarana-prasarana fisik menentukan dalam tinggi-rendahnya pemanfaatan, walau faktor kebutuhan juga sangat penting. Artinya, bantuan sarana yang dibutuhkan warga memengaruhi tingginya pemanfaatan. Sebaliknya, walau ada sarana-prasarana yang dekat dengan tempat tinggal, tetapi masyarakat sudah memiliki sendiri, maka pemanfaatannya juga rendah.

Sementara itu, bantuan boat yang ditujukan untuk memfasilitasi kegiatan pengawasan (patroli) DPL, nampaknya dipandang masyarakat sebagai bantuan yang bermanfaat (45,3 persen), dan 9,3 persen sangat bermanfaat. Suatu kondisi yang patut dipertanyakan karena sarana pengawasan DPL ini lebih sering “berlabuh” daripada digunakan. Ada kemungkinan responden yang menjawab bermanfaat tersebut adalah para anggota pokmas yang telah mendapat bantuan

KJT sehingga menganggap bahwa bantuan COREMAP yang jarang dimanfaatkan dinyatakan sebagai bermanfaat. Disamping itu, ada kemungkinan masyarakat juga memiliki kekhawatiran kalau mereka menyatakan tidak bermanfaat, *speed boat* akan ditarik kembali oleh pemerintah. Walau tidak dipakai melaut, tetapi masyarakat bisa meminjam jika diperlukan. Namun, tidak seperti pompong, biaya bahan bakar untuk *speed boat* jauh lebih mahal sehingga sangat jarang warga yang meminjam *speed boat* tersebut.

Berkaitan dengan kegiatan pelestarian ekosistem laut lainnya adalah kegiatan penyadaran masyarakat (*public awareness*). Kegiatan penyadaran masyarakat di Desa Limbung dilakukan melalui sosialisasi pelestarian terumbu karang dan penyediaan pondok informasi. Kedua kegiatan COREMAP II ini memberikan manfaat cukup luas pada masyarakat Desa Limbung. Hal ini terlihat dari jawaban responden tentang manfaat kegiatan sosialisasi terumbu karang yang mencapai 61,3 persen bermanfaat dan 12 persen menyatakan sangat bermanfaat. Sebaliknya, persentase responden yang menjawab sangat bermanfaat untuk penyediaan pondok informasi mencapai 42,7 persen dan yang bermanfaat 29,3 persen (Tabel 4.2).

Kegiatan penyadaran masyarakat yang dilakukan sejak COREMAP I telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan alat tangkap yang merusak. Adanya kegiatan ini menambah pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap pemanfaatan pelestarian terumbu karang karena secara nyata dapat menumbuhkan keinginan masyarakat untuk menjaga DPL yang selanjutnya berdampak pada peningkatan hasil tangkapan sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Namun, kegiatan sosialisasi penyadaran masyarakat sebenarnya cenderung menurun pada COREMAP II, diindikasikan oleh sedikitnya papan/baliho dan poster yang berisi tentang informasi

pelestarian terumbu karang di tempat-tempat umum. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara formal (misalnya tatap muka dengan warga masyarakat) cenderung terkonsentrasi di dusun satu, itupun juga terbatas pada anggota kelembagaan COREMAP II (LPSTK dan Pokmas). Namun, secara informal, sosialisasi pelestarian terumbu karang tersebar dari mulut ke mulut sehingga masyarakat mengetahui program tersebut. Dengan dibangunnya pondok informasi yang baru, sosialisasi program dilakukan dengan memasang poster pada dinding dalam pondok informasi. Hal ini tentunya bukan cara yang efektif untuk kegiatan sosialisasi mengkampanyekan program COREMAP, khususnya pelestarian terumbu karang.

Tabel 4.2
Manfaat Kegiatan Penyadaran Masyarakat (PA) di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga (Persen)

<i>Manfaat Kegiatan COREMAP</i>	<i>Sangat ber-manfaat</i>	<i>Ber-manfaat</i>	<i>Cukup ber-manfaat</i>	<i>Kurang ber-manfaat</i>	<i>Tidak ber-manfaat</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Total</i>
Kegiatan Penyadaran Masyarakat (PA)							
Sosialisasi pelestarian terumbu karang	12	61,3	24	0	1,3	1,3	100
Penyediaan Pondok Informasi	42,7	29,3	22,7	4	1,3	0	100

Sumber: Survei BME Aspek Sosial-Ekonomi, PPK-LIPI, 2011

Sementara itu, tingginya proporsi responden yang menjawab sangat bermanfaat terhadap kegiatan penyediaan pondok informasi kemungkinan besar dijawab oleh mereka yang sering memanfaatkan sarana ini, yaitu para anggota pokmas. Dikemukakan dalam diskusi kelompok bahwa untuk kegiatan pertemuan antara anggota Pokmas dan LPSTK dilakukan di pondok informasi. Meskipun pondok informasi sampai saat ini tidak dipakai untuk tempat pertemuan yang

tidak ada kaitannya dengan kegiatan COREMAP, namun pondok informasi bisa dipakai oleh anggota masyarakat sepanjang bertujuan untuk kepentingan bersama.

Selain kegiatan pembangunan sarana prasarana fisik dan lingkungan serta penyadaran masyarakat, terdapat juga kegiatan pengawasan laut baik berupa penetapan DPL, patroli oleh pengurus Pokmaswas maupun pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Persepsi masyarakat terkait kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan hasil yang berbeda polanya. Dari tiga kegiatan penetapan DPL dan pengawasan tersebut, pengawasan oleh masyarakat dinyatakan oleh hampir separuh jumlah responden sebagai kegiatan yang sangat bermanfaat. Namun anehnya, penetapan DPL sebagai daerah terlarang untuk aktifitas melaut dinyatakan oleh 41,3 persen dari 75 orang responden sebagai kegiatan yang kurang bermanfaat (Tabel 4.3). Suatu kondisi yang bertolak belakang sehingga pengawasan oleh masyarakat yang dianggap oleh sebanyak 42,3 persen sebagai kegiatan yang bermanfaat kemungkinan bukan hanya sekedar untuk mengawasi dan melindungi DPL, tetapi lebih kepada alasan untuk kepentingan mereka. Artinya, pengawasan oleh masyarakat lebih ditujukan untuk melindungi alat-alat tangkap mereka (terutama jaring dan bubu) agar tidak terkena garukan parit gamat dan *trawl* mini yang sekarang ini dipakai lagi oleh nelayan dalam maupun luar desa di wilayah tangkap sekitar DPL, bahkan juga masuk ke DPL. Ungkapan seorang nelayan di dusun Centeng menggambarkan kegiatan pengawasan oleh masyarakat yang cenderung ditujukan untuk kepentingan nelayan sendiri, yaitu sebagai berikut.

“.....yang masalah pengawasan (masyarakat) itu begini, orang itu mengawasi karena kadang ada yang jaring atau bubu yang dia punya hilang. Nah disitu baru dia tuntutan mencari pelakunya tadi jadi untuk pengawasan betul-betul menjaga itu tak ada bu, jadi

pengawasan untuk dirinya sendiri, mana yang punya jaring merentang ke laut atau pasang bubu itu biar aman dari gangguan parit (gamat) atau trawl (mini). Sampai sekarang yang marit banyak bu tetapi termasuk diam lah, yang marit itu dapat uang berjuta-juta sementara kelong, jaring orang habis (Lrh, nelayan dusun Centeng).

Informasi kualitatif tersebut dapat dipahami karena DPL terletak jauh dari permukiman penduduk yang menjadi target program, sehingga pengawasan yang bertujuan untuk mengawasi daerah perlindungan tersebut cukup sulit, terlebih kebanyakan nelayan tidak memiliki perahu motor. Demikian pula tidak banyak yang melaut hingga mencapai wilayah tangkap sekitar DPL. Hanya nelayan yang mempunyai pompong yang dapat melaut sampai wilayah tangkap tersebut.

Kegiatan patroli oleh pengurus Pokmaswas dinyatakan tidak ada oleh kira-kira duapertiga dari jumlah responden. Suatu kenyataan yang sangat disayangkan karena COREMAP II sudah memberikan bantuan pompong maupun *speed boat* yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk patroli. Namun, karena alasan tidak mendapat bantuan biaya bahan bakar minyak, maka anggota Pokmaswas tidak melakukan tugas pengawasan. Sejak pertengahan tahun 2010, anggota Pokmaswas menjalani usaha KJT, jauh dari tujuan dibentuknya pokmaswas pengawasan.

Tabel 4.3
Manfaat Kegiatan Pengawasan Laut di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara,
Kabupaten Lingga (Persen)

<i>Manfaat Kegiatan COREMAP</i>	<i>Sangat bermanfaat</i>	<i>Bermanfaat</i>	<i>Cukup bermanfaat</i>	<i>Kurang bermanfaat</i>	<i>Tidak bermanfaat</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Total</i>
Manfaat Kegiatan Pengawasan Laut							
Penetapan DPL	12	24	6.7	41.3	9.3	6.7	100
Patroli oleh pengurus pokmaswas	1.3	5.3	10.7	9.3	8	65.3	100
Pengawasan oleh masyarakat	45.3	37.3	8	1.3	1.3	6.7	100

Sumber: Survei BME Aspek Sosial-Ekonomi, PPK-LIPI, 2011

Berdasar dari uraian di atas, secara ringkas dapat dikatakan bahwa kegiatan COREMAP II yang menurut kebanyakan responden bermanfaat dan sangat bermanfaat adalah kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, alasan ikut menikmati bantuan atau terlibat dalam kegiatan kemungkinan besar juga memengaruhi tingginya proporsi responden yang menyatakan sangat bermanfaat dan bermanfaat atas bantuan atau kegiatan tersebut.

5

PENUTUP

Desa Limbung merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Lingga di provinsi Kepulauan Riau. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya dari sumber daya hayati laut sehingga terumbu karang mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Padahal sudah bertahun-tahun ekosistem terumbu karang secara terus-menerus mendapat tekanan akibat berbagai aktivitas manusia. Eksploitasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup seringkali tidak memperhatikan kelestariannya, misalnya menangkap teripang dengan parit gamat dan menangkap ikan dengan *trawl* mini. Merespon permasalahan ini, pemerintah Kabupaten Lingga melakukan kegiatan rehabilitasi dan pelestarian terumbu karang melalui program COREMAP. Program nasional ini didanai oleh Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank-ADB*) dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan sebagai *executing agency*. Program yang telah dilakukan dalam dua tahap, pada tahun 2011 telah memasuki tahun terakhir tahap II. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan bukan hanya berkaitan dengan upaya pelestarian terumbu karang (misalnya penetapan DPL dan memberikan fasilitas untuk kegiatan pengawasan), tetapi juga kegiatan pemberdayaan ekonomi beserta sarana-prasarana fisik untuk mendukung kegiatan ekonomi penduduk. Upaya memberdayakan ekonomi penduduk tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap ekosistem terumbu karang sehingga perbaikan kondisi terumbu karang dapat terwujud dan memberikan dampak positif bagi kelangsungan sumber penghidupan masyarakat, khususnya nelayan.

Berbagai kegiatan COREMAP II di Desa Limbung telah memberikan manfaat ekonomi maupun sosial, walau juga masih menghadapi sejumlah kendala. Sejauh ini pencapaian program COREMAP II nampak nyata pada aspek penguatan kelembagaan, pengelolaan berbasis masyarakat, dan pengembangan kawasan konservasi. Sementara itu, pada kegiatan penyadaran masyarakat masih ada sejumlah kelemahan, diindikasikan oleh penurunan tingkat kepedulian masyarakat terhadap perlindungan dan pelestarian terumbu karang, khususnya di daerah perlindungan laut (DPL).

Kelembagaan COREMAP di Desa Limbung yang meliputi LPSTK dan Pokmas telah menjalani kegiatannya dengan cukup baik. Selain telah berhasil memfasilitasi terbentuknya beberapa kelompok masyarakat (Pokmas), penyusunan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK), dan penetapan Peraturan Desa (Perdes), LPSTK juga mengkoordinasi kegiatan MPA yang dilakukan Pokmas, bahkan juga mengelola usaha persewaan peralatan milik Pokmas Jender. Kegiatan yang terakhir ini diambil alih oleh LPSTK karena Pokmas Jender dinilai tidak berhasil dalam mengelola usaha. Sementara itu, Pokmas yang mengembangkan MPA telah mencapai 10 kelompok, delapan diantaranya sudah memetik hasil usaha, sedangkan dua lainnya baru menjalani usaha beberapa bulan yang lalu. Capaian hasil MPA cukup baik, ditunjukkan oleh hasil panen pada tahun 2011 yang kebanyakan mencapai separuhnya dari modal awal (32 juta rupiah untuk satu unit KJT), bahkan ada satu pokmas yang memperoleh sebesar 82,8 persen dari modal awal. Keberhasilan kegiatan MPA juga ditunjukkan oleh cukup besarnya uang kas yang terkumpul di LPSTK, yaitu sebanyak 20,05 juta rupiah pada bulan Juni 2011, sebagian besar berasal dari hasil pembayaran cicilan pokmas-pokmas yang sudah berhasil panen budidaya ikan kerapu dengan KJT.

Selain sudah dapat membayar cicilan bantuan modal yang nantinya akan dijadikan dana bergulir, anggota pokmas juga telah

memperoleh tambahan pendapatan, meskipun pada umumnya hanya memperoleh kurang lebih satu juta per orang untuk sekali panen (8-9 bulan). Hasil panen tersebut semestinya dapat lebih besar lagi apabila semua anggota pokmas dapat bekerja lebih optimal, yaitu memberi makan yang cukup dan teratur. Perawatan ikan juga menjadi penyebab rendahnya hasil panen, diindikasikan oleh tingkat kematian ikan yang cukup tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa anggota kelompok belum memahami dengan baik tentang pengelolaan usaha berkelompok maupun teknis usaha budidaya ikan.

Kehidupan masyarakat nelayan Desa Limbung pada umumnya bersifat individual. Kalaupun ada nelayan yang menjalin kerja dengan orang lain, adalah mereka yang mempunyai pinjaman kepada pembeli hasil tangkapan, tetapi itupun dalam jumlah yang tidak banyak. Kerja kelompok antara nelayan dengan nelayan sangat jarang ditemukan. Nelayan pada umumnya bekerja sendiri atau dengan bantuan anggota rumah tangga. Pola kerja semacam ini membuat mereka menghadapi kesulitan untuk melaksanakan kegiatan usaha mata pencaharian alternatif yang harus dilakukan secara berkelompok. Sifat kerja individu masih sangat menonjol pada anggota pokmas. Kerja sama dan saling membantu masih jauh dari relasi kerja antar anggota kelompok. Misalnya, untuk saling menggantikan jika ada anggota kelompok lain yang tidak bisa mengerjakan kewajibannya masih sulit diwujudkan. Sebaliknya, jika ada satu anggota yang malas untuk bekerja justru membuat anggota lain menirunya. Suatu keadaan yang sangat tidak kondusif untuk pengembangan usaha berkelompok. Terkait dengan persoalan rendahnya pengetahuan teknis budidaya ikan kemungkinan besar karena anggota pokmas pada umumnya mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh COREMAP. Peserta pelatihan adalah ketua LPSTK dan dua orang anggota pokmas. Walau mereka kemudian menularkan pengetahuan kepada anggota pokmas

yang lain, namun nampaknya tidak dapat dipahami dengan baik sehingga memengaruhi kurang baiknya perawatan ikan.

Rendahnya hasil panen budidaya ikan kerapu dengan KJT akibat tingginya tingkat kematian dan tumbuh kembang ikan yang tidak optimal menyebabkan nilai perolehan hasil panen juga rendah. Tambahan pendapatan dari hasil MPA yang masih rendah tersebut menyebabkan nilai pendapatan rumah tangga maupun per kapita rumah tangga pokmas lebih kecil daripada nilai pendapatan rumah tangga bukan pokmas. Demikian pula perubahan pendapatan rumah tangga pokmas juga lebih rendah daripada bukan pokmas. Selain karena tambahan pendapatan dari usaha budidaya kelompok yang masih sedikit, mayoritas anggota pokmas bekerja sebagai nelayan dengan kapasitas penangkapan terbatas sehingga berpenghasilan rendah. Sebaliknya, sebagian rumah tangga bukan pokmas adalah warga desa keturunan Cina yang memiliki usaha toko atau kedai dengan skala usaha cukup besar sehingga mempengaruhi lebih besarnya nilai pendapatan rata-rata bukan anggota pokmas. Namun, pendapatan anggota pokmas yang rendah tersebut diharapkan semakin bertambah di masa depan, terutama apabila mereka dapat meningkatkan relasi kerja dengan anggota kelompoknya. Dengan hasil panen yang rata-rata telah mencapai lebih dari 50 persen dari modal awal satu unit KJT diharapkan dapat menjadi faktor pendorong pokmas untuk meningkatkan usaha budidaya KJT menjadi usaha MPA yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga yang semakin meningkat.

Pada kurun waktu satu tahun terakhir (2010-2011) kenaikan pendapatan rumah tangga mencapai 61,28 persen, padahal periode satu tahun sebelumnya terjadi penurunan cukup tajam, yaitu (-) 44,6 persen. Peningkatan pendapatan pada periode satu tahun terakhir tersebut dapat mendorong pertumbuhan pendapatan rumah tangga dari (-) 2,49 persen per tahun pada periode 2006-2010 menjadi sebesar

4,35 persen per tahun pada periode 2006-2011. Angka pertumbuhan ini melebihi capaian ekonomi yang ditetapkan oleh lembaga donor (ADB) yang sebesar 2 persen. Walaupun ada faktor lain yang memengaruhi pertumbuhan pendapatan rumah tangga, namun mengingat kebanyakan rumah tangga sampel adalah rumah tangga pokmas (56 persen dari 75 jumlah rumah tangga responden) sehingga dapat dikatakan bahwa kontribusi kegiatan-kegiatan pengelolaan berbasis masyarakat oleh COREMAP menunjukkan capaian yang cukup baik.

Tambahan pendapatan dari usaha budidaya KJT tersebut sekaligus juga menggambarkan capaian positif kegiatan COREMAP II dengan pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat. Meskipun demikian, pengembangan MPA juga menunjukkan ketidakberhasilan, yaitu MPA yang dilakukan oleh Pokmas Jender dan satu Pokmas Produksi dengan usaha budidaya ikan dengan KJT. Kegagalan Pokmas Jender disebabkan oleh modal usaha awal yang sangat terbatas dan pengelolaan usaha yang kurang baik. Sementara itu kegagalan satu pokmas dengan usaha KJT dilatarbelakangi oleh permasalahan SDM, terutama karena rendahnya pemahaman dan motivasi sebagian besar anggota pokmas untuk bekerja berkelompok. Kegagalan pengembangan MPA oleh dua pokmas tersebut nampaknya dapat "ditutupi" oleh capaian dari kegiatan lainnya, yaitu penyediaan tambatan perahu, MCK, sarana transportasi barang, pondok informasi, dan bantuan *speed boat*. Kesemua sarana dan prasarana tersebut sangat bermanfaat karena memfasilitasi kegiatan masyarakat, ekonomi maupun keseharian. Namun, bantuan *speed boat* yang ditujukan untuk memfasilitasi kegiatan pengawasan, pada kenyataannya tidak dilakukan karena alasan klasik, yaitu tidak ada dana operasional.

Kegiatan pengawasan dilakukan oleh masyarakat, tetapi cenderung bukan untuk perlindungan dan pelestarian terumbu karang di DPL. Pengawasan dilakukan untuk melindungi alat-alat tangkap

mereka dari garukan parit gamat dan *trawl mini* yang pada saat ini mulai banyak bermunculan lagi. Kenyataan ini menggambarkan menurunnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelestarian terumbu karang. Suatu persoalan yang jika tidak segera diatasi akan berdampak buruk terhadap kegiatan-kegiatan COREMAP yang telah dilakukan selama ini, karena penurunan kepedulian terhadap perlindungan dan pelestarian terumbu karang akan berdampak buruk terhadap sumber kehidupan mereka yang mayoritas bergantung pada sumber daya laut. Walau kegiatan pengembangan MPA telah berjalan cukup baik, namun dengan pembiaran penggunaan alat-alat tangkap yang merusak oleh masyarakat maupun pemerintah (kampung dan kabupaten), maka tidak menutup kemungkinan anggota Pokmas akan mengikuti kegiatan yang merusak tersebut. Terlebih, hasil budidaya ikan dengan KJT masih jauh lebih rendah dibanding hasil melaut.

Kurang atau bahkan ketidakpedulian masyarakat, khususnya di sekitar DPL terhadap penggunaan alat-alat tangkap yang merusak oleh orang luar maupun dalam desa adalah karena mereka tidak terlibat dalam program COREMAP, padahal pada COREMAP I mereka terlibat aktif dalam kegiatan konservasi laut. Hingga akan berakhirnya COREMAP II, dua dusun yang sebagian penduduknya juga bekerja sebagai nelayan dan bersinggungan dengan ekosistem terumbu karang tidak dilibatkan dalam program ini. Akibatnya, mereka semakin tidak peduli terhadap kegiatan yang merusak DPL, tetapi mereka cenderung tidak ikut merusak terumbu karang karena mereka pernah menjaga dan melindungi tempat tersebut.

Kegiatan-kegiatan COREMAP yang telah memberikan manfaat ekonomi maupun sosial tersebut tidak menjamin kegiatan MPA maupun perlindungan dan pelestarian terumbu karang yang berkelanjutan, terutama ketika program berakhir. Indikasi ini terlihat menurunnya hasil usaha budidaya KJT, meningkatnya penggunaan alat-alat tangkap yang merusak, dan tidak aktifnya pengawasan oleh

anggota kelompok. Penetapan zona konservasi, yaitu DPL, untuk dilindungi dan dilestarikan yang diperkuat dengan peraturan desa (Perdes) pada awalnya memang telah berhasil melindungi terumbu karang dari praktek-praktek penangkapan ikan yang merusak, namun karena lemahnya pengawasan laut membuat masyarakat kembali lagi menggunakan alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Jika kondisi ini tidak segera mendapat perhatian oleh pemerintah setempat, baik di tingkat desa maupun kabupaten, maka upaya pemberdayaan ekonomi yang sekaligus sebagai upaya perbaikan, perlindungan dan pelestarian terumbu karang yang sudah dilakukan oleh COREMAP di Desa Limbung selama kira-kira delapan tahun akan sia-sia. Berikut dibahas beberapa pemikiran tentang keberlanjutan kegiatan pelestarian terumbu karang yang dampaknya terhadap kontinuitas pendapatan masyarakat.

- Mengalihkan LPSTK COREMAP II ke dalam kelembagaan masyarakat desa (misalnya seperti Bamuskam) yang khusus mengelola kelanjutan kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik aspek ekonomi maupun pelestarian terumbu karang. Pengalaman LPSTK dalam mengelola administrasi keuangan dan melakukan pendampingan kepada Pokmas-Pokmas yang nampaknya cukup berhasil merupakan faktor yang kondusif untuk keberlanjutan kegiatan MPA maupun pengawasan DPL oleh masyarakat. Namun, prinsip akuntabilitas merupakan hal penting untuk diperhatikan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Rasa curiga sering menghambat keberlangsungan kegiatan. Terkait dengan pengembangan MPA yang rata-rata baru berjalan satu tahun, persoalan yang muncul adalah relasi kerja anggota pokmas yang tidak mendukung untuk pengelolaan usaha yang profesional. Persoalan ini dapat diatasi dengan memberikan pemahaman kepada anggota pokmas dan masyarakat pada umumnya bahwa keberhasilan usaha berkelompok harus dilandasi

oleh sikap dan perilaku yang bisa saling membantu diantara anggota kelompok, sadar risiko kegagalan usaha, dan meyakini bahwa usaha berkelompok tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat nelayan dalam pengelolaan usaha budidaya secara berkelanjutan. Apabila pendapatan sampingan dari usaha budidaya sudah semakin besar, maka diharapkan dapat mengurangi kegiatan penangkapan sumber daya laut yang merusak terumbu karang, di dalam maupun di luar zona konservasi atau daerah perlindungan laut.

- Memperkuat pengawasan mandiri oleh masyarakat nelayan yang diawali dengan memberikan pemahaman akan pentingnya daerah perlindungan laut yang difungsikan sebagai tabungan ikan sehingga mereka bersedia secara partisipatif untuk menjaga zona konservasi tersebut. Sosialisasi tentang manfaat DPL bagi kehidupan mereka harus menjadi prioritas, karena pengawasan mandiri yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini cenderung dilakukan untuk melindungi alat-alat tangkap mereka. Demikian pula pengawasan mandiri oleh masyarakat sudah dilakukan namun belum melibatkan seluruh dusun di Desa Limbung, tetapi hanya terbatas dilakukan oleh masyarakat nelayan dari dusun yang menjadi lokasi program COREMAP II. Dengan demikian, sosialisasi tentang manfaat ekologi dan ekonomi dari DPL kepada seluruh warga Desa Limbung di semua dusun, bukan hanya dapat memperkuat pengawasan DPL yang lebih intensif, tetapi juga mewujudkan sumber mata pencaharian nelayan yang berkesinambungan karena hasil tangkapan yang lestari sebagai akibat sumber daya terumbu karang di wilayah tersebut terjaga kelestariannya.
- Melibatkan masyarakat dusun lain, terutama dusun paling dekat dengan lokasi DPL. Hingga kini, dusun tersebut belum menjadi sasaran program pengembangan mata pencaharian alternatif. Oleh

karena itu, dari perguliran dana bantuan COREMAP II dapat dipakai untuk membentuk pokmas baru di dusun tersebut sehingga diharapkan berdampak pada upaya memperkuat kegiatan pengawasan mandiri terhadap DPL. Kenyataan menunjukkan bahwa mereka kurang peduli terhadap kegiatan merusak di lokasi DPL, besar kemungkinan karena mereka tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan COREMAP II. Namun, masyarakat di dusun tersebut tidak ikut dalam kegiatan merusak. Oleh karenanya dengan upaya pemberdayaan ekonomi pada sebagian masyarakat di dusun ini diharapkan dapat menjadi daya ungkit untuk memperkuat pengawasan mandiri yang selanjutnya berdampak pada pelestarian terumbu karang.

- Kegiatan penyadaran masyarakat tidak boleh berhenti dengan berakhirnya program COREMAP II. Himbauan pemerintah, minimal pemerintah Desa Limbung bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelestarian terumbu karang merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan. Kegiatan penyadaran masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam khususnya ekosistem terumbu karang sehingga dapat memengaruhi perubahan perilaku masyarakat yang pada saat ini cenderung kembali pada kegiatan yang merusak DPL, misalnya munculnya kembali sebagian nelayan yang menggunakan parit gamat untuk menangkap teripang. Penyebaran informasi secara meluas ke masyarakat melalui berbagai kegiatan desa menjadi wahana untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat agar menjaga dan melindungi terumbu karang, khususnya di daerah perlindungan laut. Pada akhirnya diharapkan dapat terwujud pengelolaan perikanan tangkap secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DKP, 2007. *Pedoman Umum Pengelolaan Berbasis Masyarakat COREMAP II*. Jakarta: DKP

-----, 2007. *Pedoman Umum Rencana Penyusunan Strategis Pengelolaan Terumbu Karang*.
<http://images.surajis.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SaKFbAoKCDAAABr73So1/Panduan%20Penyusunan%20Renstra%20Terumbu%20Karang%20Daerah.pdf?nmid=211257231>

DKP-COREMAP II 2008. *Petunjuk Tehnis Pengawasan Berbasis Masyarakat*. http://www.coremap.or.id/downloads/Manual-MCS_berbasis_Masyarakat.pdf

<http://surajis.multiply.com/journal/item/158>. 2011. *Keberlanjutan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang*. Diunggah tgl 20 Agustus 2011.

Latama, Gunarto, dkk. 2002. *Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat*.
http://rudycr.tripod.com/sem1_023/group2_123.htm.

linggapos.com. 2011. DPK-LPPN-RI LINGGA: *Hentikan Penambangan Bauksit*. http://www.linggapos.com/2378_dpk-lppn-ri-lingga-hentikan-penambangan-bauksit.html.

- Romdiati, H, E.Djohan; dan S.Rahayu. 2008. *Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia: Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga*. Jakarta: LIPI Press.
- Romdiati, H dan E. Djohan. 2008. *Kajian BME Aspek Sosial Ekonomi Desa Limbung, Kabupaten Lingga, Provinsi Riau*.
- Romdiati, H. dan E. Djohan, 2010. *Perkembangan Pendapatan Masyarakat COREMAP II Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga*.
- Rudiyanto, tanpa tahun. *Materi Penyusunan Aturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*.
<http://www.irg ltd.com/Resources/Publications/ANE/Materi%20Acuan%20FINAL.pdf>
- Syafikri. 2009. *Deforesasi Mangrove dan Pencemaran Perairan: Pengaruhnya Terhadap hasil tangkapan ikan di Kota Semarang, Jawa Tengah*.
<http://fikrimarineundip.blogspot.com/2009/05/deforestasi-mangrove-dan-pencemaran.html>
- Tanjungpinang pos, 2011. *Kabupaten Lingga Jadi Prioritas Program Coremap III*. <http://tanjungpinangpos.co.id/2011/08/kabupaten-lingga-jadi-prioritas-program-coremap-iii/>
- Tarigan, Antonius. 2008. *Pokok-Pokok Pikiran Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Ekosistem Terumbu Karang*.
<http://www.bappenas.go.id/node/711186/pokok-pokok-pikiran-pemberdayaan-masyarakat-dalam-pelestarian-ekosistem-terumbu-karang---oleh-antonius-tarigan/>

Lampiran Tabel 1

Tabel 1

Distribusi Anggota Rumah Tangga Sampel Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Desa Limbung Tahun 2006 Dan 2011 (Persen)

Kelompok Umur	2006		2011	
	Laki-laki	Persentase	Jumlah	Persentase
0 - 4	9,8	5,9	7,6	10,7
5 - 9	7,7	8,5	8,1	9,0
10 - 14	8,9	12,5	10,5	5,7
15 - 19	14,2	11,5	13,0	9,0
20 - 24	12,2	12,0	12,1	12,3
25 - 29	9,8	7,0	8,5	4,1
30 - 34	4,9	5,5	5,2	9,8
35 - 39	5,3	9,0	7,0	10,7
40 - 44	7,7	6,5	7,2	8,2
45 - 49	4,9	3,5	4,3	5,7
50 - 54	2,8	6,0	4,3	7,4
55 - 59	2,4	4,0	3,1	3,3
60 - 64	6,9	3,0	5,2	2,5
65 +	2,4	6,0	4,0	1,6
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0
N	246	200	446	122

Sumber: - Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006.

- Survei BME Aspek Sosial-Ekonomi, PPK-LIPI, 2011.

Lampiran Tabel 2

Statistik Pendapatan Rumah Tangga Per Bulan, Desa Limbung, Kabupaten Lingga, Tahun 2006, 2008, 2010, dan 2011 (Rupiah), N = 100

<i>Pendapatan</i>	<i>Besar (Rp.)</i>			
	2006	2008	2010	2011
Per kapita	223.200	423.050	220.120	368.230
Rata-rata rumah tangga	948.300	1.360.700	754.300	1.216.600
Median	754.800	981.250	568.750	991.700
Minimum	10.000	75.000	7.500	216.700
Maksimum	6.375.000	10.157.500	3.729.200	6.116.700
N	100	100	100	75

Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang, PPK-LIPI 2006

- Survei BME Aspek Sosial-Ekonomi, PPK-LIPI 2008, 2010, dan 2011

Lampiran Tabel 3

Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga, Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Tahun 2006, 2008, 2010, dan 2011

Lapangan Pekerjaan	Pendapatan rata-rata					
	2006		2008		2011	
	Ribu Rp	n	Ribu Rp	n	Ribu Rp	n
Perikanan tangkap	1.050.500	68	1.376.800	67	1.227.900	56
Perikanan budidaya	0	0	0	0	1.030.000	1
Pertanian pangan	505.000	2	600.000	1	-	0
Kehutanan	0	0	700.000	2	-	0
Perkebunan	681.300	7	1.712.200	6	1.446.400	3
Perdagangan	933.300	3	1.858.700	2	1.500.000	7
Industri pengolahan	850.200	5	600.000	12	272.200	3
Jasa kemasayarakatan	777.600	4	-	-	1.194.400	3
Lainnya	732.500	4	470.000	2	270.800	1

Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial-Ekonomi Terumbu Karang, PPK LIP1 2006

- Survei BME Aspek Sosial-Ekonomi, PPK-LIP1 2008

